

**KONSEP IDEOLOGI DALAM TEKS PIDATO KENEGARAAN  
PRESIDEN JOKO WIDODO: KAJIAN ANALISIS WACANA KRITIS**



*Building  
Future  
Leaders*

**SAYYIDAH KHAIRUNNIDA**

**2125134624**

Skripsi yang diajukan kepada Universitas Negeri Jakarta untuk memenuhi salah  
satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Sastra

**PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA**

**FAKULTAS BAHASA DAN SENI**

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**2017**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Sayyidah Khairunnida  
Nomor Registrasi : 2125134624  
Program Studi : Sastra Indonesia  
Fakultas : Bahasa dan Seni  
Judul Skripsi : Konsep Ideologi dalam Teks Pidato Kenegaraan Presiden  
Joko Widodo: Kajian Analisis Wacana Kritis

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji, dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta.

### DEWAN PENGUJI

#### Pembimbing I

Aulia Rahmawati, M.Hum  
NIP. 19800914 200801 2 013

#### Pembimbing II

Asida Wahyu AP, M. Hum  
NIP. 19771126 200812 1 001

#### Penguji Ahli Materi

Drs. Krisanjaya, M. Hum.  
NIP. 19680713 199203 1 001

#### Penguji Ahli Metodologi

Dr. Miftahulkhairah Anwar, M.Hum  
NIP. 19781122 200604 2 001

#### Ketua Penguji

Aulia Rahmawati, M.Hum  
NIP. 19800914 200801 2 013



Agustus 2017  
Dekan Fakultas Bahasa dan Seni  
Dr. Liliana Muliastuti, M.Pd.  
NIP. 19680529 199203 2 001

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sayyidah Khairunnida

No. Reg. : 2125134624

Prodi : Sastra Indonesia

Fakultas : Bahasa dan Seni

Menyatakan bahwa Tugas Akhir Skripsi ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali sebagai bahan acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara dan etika penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Agustus 2017



Sayyidah Khairunnida  
NIM. 2125 13 4624

## **LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sayyidah Khairunnida  
No. Reg. : 2125134624  
Program Studi : Sastra Indonesia  
Fakultas : Bahasa dan Seni  
Judul Skripsi : Konsep Ideologi dalam Teks Pidato Kenegaraan Presiden  
Joko Widodo: Kajian Analisis Wacana Kritis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Jakarta Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Execlusife Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet maupun media lainnya untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atau pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Agustus 2017  
Yang menyatakan,

Sayyidah Khairunnida  
NIM. 2125 13 4624

## LEMBAR PERSEMBAHAN

*Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua yang sangat berperan dan sangat berarti dalam hidupku. Orang tua yang cinta dan kasih sayangnya tidak akan pernah habis. Orang tua yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untukku. Orang tua yang luar biasa, yang akan selalu menjadi inspirasiku.*

*Ini untukmu, Mam & Pap.*

## ABSTRAK

**Sayyidah Khairunnida.** Ideologi dalam Teks Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo: Kajian Analisis Wacana Kritis. Skripsi. Jakarta: Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk ideologi yang terdapat dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan membaca teks pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, menentukan teks pidato yang memiliki kemiripan berdasarkan ideologi yang terkandung di dalamnya, dan memilih kosakata atau bentuk gramatikal dari teks pidato tersebut. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu tahap deskripsi, tahap interpretasi, dan tahap eksplanasi. Berdasarkan hasil analisis diketahui, bahwa pada kedua teks pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo terkandung ideologi. Ideologi yang dominan muncul dari kedua teks pidato kenegaraan tersebut adalah ideologi ekonomi. Pada tahap analisis teks, dari 200 kalimat yang mengandung ideologi, terdapat 18 hegemoni (6,23%), 39 kekuasaan (13,45%), 71 politik (24,57%), 101 ekonomi (34,95%), dan 65 sosial budaya (22,5%) baik pada bentuk kosakata maupun bentuk gramatikal. Hasil analisis juga telah didukung dengan tahap dimensi praktik wacana dan praktik sosiokultural.

**Kata kunci:** Analisis Wacana Kritis, Ideologi.

## ABSTRACT

**Sayyidah Khairunnida.** *The Ideology Concept Of President Joko Widodo's State Speech Text: The Study Of Critical Discourse Analysis. Thesis. Jakarta: Indonesian Literature Study Program, Faculty of Languages and Arts, Jakarta State University.*

*This study aims to determine the ideological form that existed in the state speech of President Joko Widodo. The method used in this research is descriptive qualitative. The technique of volumes Joko Widodo, the definition of speech texts that have similarities based on the ideology contained therein, and the choice of vocabulary or grammatical form of the text of the speech. Data analysis technique in this research is done by three stages, namely description stage, stage of interpretation, and explanation stage. Based on the results of the analysis, it is known in both the text of the state speech of President Joko Widodo contained ideology. The dominant ideology arises from these two speeches of statehood is the economic ideology. Hegemony (4%), 37 powers (18.5%), 43 politics (21.5%), 70 economies (35%), and 42 socio-cultural (44.5%), 21% both in vocabulary form Grammatical form. The results of the analysis have also been supported by the phases of discourse practice and sociocultural practice.*

*Keywords: Critical Discourse Analysis, Ideology.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas segala rahmat dan nikmat yang senantiasa telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Taklupa shalawat serta salam yang selalu tercurah untuk Baginda Rasulullah, Muhammad SAW yang telah menyampaikan pedoman hidup beserta para sahabat dan pengikutnya.

Dalam proses pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, karenanya penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Liliana Muliastuti, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Bahasa dan Seni.
2. Dr. Miftakhulhairah Anwar, M. Hum. sebagai Koordinator Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta yang telah menyemangati dan mengingatkan mahasiswanya agar menyelesaikan skripsi dengan sabar dan tanpa lelah.
3. Aulia Rahmawati, M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Materi yang telah membimbing dengan tulus dan sabar tanpa lelah, serta memberikan berbagai masukan dan ilmu sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
4. Asisda Wahyu AP, M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Metodologi yang tak pernah lelah memberikan saran dan masukan berupa ilmu dan semangat sehingga penulisan skripsi ini mendapat kelancaran.



5. Drs. Krisanjaya, M.Hum. sebagai penguji ahli materi yang bersedia menguji penulis dengan sabar dan penuh ketelitian, serta saran dan arahan yang jelas.
6. Dr. Miftahulhairah Anwar, M.Hum. sebagai penguji ahli metodologi yang telah memberi saran agar skripsi ini semakin berkualitas.
7. Aulia Rahmawati, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat, motivasi, serta arahan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan.
8. Seluruh dosen Program Studi Sastra Indonesia yang telah mengajarkan dan membimbing sejak awal hingga akhir perkuliahan.
9. Para Staf Program Studi Sastra Indonesia yang telah sabar dan ikhlas memberikan bantuan dan memudahkan segala administrasi.
10. Kedua orang tua yang tercinta dan terkasih, Drs. Ahmad Sujai dan Dra. Tika Kartika yang selalu memberikan semangat, dukungan dan kasih sayang, serta memperhatikan penulis tanpa kenal lelah dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kedua adik, Nihayatul Mashumah dan Watsiqullubab Azza, yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis
12. Teman-teman Geng Princess, Septia Dwi Ariani, Mita Utami, Siti Khairunnisa, Hutmiati, Sabrina Geavani, Reynaldi Hermawan, Marwan Fitranansya, Aditya Pratama, dan M. Rival Fedrian yang selalu saling menyemangati dan memberikan canda tawa di sela-sela pengerjaan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan kelas 4 SI L, teman-teman dari Program Studi Sastra Indonesia dan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia lainnya yang memberi dukungan dan semangat kepada penulis.

14. Teman-teman SUPER TRAP, Tania, Hilda, Flora, Dahlia, Resy, Muti, Verdi, Memet, Ilham, Adnan, Fachrul, Arif, dan Rio yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.

15. Dan terakhir untuk semua pihak yang telah turut serta membantu yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih sebanyak-banyaknya.

Penulis sangat berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Namun, penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka sekiranya penulis menerima saran atau kritik yang sifatnya membangun.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, Juli 2017

Sayyidah Khairunnida

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Pembatasan Masalah .....	5
1.4 Perumusan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	6

### **BAB II KAJIAN TEORI**

2.1 Landasan Teori .....	8
--------------------------	---

2.1.1 Hakikat Wacana .....	8
2.1.2 Hakikat Analisis Wacana Kritis .....	11
2.1.2.1 Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough .....	19
2.1.3 Hakikat Ideologi .....	24
2.1.4 Hakikat Pidato .....	39
2.2 Kerangka Berpikir .....	42
2.3 Penelitian Relevan.....	43

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Tujuan Penelitian.....	44
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	44
3.3 Metodologi Penelitian .....	44
3.4 Fokus Penelitian .....	45
3.5 Objek Penelitian .....	45
3.6 Instrumen Penelitian.....	46
3.7 Teknik Pengumpulan Data .....	46
3.8 Analisis Data .....	47
3.9 Kriteria Analisis .....	47

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

4.1 Deskripsi Data.....	53
4.2 Analisis Data.....	56
4.3 Rangkuman Data.....	81
4.4 Interpretasi Data.....	83
4.5 Pembahasan.....	86
4.6 Keterbatasan Penelitian.....	88\

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	90
5.2 Saran .....	91

<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>92</b>
-----------------------------	-----------

<b>Lampiran .....</b>	<b>95</b>
-----------------------	-----------

## DAFTAR LAMPIRAN

Teks Pidato Kenegaraan Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, di depan Sidang Bersama DPR RI Dan DPD RI, Jakarta, 14 Agustus 2015.....	96
Teks Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke-71 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DRI RI dan DPD RI, Jakarta, 16 Agustus 2016 .....	109
Tabel Analisis Teks Pidato Kenegaraan Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, di depan Sidang Bersama DPR RI Dan DPD RI, Jakarta, 14 Agustus 2015 .....	121
Tabel Analisis Teks Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke-71 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DRI RI dan DPD RI, Jakarta, 16 Agustus 2016 .....	181

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

### **1.1 Latar Belakang**

Bahasa dapat digunakan sebagai alat ukur keterampilan berbicara seseorang. Dengan bahasa yang baik, tentu saja seseorang menjadi terampil untuk berbicara. Tidak hanya di depan teman-teman atau orang-orang terdekatnya saja, seseorang yang memiliki keterampilan berbicara dengan baik, maka ia pasti bisa berbicara di depan orang dengan jumlah banyak atau berbicara di depan orang asing yang tidak dikenalnya dengan baik pula. Salah satu bentuk keterampilan berbicara di depan orang banyak adalah dengan melakukan pidato.

Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Pidato merupakan suatu ucapan yang memiliki susunan yang baik guna disampaikan kepada orang banyak. Peranan pidato, ceramah, penyajian penjelasan secara lisan kepada suatu kelompok massa merupakan suatu hal yang sangat penting, baik pada waktu sekarang maupun pada waktu-waktu yang akan datang. Mereka yang mahir berbicara akan dengan mudah dapat

menguasai massa dan berhasil memasarkan gagasan mereka sehingga dapat diterima oleh orang lain. Dalam sejarah umat manusia, dapat dicatat betapa keampuhan penyajian lisan ini yang mampu mengubah sejarah umat manusia atau sejarah suatu bangsa.<sup>1</sup>

Pidato biasanya dibawakan oleh seorang yang memberikan orasi-orasi dan pernyataan tentang suatu hal atau peristiwa yang penting dan patut diperbincangkan. Umumnya pidato digunakan oleh seorang pemimpin guna memimpin dan berorasi di depan khalayak ramai atau anak buahnya. Contoh nyata dari pidato yang digunakan oleh seorang pemimpin guna memimpin dan berorasi di depan khalayak ramai adalah pidato kenegaraan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo setiap menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia. Sebagai orang nomor satu di Indonesia yang bertugas untuk melakukan pidato kenegaraan, tentunya Presiden Joko Widodo memiliki keterampilan berbicara yang baik.

Dalam menyampaikan pidato kenegaraan tersebut, tentu saja ada ide-ide atau gagasan-gagasan yang ingin disampaikan oleh seorang presiden kepada rakyatnya. Dalam pidatonya pun, pasti ada pemikiran-pemikiran yang dituangkan oleh sang presiden. Ide-ide, gagasan-gagasan, atau pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam pidato tersebut umumnya memiliki bentuk yang berbeda-beda, seperti hegemoni, kekuasaan, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Contoh gagasan atau ide yang terdapat dalam pidato kenegaraan presiden Joko Widodo adalah "*Sekarang kita berada pada era persaingan global. Kompetisi antarnegara luar biasa kerasnya, luar biasa sengitnya.*

---

<sup>1</sup> Gorys Keraf, *Komposisi*, (Semarang: Percetakan Bina Putera, 2004), hlm. 358



*Untuk memenangkan kompetisi, untuk menjadi bangsa pemenang, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kita harus kreatif, harus optimis, harus bahu-membahu, dan melakukan terobosan-terobosan. Semua itu demi mempercepat pembangunan nasional, demi meningkatkan daya saing kita sebagai bangsa.”<sup>2</sup>*

Dalam kutipan pidato tersebut, dapat dilihat bahwa, sebagai presiden, Joko Widodo menghimbau rakyatnya untuk berani keluar dari zona nyaman demi menjadi bangsa pemenang. Hal itu merupakan ide atau gagasan yang terdapat dalam pidato kenegaraan Joko Widodo. Ide atau gagasan ini kemudian disebut dengan ideologi. Ideologi mencakup pengertian tentang ide-ide, pengertian dasar, gagasan dan cita-cita. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang luas, sebagai cara memandang segala sesuatu. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak (tidak hanya sekadar pembentukan ide) yang diterapkan pada masalah publik sehingga pembuat konsep ini menjadi intisari politik.

Terdapat banyak ideologi dalam pidato kenegaraan presiden Joko Widodo. Ideologi ini kemudian dapat ditelaah melalui kajian Analisis Wacana Kritis. Analisis Wacana Kritis (AWK) adalah sebuah upaya atau proses (penguraian) untuk memberi penjelasan dari sebuah teks (realitas sosial) yang mau atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang kecenderungannya mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan.<sup>3</sup> Artinya, dalam sebuah konteks harus disadari akan adanya kepentingan. Oleh karena itu, analisis yang terbentuk nantinya disadari telah

---

<sup>2</sup> Teks Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo 16 Agustus 2016 hlm. 1

<sup>3</sup> Yoce Aliah Darma, *Analisis Wacana Kritis* (Bandung: Penerbit Yrama Widya), hlm. 49

dipengaruhi oleh si penulis dari berbagai faktor. Selain itu harus disadari pula bahwa di balik wacana itu terdapat makna dan citra yang diinginkan serta kepentingan yang sedang diperjuangkan. Dari tulisan Teun A. Van Dijk, Fairclough, dan Wodak dapat ditemukan lima karakteristik penting dari Analisis Wacana Kritis. Kriteria-kriteria penting itu adalah tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologis.

Ideologi merupakan bagian dari Analisis Wacana Kritis karena teks, percakapan, dan lainnya (termasuk di dalamnya pidato) adalah bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. Ideologi merupakan konsep sentral dalam kajian analisis wacana yang bersifat kritis. Ideologi dalam Analisis Wacana Kritis dapat dikaji dengan Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough. Menurut Norman Fairclough, setiap teks memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi teks, dimensi praktik wacana, dan dimensi praktik sosiokultural. Melalui Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough ideologi yang terkandung dalam teks pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dapat diungkap berdasarkan dimensi teks, dimensi praktik wacana, dan dimensi praktik sosiokultural..

Sebagaimana telah disebutkan bahwa melalui Analisis Wacana Kritis dapat mengungkap ideologi yang terdapat pada pidato kenegaraan, karena itulah penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Konsep Ideologi dalam Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo: Analisis Wacana Kritis”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Merujuk pada latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan latar belakang di atas.

1. Bagaimana bentuk ideologi yang terdapat dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo?
2. Bagaimana ideologi dalam dimensi teks pada pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo?
3. Bagaimana ideologi pada dimensi praktik wacana dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo?
4. Bagaimana ideologi dalam dimensi praktik sosiokultural dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo?
5. Bagaimana konsep ideologu dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo?

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini dibatasi pada konsep ideologi dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo berdasarkan tinjauan Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough yang dilihat dari tiga dimensi, yaitu dimensi teks, dimensi praktik wacana, dan dimensi praktik sosial.

#### **1.4 Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “*Bagaimana konsep ideologi dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo berdasarkan tinjauan Analisis Wacana Kritis?*”.

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konsep ideologi dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo berdasarkan tinjauan Analisis Wacana Kritis.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian diharapkan mampu menambah khasanah program studi sastra Indonesia khususnya bagi perkembangan penelitian yang berbasis kualitatif.
  - b. Penelitian ini juga diharapkan dijadikan referensi bagi kajian analisa teks sebagai salah satu kajian bahasa dan sastra Indonesia. Selain itu, penelitian dapat dijadikan sebagai bahan rujukan mahasiswa bahasa dan sastra yang ingin mengkaji tentang Analisis Wacana Kritis.

## 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat merefleksikan bagaimana ideologi yang terdapat dalam teks pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang dilihat dari pidato yang disampaikan beliau sehingga dapat memberikan manfaat bagi *civitas academica* dan masyarakat umum.
- b. Penelitian ini juga diharapkan mampu merepresentasikan cara berpikir seorang pemimpin dalam menjalankan sebuah pemerintahan, sehingga dapat diambil manfaat pelajaran bagi pemimpin yang sekarang maupun yang akan datang.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

Bagian ini terbagi atas tiga poin yaitu landasan teori, kerangka berpikir, dan penelitian relevan.

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Hakikat Wacana**

Istilah wacana dipakai oleh banyak kalangan mulai dari studi bahasa, psikologi, politik, komunikasi, sastra, dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris, wacana disebut dengan *discourse*. Kata *discourse* berasal dari bahasa Latin *discursus* yang berarti lari kian-kemari (yang diturunkan dari *dis-* ‘dari, dalam arah yang berbeda’, dan *currere* ‘lari’).<sup>4</sup> Di dalam salah satu karya yang ditulis oleh Willis Edmondson pada tahun 1981 yang berjudul *Spoken Discourse: a Model for Analysis*, Edmondson mengatakan bahwa “*a discourse is a structured event manifest to linguistic (and other) behaviour*”. Wacana adalah suatu peristiwa yang terstruktur yang dimanifestasikan dalam perilaku bahasa atau yang lainnya.<sup>5</sup> Roger Fowler mendefinisikan wacana sebagai komunikasi lisan atau tulisan yang dilihat dari titik pandang kepercayaan, nilai, dan kategori yang masuk di dalamnya; kepercayaan di

---

<sup>4</sup> Alex Sobur, *Analisis Teks Media* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm 9

<sup>5</sup> Sumarlam, dkk, *Teori dan Praktik Analisis Wacana* (Surakarta: Pustaka Cakra, 2003), hlm. 5

sini mewakili pandangan dunia; sebuah organisasi atau representasi dari pengalaman.<sup>6</sup>

Di dalam karyanya yang berjudul *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*, Norman Fairclough berpendapat bahwa

*“discourse is use of language seen as form of social practice, and discourse analysis is analysis of how texts work within social cultural practice. Such analysis requires attention to textual form, structure, and organization at all levels; phonological, grammatical; lexical (vocabulary) and higher levels of textual organization in terms of exchange systems (the distribution of speaking turns), structures of argumentation, and generic (activity type) structures”.*<sup>7</sup>

Yang berarti bahwa wacana adalah pemakaian bahasa tampak sebagai sebuah bentuk praktik sosial, dan analisis wacana adalah analisis mengenai bagaimana teks bekerja atau berfungsi dalam praktik sosial budaya.

Menurut Harimurti Kridalaksana, wacana (*discourse*) adalah satuan bahasa terlengkap; dalam hierarki gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel, buku, seri ensiklopedia, dsb.), paragraf, kalimat atau kata yang membawa amanat yang lengkap.<sup>8</sup> Di dalam *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* suntingan Anton M. Moeliono, dinyatakan bahwa wacana ialah rentetan kalimat yang berkaitan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat itu; atau wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan yang menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain membentuk satu kesatuan.<sup>9</sup>

Ditinjau dari kelengkapan unsurnya, wacana merupakan unit bahasa yang paling lengkap unsurnya. Hal itu dapat dilihat dalam ciri-ciri dan sifat wacana. Ciri dan sifat wacana yang *pertama* adalah wacana dapat berupa

<sup>6</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2011), hlm. 2

<sup>7</sup> Sumarlam, *Op.Cit*, hlm. 12

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 9

rangkaian ujar secara lisan dan tulisan atau rangkaian tindak tutur. *Kedua*, wacana mengungkapkan suatu hal (subjek). *Ketiga*, wacana disajikan secara teratur, sistematis, koheren, dan lengkap dengan semua situasi pendukungnya. *Keempat*, wacana memiliki kesatuan misi dalam rangkaiannya. *Kelima*, wacana dibentuk oleh unsur segmental dan nonsegmental.<sup>10</sup>

Wacana memiliki wujud yang berupa atau berbentuk wacana yang nyata dan strukturnya dapat dilihat secara nyata. Wacana pun memiliki jenis yang berarti bahwa wacana itu memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri khas yang dapat dibedakan dari bentuk bahasa lain. Berkaitan dengan konteks wacana, Kridalaksana mengatakan bahwa konteks merupakan ciri-ciri alam di luar bahasa yang menumbuhkan makna pada ujaran atau wacana (lingkungan nonlinguistik dari wacana). Konteks wacana terbagi menjadi delapan, yaitu latar (*setting*), peserta (*participant*), hasil (*ends*), amanat (*message*), cara (*key*), sarana (*instruments*), norma (*norms*), dan jenis (*genre*).<sup>11</sup> Dalam wacana, topik dapat menentukan sifat kewacanaan. Sementara itu, situasi dalam wacana berperan untuk menentukan bentuk-bentuk bahasa yang digunakan dalam wacana.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai batasan wacana di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian wacana adalah satuan bahasa yang berbentuk lisan maupun tulisan yang merupakan satuan bahasa yang memiliki unsur-unsur yang lengkap.

---

<sup>10</sup> Yoce Aliah Darma, *Op.Cit*, hlm. 3

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 5



### 2.1.2 Hakikat Analisis Wacana Kritis

Dalam Analisis Wacana Kritis, wacana yang dimaksud tidak dipahami sebagai studi bahasa. Analisis Wacana Kritis (sering disingkat AWK) memberikan teori dan metode untuk studi empiris tentang hubungan antara wacana dan perkembangan sosial budaya dalam ranah sosial yang berbeda. Analisis Wacana Kritis adalah sebuah upaya atau proses (penguraian) untuk memberi penjelasan dari sebuah teks (realitas sosial) yang akan atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang kecenderungannya mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan.<sup>12</sup> Dalam hal ini, analisis wacana yang dimaksud adalah sebagai upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari subjek (penulis) yang mengemukakan suatu pernyataan.

Analisis Wacana Kritis menyediakan teori dan metode yang bisa digunakan untuk melakukan kajian empiris tentang hubungan-hubungan antara wacana dan perkembangan sosial dan kultural dalam domain-domain sosial yang berbeda. Analisis Wacana Kritis bisa diidentifikasi menjadi lima ciri umum, yaitu:

- a. sifat struktur dan proses kultural dan sosial merupakan sebagian linguistik-kewacanaan
- b. wacana itu tersusun dan bersifat konstitutif

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 49

- c. penggunaan bahasa hendaknya dianalisis secara empiris dalam konteks sosialnya
- d. fungsi wacana secara ideologis
- e. penelitian kritis.

Analisis wacana adalah studi tentang struktur pesan dalam komunikasi. Dalam pandangan Littlejohn, meski menulis dan bahkan bentuk-bentuk nonverbal dapat dianggap wacana, kebanyakan analisis wacana berkonsentrasi pada percakapan yang muncul secara wajar. Menurutnya, terdapat beberapa untai analisis wacana bersama-sama menggunakan seperangkat perhatian. Pertama, seluruhnya mengenai cara-cara wacana disusun, prinsip yang digunakan oleh komunikator untuk menghasilkan dan memahami percakapan atau tipe-tipe pesan lainnya. Kedua, wacana dipandang sebagai aksi; ia adalah cara melakukan segala hal, biasanya dengan kata-kata.<sup>13</sup>

Teun Van Dijk mengemukakan bahwa Analisis Wacana Kritis digunakan untuk menganalisis wacana-wacana kritis, di antaranya politik, ras, gender, kelas sosial, hegemoni, dan lain-lain. Sementara itu, Fairclough dan Wodak membuat sebuah ringkasan mengenai prinsip-prinsip ajaran Analisis Wacana Kritis, yaitu: (1) membahas masalah-masalah sosial, (2) mengungkapkan bahwa relasi-relasi kekuasaan adalah diskursif, (3) mengungkap budaya dan masyarakat, (4) bersifat ideologi, (5) bersifat

---

<sup>13</sup> Marianne W. Jorgensen dan Louise J. Phillips, *Analisis Wacana Kritis Teori dan Metode*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 115-121

historis, (6) mengemukakan hubungan antara teks dan masyarakat, (7) bersifat interpretatif dan eksplanatori.

Analisis Wacana Kritis melihat bahasa sebagai fakta penting, yaitu bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan-ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat. Perlu diketahui bahwa bahasa merupakan salah satu akar persoalan secara keseluruhan, maka pengkajian aspek linguistik terhadap bahasa adalah penting. Dalam Analisis Wacana Kritis struktur linguistik digunakan untuk (1) menyistematiskan, mentransformasikan, dan mengaburkan analisis realitas, (2) mengatur ide dan perilaku orang lain, serta (3) menggolong-golongkan masyarakat.<sup>14</sup>

Selain dapat digunakan untuk mengkritik, Analisis Wacana Kritis dipakai untuk mengungkapkan tentang hubungan ilmu pengetahuan dan kekuasaan. Sementara itu, dalam konteks sehari-hari Analisis Wacana Kritis dapat digunakan untuk membangun kekuasaan, ilmu pengetahuan baru, regulasi dan normalisasi, dan hegemoni (pengaruh satu bangsa terhadap bangsa lain). Menurut Habermas Analisis Wacana Kritis bertujuan untuk membantu menganalisis dan memahami masalah sosial dalam hubungannya antara ideologi dan kekuasaan. Tujuan Analisis Wacana Kritis adalah untuk mengembangkan asumsi-asumsi yang bersifat ideologis yang terkandung dibalik kata-kata dalam teks atau ucapan dalam berbagai bentuk kekuasaan. Menurut Fairclough, Analisis Wacana Kritis mencoba mempersatukan dan menentukan hubungan antara (1) teks aktual, (2) latihan diskursif (proses ini

---

<sup>14</sup> Yoce Aliah Darma, *Op.Cit*, hlm. 51

melibatkan mencipta, menulis, ujaran dan menyimak), dan (3) konteks sosial yang berhubungan dengan teks dan latihan diskursif.<sup>15</sup>

Menurut Fairclough dan Wodak, Analisis Wacana Kritis melihat wacana—pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan—sebagai bentuk dari praktik sosial. Analisis Wacana Kritis setidaknya memiliki lima karakteristik, yaitu: (a) tindakan, (b) konteks, (c) historis, (d) kekuasaan, dan (e) ideologi.<sup>16</sup>

a. Tindakan

Proses pertama dalam wacana yang menitikberatkan pada tindakan (*action*). Hal ini sebagai pemahaman untuk mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi. Seseorang berbicara, menulis, menggunakan bahasa untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Dalam pemahaman ini, memunculkan berbagai konsekuensi bagaimana wacana itu dipandang. Pertama wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, membujuk, menyangga, bereaksi, mendebat, dan sebagainya. Membaca dan menulis mempunyai maksud tertentu, baik besar atau kecil. Kedua, wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran.

b. Konteks

Analisis Wacana Kritis mempertimbangkan konteks dari wacana, yaitu: latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Wacana di sini diproduksi,

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 53

<sup>16</sup> Eriyanto, *Op.Cit*, hlm. 7

dimengerti, dianalisis dalam konteks tertentu. Analisis Wacana Kritis juga memeriksa konteks dari komunikasi; siapa yang mengasumsikan, dengan siapa dan mengapa; dalam jenis khalayak dan dalam situasi apa; melalui medium apa; bagaimana perbedaan tipe perkembangan komunikasi, dan bagaimana hubungan antara setiap pihak. Bahasa dalam hal ini dipahami dalam konteks secara keseluruhan. Ada tiga sentral dalam pengertian wacana, yaitu teks, konteks, dan wacana. Teks adalah sebuah bentuk bahasa, bukan hanya kaa-kata yang dicetak, tapi juga jenis ekspresi komunikasi, ucapan, musik, gambar, efek suara, citra, dan sebagainya. Konteks, memasukkan semua situasi dan hal yang berbeda di luar, dan mempengaruhi pemakaian bahasa. Seperti partisipan dalam bahasa, situasi di mana teks itu diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dan sebagainya. Bagian sentral analisis wacana adalah menggambarkan teks secara bersama-sama dalam proses komunikasi. Dalam hal ini tidak hanya proses kognisi dalam arti umum, tetapi juga menggambarkan spesifik dari budaya yang dibawa. Studi bahasa dalam Analisis Wacana Kritis, memasukkan konteks, karena bahasa selalu berada dalam konteks, karena tidak ada tindakan komunikasi tanpa partisipan, interseks, dan sebagainya.

c. Historis

Salah satu aspek penting dalam mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana tersebut ke dalam konteks historis tertentu. Saat melakukan analisis, diperlukan tinjauan untuk mengerti mengapa

wacana berkembang atau dikembangkan seperti itu, mengapa bahasa yang dipakai seperti itu dan seterusnya.

d. Kekuasaan

Analisis Wacana Kritis mempertimbangkan elemen kekuasaan dalam analisisnya, setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks percakapan, atau apa pun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang ilmiah, wajar netral, tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan sebagai salah satu hubungan antara wacana dengan masyarakat, seperti kekuasaan laki-laki, wacana seksisme, kekuasaan kulit putih terhadap kulit hitam, dan wacana mengenai rasisme, kekuasaan perusahaan berbentuk dominasi pengusaha kelas atas bawahan dan sebagainya. Pemakai bahasa bukan hanya pembicara, penulis, pengarang atau pembaca, ia juga bagian dari anggota kategori sosial tertentu, bagian dari kelompok profesional, agama, komunitas atau masyarakat tertentu. Seseorang yang mempunyai wacana, bukan hanya menentukan bagian mana yang perlu ditampilkan dan mana yang tidak, tetapi bagaimana ia tetap harus ditampilkan. Hal ini bisa dinilai dari percakapan kata-kata yang mempunyai muatan-muatan tertentu.

e. Ideologi

Ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk memproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. Salah satu strateginya adalah membuat kesadaran kepada khalayak bahwa dominasi itu diterima secara *taken for granted*. Wacana dalam

pendekatan semacam ini dipandang sebagai medium melalui mana kelompok yang dominan mempersuasi dan mengonsumsi kepada khalayak produksi kekuasaan dan dominan yang mereka miliki, sehingga tampak absah dan benar sesuai dengan apa yang dikatakan. Ideologi dari kelompok dominan hanya efektif jika didasarkan dengan pada kenyataan bahwa anggota komunikasi termasuk yang didominasi melalui kampanye *disinformasi* (seperti demonstrasi buruh menyebabkan suatu kerusuhan, yang selalu bertindak kriminal) dilakukan melalui *control media*, dan sebagainya. Suatu ideologi bertindak secara dinamis namun sembunyi-sembunyi dan melegitimisir tindakan yang kemudian memunculkan hal yang “wajar” untuk bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian dari pemaparan inilah yang disebutkan dengan efek ideologi sehingga dapat timbul Analisis Wacana Kritis.

Berkaitan dengan karakteristik Analisis Wacana Kritis di atas, Penycook mengemukakan delapan prinsip tentang Analisis Wacana Kritis<sup>17</sup>, yaitu:

1. Analisis Wacana Kritis membahas problem-problem sosial. Sehingga fokusnya bukan pada pemahaman bahasa semata, tetapi lebih banyak karakteristik dari proses dan struktur kebudayaan.
2. Hubungan kekuasaan bersifat diskursif (berwacana), artinya bahwa fokus wacana sama dengan fokus kekuasaan dibahasakan. Analisis Wacana Kritis akan menelusuri sejauh mana penulis cerita akan

---

<sup>17</sup> Yoce Aliah Darma, *Op.Cit*, hlm. 57

bermain lewat karyanya. Segala aspek budaya bebas ditelaah oleh berbagai macam aliran atau disiplin ilmu yang berbeda.

3. Wacana berwujud sebagai masyarakat dan budaya, dalam arti wacana tidak sekadar refleksi hubungan-hubungan sosial, tetapi juga merupakan bagian dari relasi itu dan menyelami reproduksi melalui hubungan dialektis.
4. Wacana itu berideologi. Ideologi sebagai representasi dan konstruksi masyarakat, yang di dalamnya pasti ada dominasi dan eksploitasi seringkali diproduksi lewat wacana. Tugas Analisis Wacana Kritis, antara lain mengidentifikasi ideologi tersebut.
5. Wacana bersifat historis. Analisis Wacana Kritis seharusnya mengkaji wacana dalam konteks historisnya dengan melihat ketersambungan dengan wacana sebelumnya. Biasanya teks dibandingkan dengan teks sejenisnya yang lebih dahulu muncul.
6. Analisis Wacana Kritis perlu menggunakan pendekatan sosiokognitif untuk menjelaskan bagaimana hubungan-hubungan teks dan masyarakat dijalani dalam proses produksi dan pemahaman.
7. Analisis Wacana Kritis bersifat interpretatif dan eksplanatif serta menggunakan metodologi yang sistematis untuk menghubungkan teks dan konteksnya.
8. Analisis Wacana Kritis adalah sebuah paradigma saintifik yang memiliki komitmen sosial yang terus-menerus berusaha larut dan mengubah apa yang sedang terjadi dalam sebuah konteks. Analisis



Wacana Kritis akan berusaha agar ada perubahan dalam sikap, apresiasi, dan interpretasi pembaca terhadap teks yang dibacanya.

### **2.1.2.1 Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough**

Penelitian ini memfokuskan pada Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough. Analisis Norman Fairclough didasarkan pada sebuah pertanyaan besar yaitu bagaimana menghubungkan teks yang mikro dengan konteks masyarakat yang makro. Fairclough berusaha membangun suatu model analisis wacana yang mempunyai kontribusi dalam analisis sosial dan budaya, sehingga ia mengombinasikan tradisi analisis tekstual yang selalu melihat dalam ruang tertutup dengan konteks masyarakat yang lebih luas. Titik perhatian Fairclough adalah melihat bagaimana pemakai bahasa membawa nilai ideologi tertentu.<sup>18</sup>

Norman Fairclough membangun suatu model yang mengintegrasikan secara bersama-sama analisis wacana yang didasarkan pada linguistik dan pemikiran sosial dan politik, dan secara umum diintegrasikan pada perubahan sosial. Oleh karena itu, model analisis ini sering disebut sebagai model perubahan sosial (*social change*). Fairclough menggunakan wacana menunjuk pada pemakaian bahasa sebagai praktik sosial lebih daripada aktivitas individu atau untuk merefleksikan sesuatu, yang mengandung dua implikasi. Implikasi yang pertama yaitu, wacana adalah bentuk dari tindakan, seseorang menggunakan bahasa sebagai suatu tindakan pada dunia

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 89

dan khususnya sebagai bentuk representasi ketika melihat dunia atau realitas. Implikasi yang kedua yaitu, model mengimplikasikan adanya hubungan timbal balik antara wacana dan struktur sosial.<sup>19</sup>

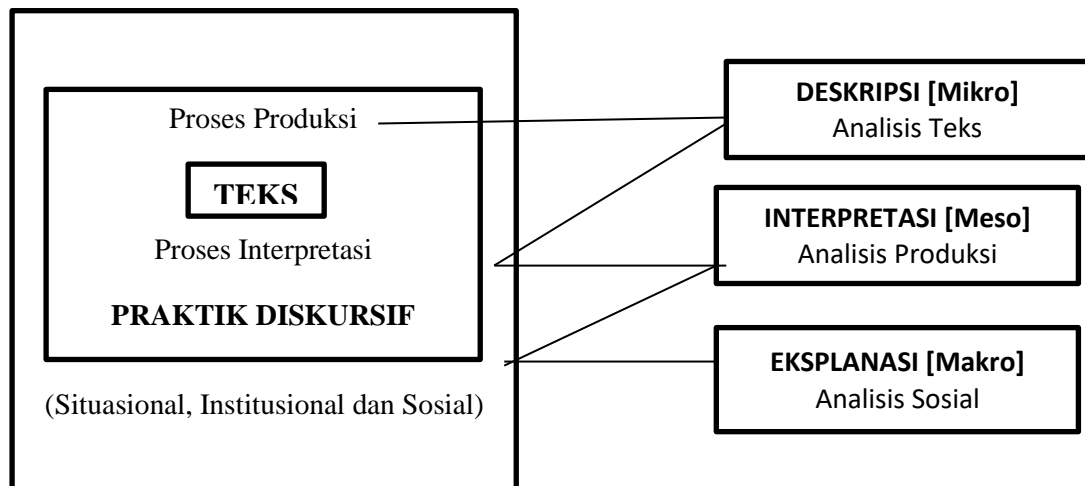
Menurut Fairclough, Analisis Wacana Kritis harus memperhatikan tiga dimensinya: teks, praktik diskursif, dan praksis sosial. *Pertama*, teks yaitu semua yang mengacu ke wicara, tulisan, grafik, dan kombinasinya atau semua bentuk linguistik teks (khasanah kata, gramatika, sintaksis, struktur metafora, retorika). *Kedua*, praktik diskursif (*discourse practice*) yaitu semua bentuk produksi dan konsumsi teks. Dalam dimensi ini ada proses yang menghubungkan produksi dengan konsumsi teks atau sudah ada interpretasi. Fokusnya diarahkan pada cara pemegang teks mengambil wacana dan *genre* yang ada dengan memerhatikan bagaimana hubungan kekuasaan dimainkan. *Ketiga*, yaitu praksis sosial (*sociocultural practice*) yang biasanya tertanam dalam tujuan, jaringan dan praksis budaya sosial yang luas. Dalam dimensi ini, sudah mulai masuk pemahaman intertekstual, peristiwa sosial dimana terlihat bahwa teks dibentuk oleh dan membentuk praksis sosial.<sup>20</sup>

Model tiga dimensi Analisis Wacana Kritis digambarkan Fairclough seperti di bawah ini:

---

<sup>19</sup> Eriyanto, OpCit, hlm. 285-286

<sup>20</sup> Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis): Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 23



Penjelasan mengenai skema di atas:

a. Teks.

Dalam analisis teks, *pertama*, hal yang paling mendasar yang perlu dianalisis adalah penggunaan perbendaharaan kata yang terkait dengan makna tertentu, penggunaan istilah dan metafora karena akan mengacu ke makna atau tindakan tertentu. Perbendaharaan kata meliputi makna kata. Sementara itu penggunaan istilah digunakan untuk mempermudah inti kelompok pembaca mengidentifikasi diri dengan penulis dan menetapkan kepercayaan di dalam pendapatnya. Teks di sini dianalisis secara linguistik, dengan melihat kosakata, semantik, dan tata kalimat. Ia juga memasukkan koherensi dan kohesivitas bagaimana antarkata atau kalimat tersebut digabung sehingga membentuk sebuah pengertian bagaimana wacana itu bisa dipahami.

b. Analisis Praktif Diskursif (Dimensi Praktik Wacana)

Analisis ini akan melihat kekuatan pernyataan, sejauh mana pernyataan tersebut dapat mendorong tindakan atau kekuatan afirmatifnya. Dalam

dimensi ini akan dilihat koherensi teks-teks yang sudah masuk ke wilayah interpretasi. Pada tahap ini intertekstualitas teks sudah mendapat perhatian khusus. Dimensi ini merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Teks dibentuk lewat suatu praktik diskursus, yang akan menentukan bagaimana teks tersebut diproduksi.

c. *Sociocultural Practice* (Dimensi Praktik Sosiokultural)

Praksis sosial akan menggambarkan bagian aktivitas sosial dalam praksis. Suatu wacana selalu berkaitan dengan berbagai tingkatannya; dalam situasi langsung, dalam institusi atau organisasi yang lebih luas, pada tingkat masyarakat. Dimensi ini merupakan dimensi yang berhubungan dengan konteks di luar teks. *Sociocultural practice* ini tidak berhubungan langsung dengan produksi teks, tetapi ia menentukan bagaimana teks diproduksi dan dipahami. Fairclough membuat tiga level analisis pada *sociocultural practice*: level situasional, institusional, dan sosial.<sup>21</sup> Di bawah ini uraiannya:

1. Situasional

Konteks sosial, bagaimana teks itu diproduksi di antaranya memperhatikan aspek situasional ketika teks tersebut diproduksi. Teks dihasilkan dalam suatu kondisi atau suasana yang khas, unik, sehingga satu teks bisa jadi berbeda dengan teks yang lain. Kalau wacana dipahami sebagai suatu tindakan, maka tindakan itu

---

<sup>21</sup> Eriyanto, *Op.Cit*, hlm. 322

sesungguhnya adalah upaya untuk merespons situasi atau konteks sosial tertentu.

## 2. Institusional

Level institusional melihat bagaimana pengaruh institusi organisasi dalam praktik produksi wacana. Faktor institusi yang penting adalah institusi yang berhubungan dengan ekonomi media. Selain media, faktor institusi lain yang berpengaruh adalah politik.

## 3. Sosial

Fairclough menegaskan bahwa wacana yang muncul ditentukan oleh perubahan masyarakat. Dalam level sosial, budaya, masyarakat, misalnya, turut menentukan perkembangan dari wacana. Berbeda dengan aspek situasional yang lebih mengarah pada waktu atau suasana yang mikro (konteks peristiwa pada saat teks berita dibuat), aspek sosial lebih melihat pada aspek makro seperti sistem politik, sistem ekonomi, atau sistem budaya masyarakat secara keseluruhan. Sistem itu menentukan siapa yang memiliki kekuasaan, nilai-nilai apa yang dominan dalam masyarakat, dan bagaimana nilai dan kelompok yang berkuasa itu mempengaruhi dan menentukan media.

Sebelum menganalisis ketiga dimensi tersebut, perlu dilihat praktik diskursif dari komunitas pemakai bahasa yang disebut sebagai *order of discourse*, yang dapat diartikan sebagai hubungan di antara tipe yang berbeda, seperti tipe diskursif, ruang kelas, dan kerja, semuanya memberikan batas-batas bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi. Dalam

hal pemakaian bahasa yang berbeda-beda, pemakai bahasa seharusnya menyesuaikan dengan praktik diskursif di tempat di mana ia berada, tidak bebas memakai bahasa. Ketika menganalisis teks, perlu dilihat terlebih dahulu *order of discourse* dari teks tersebut. Hal ini akan membantu peneliti untuk memaknai teks, proses produksi dari teks, dan konteks sosial dari teks yang dihasilkan.<sup>22</sup>

Dari penjelesan mengenai Analisis Wacana Kritis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Analisis Wacana Kritis merupakan suatu kajian yang dapat digunakan untuk mengetahui makna suatu wacana baik yang berupa lisan maupun tulisan.

### 2.1.3 Hakikat Ideologi

Ideologi berasal dari bahasa Greek terdiri dari kata *idea* dan *logia*. *Idea* berasal dari kata *idein* yang berarti melihat. *Idea* dalam buku *The Advance Learner's Dictionary* berarti *a plan or schema formed in the mind* atau suatu rencana yang dibentuk atau dirumuskan di dalam pemikiran. *Idea* dalam Webster's New Colliegate Dictionary berarti *something existing in the mind as the result of the formulation of an opinion, a plan or the like*, atau sesuatu yang ada di dalam pikiran sebagai hasil perumusan sesuatu pemikiran atau rencana.

*Logis* berasal dari kata *logos* yang berarti *word* dimana kata ini berasal dari kata dari kata *legein* yang berarti *to speak* yang berarti berbicara. Selanjutnya kata *logia* berarti *science* (pengetahuan) atau *theory*. Jadi,

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 288

menurut arti kata, ideologi dapat diartikan sebagai pengucapan daripada yang terlihat atau pengutaraan apa yang terumus di dalam pikiran sebagai hasil dari pemikiran.<sup>23</sup>

Istilah “ideologi” pertama kali dilontarkan oleh seorang filsuf Perancis yang bernama Antoine Destutt de Tracy sewaktu Revolusi Perancis tengah menggelora. Antoine Destutt de Tracy memakai istilah ideologi untuk menyebut suatu studi tentang asal mula, hakekat, dan perkembangan ide-ide manusia, atau yang sudah umum dikenal sebagai “*Science Ideas*”.<sup>24</sup> Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis dengan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Ideologi merupakan sistem pemikiran yang abstrak, untuk itu perlu penjelasan dari berbagai pakar agar bisa memahaminya.

Menurut Raymond William penggunaan ideologi dibagi menjadi tiga bagian atau tiga ranah.<sup>25</sup> Pertama, sebuah sistem kepercayaan yang dimiliki oleh kelompok atau kelas tertentu. Kedua, sebuah sistem kepercayaan yang dibuat-ide palsu atau kesadaran palsu- yang bisa dilawankan dengan pengetahuan ilmiah. Dalam pengertian ini ideologi berarti seperangkat kategori yang dibuat dan kesadaran palsu dimana kelompok yang berkuasa atau dominan menggunakannya untuk mendominasi kelompok lain yang tidak dominan. Ketiga, proses umum produksi makna dan ide. Ideologi yang

---

<sup>23</sup> Sukarna, *Ideologi Suatu Studi Ilmu Politik* (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), hlm. 1

<sup>24</sup> Cheppy Hari Cahyono, *Ideologi Politik* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1986), hlm. 4

<sup>25</sup> Eriyanto, *Op.Cit*, hlm. 87

dimaksud adalah istilah yang digunakan untuk menggunakan produksi makna.

Van Dijk mendefinisikan ideologi sebagai:

*“the interface between the cognitive representations and processes underlying discourse and action, on the one hand, and the societal position and interests and social groups, on the other hand... As systems of principles that organize social cognitions, ideologies are assumed to control, through the minds of the members, the social reproduction of the group. Ideologies mentally represent the basic social characteristics of a group, such as their identity, tasks, goals, norms, values, position, and resources.”<sup>26</sup>*

Yang berarti bahwa ideologi sebagai antarmuka antara representasi kognitif dan proses yang mendasari wacana dan tindakan, di satu sisi, dan posisi sosial dan kepentingan dan kelompok-kelompok sosial, di sisi lain. Sebagai sistem prinsip-prinsip yang mengatur kognisi sosial, ideologi diasumsikan untuk mengontrol, melalui pikiran para anggota, reproduksi sosial kelompok. Ideologi secara mental mewakili karakteristik sosial dasar dari kelompok, seperti identitas, tugas, tujuan, norma, nilai-nilai, posisi, dan sumber daya.

Teun A. van Dijk mengatakan bahwa ideologi terutama dimaksudkan untuk mengatur masalah tindakan dan praktik individu atau anggota suatu kelompok. Ideologi membuat anggota dari suatu kelompok akan bertindak dalam situasi yang sama, dapat menghubungkan masalah mereka, dan memberikan kontribusi dalam membentuk solidaritas dan kohesi dalam kelompok. Dalam perspektif ini, ideologi mempunyai beberapa implikasi penting. Pertama, ideologi secara inheren bersifat sosial, tidak personal atau tidak individual; ia membutuhkan *share* di antara anggota kelompok,

---

<sup>26</sup> Jan Blommaert, *Discourse* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hal. 161-162.



organisasi, atau kolektivitas dengan orang lainnya. Kedua, ideologi meskipun bersifat sosial, ia digunakan secara internal di antara anggota kelompok atau komunitas. Oleh karena itu, ideologi tidak hanya menyediakan fungsi koordinatif dan kohesi tetapi juga membentuk identitas diri kelompok, membedakan dengan kelompok lain.<sup>27</sup>

Menurut Fairclough, ideologi merupakan makna yang melayani kekuasaan.<sup>28</sup> Lebih tepatnya, dia memahami ideologi sebagai pengkonstruksian makna yang memberikan kontribusi bagi pemroduksian, pereproduksian dan transformasi hubungan-hubungan dominasi.

Ideologi menjadi topik yang sangat kaya dengan investigasi dalam Analisis Wacana Kritis. Terdapat perbedaan yang paling mendasar tentang definisi dan pendekatan ideologi dalam Analisis Wacana Kritis; ada di satu sisi, ada penulis yang mendefinisikan ideologi sebagai seperangkat spesifik dari representasi simbolis - wacana, istilah, argumen, gambar, stereotip - melayani tujuan spesifik dan dioperasikan oleh kelompok spesifik atau seseorang yang dikenal justru dengan penggunaan mereka dari ideologi ideologi-ideologi yang mereka gunakan. Di sisi lain, ada penulis yang akan menentukan ideologi sebagai fenomena umum yang benar-benar mencirikan sistem sosial atau politik tertentu dan dioperasikan oleh setiap anggota atau seseorang yang terlibat dalam sistem itu.

Pada kategori pertama kita dapat menemukan istilah '-isme' yang terkenal, seperti sosialisme, liberalisme, fasisme, komunisme,

---

<sup>27</sup> Eriyanto, *Op.Cit*, hlm. 13

<sup>28</sup> Marianne W., *Op.Cit*, hlm. 139

libertarianisme, anarkisme, dan sebagainya. pada kategori kedua tampaknya agak sulit untuk digambarkan. Penulis akan menekankan bahwa ideologi berdiri untuk budaya, aspek ideasional dari sistem sosial dan politik tertentu, 'grand narasi' mencirikan keberadaannya, struktur, dan perkembangan sejarah. Hal ini merupakan citra ideologi yang sering dikaitkan dengan karya Antonio Gramsci (1971). Penulis dalam kategori kedua ini akan menekankan ideologi yang tidak dapat dikaitkan dengan salah satu aktor tertentu, tidak terletak di salah satu situs tertentu (seperti partai politik atau pemerintah), tapi yang menembus seluruh kain masyarakat atau komunitas dan menghasilkan normalisasi, kegiatan naturalisasi yang mempertahankan hubungan sosial dan struktur kekuasaan, dan pola kekuasaan yang memperkuat akal sehat tersebut. Penulis mengartikulasikan pandangan tersebut termasuk Pierre Bourdieu (1990), Louise Althusser (1971), Roland Barthes (1957), Raymond William (1973, 1977), dan Michel Foucault (1975). Sering kali, hanya satu "-isme" yang diterima: kapitalisme, dilihat sebagai sistem secara keseluruhan dimana masyarakat kontemporer berkembang dan kapitalisme adalah prototipe dari proses ideologis seperti: telah menjadi begitu alami dan normal sebagai kerangka acuan untuk pikiran dan perilaku yang tidak dianggap sebagai suatu sistem dengan atribut ideologis.<sup>29</sup>

Ideologi merupakan konsep sentral dalam Analisis Wacana Kritis. Analisis Wacana Kritis mempelajari tentang dominasi suatu ideologi serta ketidakadilan dijalankan dan dioperasikan melalui wacana. Fairclough

---

<sup>29</sup> Jan Blommaert, *Op.Cit*, hlm. 158-160.

mengemukakan bahwa Analisis Wacana Kritis melihat wacana sebagai bentuk dan praktik sosial. Menggambarkan wacana sebagai praktik sosial menyebabkan sebuah hubungan dialektis yang terjadi di antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi institusi, dan struktur sosial yang membentuknya. Sehingga, akhirnya praktik wacana menampilkan efek ideologi.<sup>30</sup>

Ketika menentukan ideologi dalam Analisis Wacana Kritis, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Pembacaan teks

Menurut Hall, ada tiga bentuk pembacaan atau hubungan antara penulis dan pembaca dan bagaimana pesan itu dibaca di antara keduanya. Pertama, posisi pembacaan dominan (*dominant-hegemonic position*). Posisi ini terjadi ketika penulis menggunakan kode-kode yang bisa diterima umum, sehingga pembaca akan menafsirkan dan membaca pesan atau tanda itu dengan pesan yang sudah diterima umum tersebut. Kedua, pembacaan yang dinegosiasikan (*negotiated code/position*). Dalam posisi kedua ini, tidak ada pembacaan dominan. Yang terjadi adalah kode apa yang disampaikan penulis ditafsirkan secara terus menerus di antara kedua belah pihak. Ketiga, pembacaan oposisi (*oppositional code/position*). Posisi pembacaan ini merupakan kebalikan dari posisi pertama. Dalam posisi ini, pembaca akan menandakan secara berbeda atau membaca secara bersebrangan dengan apa yang ingin disampaikan oleh khalayak.

---

<sup>30</sup> Yoce Aliah Darma, *Op.Cit*, hlm. 56

Pembacaan Teks	Ideologi	
	Pembuat Teks	Pembaca Teks
Dominan	+	+
Negosiasi	-	+
Oposisi	-	-

b. Interpelasi

Ideologi atau level suprastruktur dalam konsep Althusser adalah dialektika yang dikarakteristikan dengan kekuasaan yang tidak seimbang atau dominasi. Althusser lebih jauh mendefinisikan konsep ideologi sebagai praktik ketimbang ide atau gagasan. Althusser mengatakan ada dua dimensi hakiki negara: represif (*Repressif State Aparatus/ RSA*) dan ideologis (*Ideological State Aparatus/ ISA*). Salah satu hal penting dalam teori ideologi Althusser adalah konsepnya mengenai subjek dan ideologi. Ideologi dalam pengertian Althusser selalu memerlukan subjek, dan subjek memerlukan ideologi. Ideologi dalam pandangan Althusser bukan hanya membutuhkan subjek tapi juga menciptakan subjek. Konsep interpelasi adalah konsep yang penting dalam dunia komunikasi.

c. Hegemoni

Antonio Gramsci membangun suatu teori yang menekankan bagaimana penerimaan kelompok yang didominasi terhadap kehadiran kelompok dominan berlangsung dalam suatu proses yang damai, tanpa tindakan kekerasan. Konsep hegemoni dipopulerkan oleh ahli filsafat politik terkemuka Italia, Antonio Gramsci, yang berpendapat bahwa kekuatan dan dominasi kapitalis tidak hanya melalui dimensi material

dari sarana ekonomi dan relasi produksi, tetapi juga kekuatan (*force*) dan hegemoni.

Raymond William mengatakan bahwa hegemoni bekerja melalui dua saluran: ideologi dan budaya melalui nilai-nilai itu bekerja. Melalui hegemoni, ideologi kelompok dominan dapat disebarkan, nilai kepercayaan dapat ditularkan.

Dilihat dari pemikiran intelektual, suatu ideologi yang matang mempunyai empat dasar komponen berikut ini:<sup>31</sup>

- a. Suatu ideologi itu memiliki nilai (*value*). *Value* merupakan suatu subjek atau situasi yang dianggap sangat berharga dan mulia, merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan dan dicapai.
- b. Suatu ideologi mempunyai visi tentang politik yang ideal. Setiap ideologi diilhami oleh visi yang menggambarkan bagaimana wujud realisasi dari suatu politik yang dikelola dengan cara terbaik. Gambaran wujud dan suatu paham di masa yang akan datang merupakan visi yang harus ada dalam setiap ideologi.
- c. Suatu ideologi itu harus mengandung suatu konsepsi tentang sifat manusia (*human nature*). Suatu ideologi berisi tentang keyakinan mengenai apa yang akan dapat diperbuat oleh manusia, masyarakat dan pemerintah.
- d. Suatu ideologi mempunyai *strategy of action*. Suatu ideologi harus bisa dioperasionalkan.

---

<sup>31</sup> Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Perkasa, 2003) hlm. 83

Ideologi memiliki beberapa indikator. Di bawah ini terdapat beberapa indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini:

a. Hegemoni

Istilah hegemoni berasal dari bahasa Yunani Kuno, ‘*eugemonia*’. Konsep hegemoni banyak digunakan oleh sosiolog untuk menjelaskan fenomena terjadinya usaha untuk mempertahankan kekuasaan oleh pihak penguasa. Penguasa disini memiliki arti yang luas, tidak hanya terbatas pada penguasa negara (pemerintah) saja. Hegemoni dapat didefinisikan sebagai dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang disampaikan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi dapat diterima sebagai sesuatu yang wajar (*common sense*).<sup>32</sup>

Hegemoni adalah proses pembentukan memori kolektif, yaitu pemikiran masyarakat akan suatu hal. Dari bentuk prosesnya sendiri, terdapat dua macam jenis hegemoni. Hegemoni jenis pertama adalah hegemoni yang disebut dengan “*everyday resistance*”, dimana pihak yang berkuasa akan mencoba membendung laju pemikiran lain selain konsep yang mereka punya. Sedangkan hegemoni jenis kedua adalah hegemoni pada sistem masyarakat yang terbuka (tanpa satu produsen), dimana pemikiran-pemikiran yang timbul dalam masyarakat mendapat ruang yang bebas untuk diapresiasi, serta terbuka untuk menjadi bahan diskusi masyarakat umum.

---

<sup>32</sup> <https://sosiologibudaya.wordpress.com/2012/04/03/hegemoni-kekuasaan-negara/> (diakses pada Jumat, 30 Desember 2016, 21.20)

Hegemoni cenderung bekerja dengan cara mencari dukungan yang legitimas dan legal dari kelompok mayoritas yang terdominasi melalui proses-proses yang “demokratis”.<sup>33</sup> Wacana yang bersifat hegemonik mampu mengontrol, mengarahkan, dan meminta seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang diinginkan.

b. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.<sup>34</sup> Menurut Gary A Yukl kekuasaan adalah potensi agen untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain (*target person*). Menurut Max Weber kekuasaan (*power*) adalah kesempatan yang ada pada seseorang atau sejumlah orang untuk melaksanakan kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu.<sup>35</sup>

Kekuasaan adalah sesuatu yang bersifat universal, yang akan selalu terdapat di mana pun juga manusia berada.<sup>36</sup> Kekuasaan tidak dapat ditegakkan tanpa kekuatan yang menunjangnya. Kekuatan penunjang ini hanya dapat diberikan oleh solidaritas dan kelompok yang mendukungnya. Tanpa suatu kekuatan yang selalu dalam

---

<sup>33</sup> Yoce Aliah Darma, *Op.Cit*, hlm. 107

<sup>34</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1977), hal. 35

<sup>35</sup> [Repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26164/3/Chapter%20II.pdf](https://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26164/3/Chapter%20II.pdf) (diakses pada Senin, 2 Januari 2017 20.21)

<sup>36</sup> A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1992), hal. 135

keadaan siap siaga, dan bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kepentingan bersama, maka kekuasaan penguasa tidak akan dapat ditegakkan.<sup>37</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain sesuai dengan kehendak atau keinginan pemegang kekuasaan.

c. Politik

Politik ialah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Yang dimaksud dengan pemerintah ialah sebuah lembaga yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara. Pembuatan peraturan, penerapan peraturan, dan penegakkan peraturan (keputusan politik). Salah satu ciri khas pemerintah ialah kewenangannya membuat dan melaksanakan kebijakan umum. Dalam hal ini pemerintah merupakan mekanisme penetapan aturan-aturan berperilaku bagi anggota masyarakat yang semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan masyarakat-negara.<sup>38</sup>

Secara garis besar, politik berhubungan dengan gejala kekuasaan, kewenangan dan pengaturan, ketaatan dan ketertiban. Jika kita sederhanakan lagi, antara kekuasaan (*power*) dengan pengaruh (*influence*) adalah suatu keseimbangan atau konsekuensi logis. Di antara kewenangan dan pengaturan juga demikian. Sedangkan,

---

<sup>37</sup> Ibid, hal. 137

<sup>38</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Percetakan PT Gramedia, 1992), hlm. 10-11



ketaatan atau ketertiban adalah akibat dan tujuan. Jadi, politik atau hal-hal yang berkaitan dengan politik berkaitan dengan tiga hal utama: kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*), dan ketaatan atau ketertiban (*order*).<sup>39</sup>

Sejak awal hingga perkembangan yang terakhir ada sekurang-kurangnya lima pandangan mengenai politik.<sup>40</sup> Pertama, politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketiga, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelima, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan kata lain, teori politik adalah bahasan dan renungan atas a) tujuan dari kegiatan politik, b) cara-cara mencapai tujuan itu, c) kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu dan d) kewajiban-kewajiban (*obligations*) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup: masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan,

---

<sup>39</sup> Abu Bakar Ebyhara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 39

<sup>40</sup> Ramlan Surbakti, *Op.Cit*, hlm. 1

hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan sebagainya.<sup>41</sup>

Politik sangat erat kaitannya dengan ideologi, sehingga dikenal sebuah istilah “ideologi politik”. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide-ide atau norma-norma, kepercayaan atau keyakinan, suatu *Weltanschauung*, yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana ia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapinya dan yang menentukan perilaku politiknya.<sup>42</sup> Dasar dari ideologi politik adalah keyakinan akan adanya suatu pola tata tertib sosial politik yang ideal. Ideologi politik mencakup pembahasan dan diagnosa, serta saran-saran (*prescription*) mengenai bagaimana mencapai tujuan ideal itu.<sup>43</sup>

#### d. Ekonomi

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikos* dan *nomos*. *Oikos* memiliki arti rumah tangga dan *nomos* memiliki arti ilmu. Dari gabungan kata tersebut, terbentuklah kata ekonomi, yang dapat diartikan sebagai sebuah kata yang menunjukkan sebuah kondisi yang merujuk pada pengertian tentang aktivitas manusia. Khususnya pada usaha untuk bisa mengolah sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya, sebagai alat pemenuh kebutuhan hidup.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 43

<sup>42</sup> Miriam Budiardjo, *Ibid*, hlm. 45

<sup>43</sup> Miriam Budiardjo, *LocCit*

<sup>44</sup> <http://thedarkancokullujaba.blogspot.co.id/2012/09/pengertian-ekonomi.html> diakses pada 17 Maret 2017, 14:01

Secara umum, istilah ekonomi dapat diartikan sebagai sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Ekonomi merupakan suatu bidang tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi.<sup>45</sup>

Menurut Hermawan Kartajaya, ekonomi adalah *platform* dimana sektor industri melekat di atasnya. Menurut Paul A. Samuelson, ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sedangkan menurut Abraham Maslow, ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan dasar kehidupan manusia melalui proses yang terdiri atas segala sumber ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien.<sup>46</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan pemertahanan hidup dan kemajuan-kemajuan lingkungan sekitarnya.

---

<sup>45</sup><https://citrawulani.wordpress.com/mata-pelajaran/ekonomi/pengertian-ekonomi-secara-umum/> diakses pada 17 Maret 2017, 01:15

<sup>46</sup><http://www.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-ekonomi-menurut-para-ahli.html> diakses pada 17 Maret 2017, 14:15

e. Sosial Budaya

Secara umum, sosial biasanya dilawan artikan dengan perkataan ‘*profit*’ atau laba.<sup>47</sup> Dalam pengertian lain, kata sosial berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan kemanusiaan. Sementara itu arti paling luas dari kata sosial adalah masyarakat orang banyak, dan khalayak.<sup>48</sup>

Menurut Koentjaraningrat, secara harfiah budaya atau kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang dapat diperoleh melalui proses belajar.<sup>49</sup> Sementara itu Raymon William berpendapat bahwa kata “*culture*” yang berarti budaya adalah satu atau dua dari tiga kata yang paling banyak dikatakan orang. Lebih lanjut lagi William mengatakan bahwa kata ini dipergunakan untuk melukiskan beberapa konsep penting dalam disiplin ilmu yang berbeda dengan kepentingan yang berbeda pula sehingga memberikan arti yang berbeda-beda.<sup>50</sup>

Hubungan antara ideologi dan kebudayaan mempunyai suatu efek kultural yang terkait dengan institusi-institusi tertentu. Ideologi beroperasi secara tersebar dan menghadirkan dirinya dalam ‘ideologi-sebagai-kebudayaan’. Artinya, ideologi berada dalam kompleksitas hubungan-hubungan antara berbagai bentuk kebudayaan (pengetahuan, citraan, dan lain-lain) dan institusi-institusinya, serta wacana-wacana dan aparatus-aparatusnya.

---

<sup>47</sup> Yanuarius Koli Bau, *Pengantar Sistem Sosial Budaya*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama Yogyakarta, 2009) hlm. 14

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 15

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 16

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 17

Dari teori-teori yang telah dikemukakan di atas, maka ideologi dapat diartikan sebagai ide-ide atau gagasan-gagasan yang terletak di benak anggota kelompok dominan yang mengatur kelompok lain untuk berpikir, berbicara, dan bertindak melalui hegemoni. Ideologi juga memiliki beberapa aspek ideologi, yaitu hegemoni, kekuasaan, politik, ekonomi, dan sosial budaya.

#### 2.1.4 Hakikat Pidato

Menurut Hadinegoro, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak, atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak, dengan maksud agar para pendengar mengetahui, memahami, menerima serta diharapkan bersedia melaksanakan segala sesuatu yang disampaikan kepada mereka.<sup>51</sup>

Pidato atau *Public Speaking* adalah ucapan yang tersusun dengan baik dan ditujukan kepada orang banyak. Kepandaian berpidato sering disebut dengan retorika atau oratori, sedang orangnya disebut dengan rhetor atau orator. Berpidato merupakan seni percakapan atau seni berkata-kata yang didukung dengan penggunaan bahasa yang baik dan didukung dengan wawasan keilmuan yang luas dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>52</sup>

Pidato merupakan kegiatan berbicara di depan orang banyak untuk menyampaikan suatu tujuan atau gagasan, pikiran atau informasi dari pembicara kepada orang lain (*audience*) dengan cara lisan. Melakukan

<sup>51</sup> Yusuf Zainal Abidin, *Pengantar Retorika* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 145

<sup>52</sup> Rachman Hakim, *Kiat Jitu Mahir Pidato* (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan, 2010), hlm. 8

pidato berhubungan dengan retorika (*rhetorica*), yaitu seni menggunakan bahasa dengan efektif yang diartikan juga sebagai *the art of persuasion*, yaitu sebagai seni membujuk atau mempengaruhi *audience*.<sup>53</sup>

Pidato memiliki peranan yang sangat penting dalam hal penyajian lisan kepada suatu kelompok massa, baik pada saat ini maupun pada saat-saat yang akan datang. Mereka yang mahir berbicara dengan mudah dapat menguasai massa, dan berhasil memasarkan gagasan mereka sehingga dapat diterima oleh orang-orang lain.<sup>54</sup> Seorang tokoh dalam masyarakat atau seorang pemimpin harus memiliki keahlian untuk menyajikan pikiran dan gagasannya secara oral. Seorang tokoh atau pemimpin yang tidak bisa berbicara di depan umum akan menjauhkan dirinya sendiri dari masyarakat yang dipimpinnya; ia tidak sanggup mengadakan komunikasi langsung dengan anggota-anggota masyarakatnya.

Berpidato memerlukan ekspresi gagasan dan penalaran dengan menggunakan bahasa lisan atau olah vokal yang didukung oleh aspek-aspek non-kebahasaan (ekspresi wajah, kontak pandang, gerak tangan). Pada sisi lain tujuan penyampaian gagasan secara lisan dalam bentuk berpidato antara lain (1) menyampaikan informasi (informatif); (2) meyakinkan dan memengaruhi sikap pendengar (persuasif); (3) menghibur pendengar (rekreatif).<sup>55</sup> Dalam pidato atau penyajian lisan, dikenal empat macam metode penyajian lisan:

---

<sup>53</sup> Andri Yanuarita, *Langkah Cerdas Mempersiapkan Pidato dan MC* (Sukoharjo: Teranova Books, 2012), hlm. 19

<sup>54</sup> Gorys Keraf, *Komposisi* (Flores: Penerbit Nusa Indah, 1971), hlm. 358

<sup>55</sup> Yusuf Zainal Abidin, *Op.Cit*, hlm. 154

a. Metode Impromptu (serta-merta)

Metode impromptu adalah metode penyajian berdasarkan kebutuhan sesaat. Tidak ada persiapan sama sekali, pembicara serta-merta berbicara berdasarkan pengetahuannya dan kemahirannya.

b. Metode Menghafal

Metode menghafal merupakan kebalikan dari metode impromptu. Penyajian lisan atau pidato yang dibawakan dengan metode ini bukan saja direncanakan, tetapi ditulis secara lengkap kemudian dihafal kata demi kata.

c. Metode Ekstemporan (tanpa persiapan naskah)

Metode ini merupakan metode yang sangat dianjurkan dibandingkan dengan metode-metode pidato lainnya. Dalam metode ini uraian yang akan disampaikan sebelumnya akan direncanakan dengan cermat dan akan dibuat catatan-catatan penting. Metode ini lebih banyak memberikan fleksibilitas dan variasi dalam memilih diksi penyampaian. Begitu pula pembicara dapat mengubah nada pembicaraannya sesuai dengan reaksi-reaksi yang timbul pada para hadirin ketika pidato itu disampaikan.

d. Metode Naskah

Metode ini biasanya dipakai dalam pidato resmi, seperti pidato kenegaraan atau pidato-pidato radio. Metode naskah masih bersifat kaku, sebab bila tidak dilatih secara cukup, maka pembicara seolah-olah memberikan suatu tirai antara dirinya dengan pendengar. Hal itu disebabkan karena mata pembicara akan terfokus pada naskah

pidatonya, sehingga ia tidak bebas memandang pendengarnya. Metode ini adalah metode yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada saat menyampaikan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT RI ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di depan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jakarta 14 Agustus 2015 dan Jakarta, 16 Agustus 2016.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pidato merupakan sebuah penyampaian wacana lisan di depan khalayak ramai dengan maksud atau tujuan tertentu dan dengan teknik-teknik tertentu.

## **2.2 Kerangka Berpikir**

Berdasarkan uraian-uraian teori yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan kerangka berpikir sebagai berikut:

Idelogi yang terdapat dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo akan dikaji berdasarkan tinjauan Analisis Wacana Kritis . Dalam Analisis Wacana Kritis terkandung nilai ideologi yang dapat diwujudkan dalam bentuk hegemoni, kekuasaan, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian teks pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tersebut akan dianalisis dengan Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough. Terdapat tiga dimensi dalam Analisis Wacana Kritis model Fairclough, yaitu: (1) dimensi teks, (2) dimensi praktik wacana, dan (3) dimensi praktik sosiotruktural.

Dalam Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough, analisis tidak hanya dilihat dari teksnya saja, tetapi pembentukan teks pun menjadi



salah satu bagian yang akan dikaji. Dalam hal ini, terdapat peran penting dari seseorang yang membuat teks pidato tersebut. Hal itu kemudian mempengaruhi atau melatarbelakangi dibuatnya teks tersebut yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sehingga, kalimat-kalimat yang dituangkan dalam teks pidato tersebut memiliki konteks sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi atau keadaan-keadaan yang ada sebelumnya. Selain itu, Norman Fairclough pun mencoba menghubungkan antara analisis teks pada level mikro dengan konteks sosial yang lebih besar, yaitu praktik sosiokultural. Dalam praktik sosiokultural, dapat dilihat perwujudan-perwujudan atau keberhasilan-keberhasilan atas kalimat-kalimat yang mengandung ideologi dari teks pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo.

### **2.3 Penelitian Relevan**

Setelah melakukan pemindaian di UPT Perpustakaan UNJ dan di internet, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian ini. Namun, terdapat penelitian yang relevan dengan penelitian ini dengan objek yang berbeda. Penelitian tersebut dilakukan oleh Besse Nurmala Sari, dengan judul “REPRESENTASI IDEOLOGI DALAM TEKS PIDATO SOEKARNO: TINJAUAN ANALISIS WACANA KRITIS ” tahun 2016.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bagian ini akan diuraikan tentang tujuan penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, fokus penelitian, objek penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan kriteria analisis.

#### **3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk ideologi dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2015 dan 2016.

#### **3.2 Tempat Waktu dan Penelitian**

Penelitian ini tidak terikat pada tempat tertentu karena bersifat penelitian kepustakaan. Sementara itu, waktu penelitian berlangsung pada Februari sampai Juni 2017.

#### **3.3 Metodologi Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi kualitatif, yaitu suatu metode yang biasa

digunakan untuk memahami pesan simbolik dari suatu wacana atau teks. Dalam penelitian ini ialah teks pidato.

Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan kritis, yakni pendekatan yang memusatkan kepada pembongkaran aspek-aspek yang tersembunyi di balik sebuah kenyataan yang tampak guna dilakukan kritik dan perubahan terhadap struktur sosial.

Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif dengan pendekatan kritis, karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, melainkan memahami pesan simbol berupa ideologi yang terkandung dalam teks pidato kenegaraan presiden Joko Widodo.

### **3.4 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah kandungan ideologi berdasarkan dimensi teks, dimensi praktik wacana dan dimensi praktik sosiokultural berdasarkan tinjauan Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough.

### **3.5 Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Teks Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada setiap Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada tahun 2015 dan tahun 2016.

### 3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini adalah menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Instrumen Penelitian

No.	Data	Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
1.												
2.												
3.												

### 3.7 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Membaca teks pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo untuk mengetahui keseluruhan teks di dalamnya.
2. Memilih kosakata dan bentuk gramatikal dari kalimat-kalimat yang mengandung ideologi pada teks pidato tersebut.
3. Menentukan indikator ideologi yang terkandung dalam kalimat tersebut.

### 3.8 Analisis Data

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan tiga tahap, yaitu tahap deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi.

1. Pada tahap deskripsi, dilakukan analisis pada kosakata dan bentuk gramatikal yang diidentifikasi berdasarkan teori yang telah dikemukakan pada Bab II.
2. Pada tahap interpretasi, dilakukan pendalaman terhadap sosok Joko Widodo selaku pemilik teks pidato dengan membaca buku-buku yang memuat tentang biografi Joko Widodo.
3. Pada eksplanasi, dilakukan pencarian atau pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan Presiden Joko Widodo.

### 3.9 Kriteria Analisis

Kriteria analisis ini diuraikan berdasarkan teori-teori pada bab II tentang ideologi. Ideologi merupakan sistem kepercayaan masyarakat dalam wujud budaya, hukum, dan ekonomi yang dipertahankan, dibenarkan, dan digunakan untuk mencapai kekuasaan. Hal ini menjadikan ideologi sangat berpengaruh dalam pengendalian arus informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Ideologi dipengaruhi oleh konteks situasi dan dapat berubah sesuai dengan kepentingan dan kekuasaan. Ideologi pada sebuah teks wacana yang diteliti dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis mendasarkan analisisnya kepada tiga dimensi yakni (1) dimensi teks, (2) dimensi praktik wacana, dan (3) dimensi praktik sosiokultural.

## 1. Dimensi Teks

Pada tataran dimensi teks, melihat bentuk teks secara umum, kosakata dan bentuk-bentuk gramatikal yang terdapat pada teks dapat merujuk kepada suatu realita ataupun ide yang dipandang mengandung ideologi. Analisis akan dilakukan pada bentuk kosakata dan bentuk gramatikal yang mengandung 4 indikator ideologi yang terdiri dari: (a) hegemoni, (b) kekuasaan, (c) politik, dan (d) sosial budaya.

### a. Hegemoni

Sebuah pernyataan dalam teks dapat dinyatakan mengandung ideologi hegemoni apabila terdapat kosakata atau bentuk gramatikal yang menyatakan pengaruh kepemimpinan, dominasi suatu pihak atas pihak lain. Contoh:

*Sehingga tak dapatlah dihindarkan, bahwa antara tentara serikat dengan rakyat kita pun timbul **persengketaan**.*

#### **Analisis:**

Kosakata “persengketaan” pada kalimat di atas memiliki makna yaitu sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan. Dalam konteks yang dimaksudkan pertengkaran mengacu pada balatentara serikat dan bangsa Indonesia. Bala tentara Serikat bermaksud menguasai wilayah di Indonesia dengan cara paksa. Sehingga kalimat tersebut membawa ideologi hegemoni.

b. Kekuasaan

Sebuah pernyataan dalam teks dapat dinyatakan mengandung ideologi kekuasaan apabila terdapat kosakata atau bentuk gramatikal yang menyatakan suatu kemampuan orang lain atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik. Contoh:

*Di pulau-pulau di luar Jawa dan Sumatra, dimana rakyat kedudukannya terpecah-pecah, balatentara Belanda yang menamakan dirinya NICA dapat meluaskan **kedudukannya serta kekuasaannya**.*

Analisis:

Kosakata “kedudukannya serta kekuasaannya” pada kalimat di atas dalam konteks yang dimaksudkan bahwa kedudukan dan kekuasaan Belanda pada saat Indonesia dijajah dapat memperluas kekuasaan dan kedudukannya di tanah Indonesia. Sehingga kalimat tersebut membawa ideologi hegemoni dan kekuasaan.

c. Politik

Sebuah pernyataan dalam teks dapat dinyatakan mengandung ideologi politik apabila terdapat kosakata atau bentuk gramatikal yang menyatakan urusan, tindakan, kebijakan, siasat mengenai pemerintahan negara. Contoh:

*Sebab hanya dengan pemuasan aspirasi nasional kita di sini dapat datang stabilitet politik, dan **stabilitet politik** itu bermanfaat kepada Indonesia, kepada Belanda, kepada dunia.*

**Analisis:**

Kosakata “*stabilitet* politik” pada kalimat di atas dalam bahasa Indonesia memiliki makna politik yang stabil. segala hal urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain Dalam hal ini dengan adanya aspirasi nasional politik di Indonesia akan stabil. Sehingga kalimat tersebut membawa ideologi politik.

## d. Ekonomi

Sebuah pernyataan dalam teks dapat dinyatakan mengandung ideologi ekonomi apabila terdapat kosakata atau bentuk gramatikal yang menyatakan suatu hal yang berkaitan dengan gagasan mengenai ekonomi. Contoh:

*Selain itu, saat ini Indonesia juga mempunyai jumlah kelas menengah yang signifikan dan akan terus bertambah seiring dengan bonus demografi yang sedang dan akan kita nikmati.*

**Analisis:**

Bentuk gramatikal “kelas menengah” yang terdapat dalam kalimat di atas menunjukkan suatu strata sosial yang berhubungan dengan perekonomian. Sehingga ideologi ekonomi dapat ditemukan dalam kalimat tersebut.

## e. Sosial Budaya

Sebuah pernyataan dalam teks dapat dinyatakan mengandung ideologi sosial budaya apabila terdapat kosakata atau bentuk gramatikal yang menyatakan sesuatu hal berdasarkan pemikiran yang berkaitan kehidupan bermasyarakat. Contoh:



*Pemerintah akan melindungi **kebudayaan nasional**, dan akan membantu berkembangnya **kebudayaan nasional**, tetapi engkau pemuda-pemudi pun harus aktif itu menentang imperialisme kebudayaan, dan melindungi serta memperkembangkan kebudayaan nasional!*

**Analisis:**

Kosakata “kebudayaan nasional” pada contoh di atas memiliki makna kebudayaan yang berasal dari bangsa Indonesia. kebudayaan sendiri memiliki arti hasil kegiatan dan ciptaan batin akan budi manusia seperti kesenian, kepercayaan, dan adat istiadat. Dalam konteks yang dimaksudkan adalah keinginan Soekarno sebagai pemimpin menginginkan bangsanya membantu perkembangan kebudayaan nasional guna kemajuan pembangunan bangsa. Sehingga kalimat tersebut membawa ideologi sosial budaya.

2. Dimensi Praktis Wacana

Ideologi pada tahap ini dianalisis dengan tahap produksi teks. Pada tahap produksi teks, penelitian ini melihat dari pembuat teks. Kriteria analisis dari intepetasi teks berupa penafsiran data dimensi teks yang memuat ideologi, seperti hegemoni, kekuasaan, ideologi politik, ekonomi, dan sosial budaya.

3. Dimensi Praktik Sosiokultural

Dimensi praktik sosiokultural dapat ditelusuri dengan konteks situasi, instistusi, dan sosial yang berkaitan dengan proses konsumsi dan distribusi teks. Situasi yang berhubungan dengan latar belakang

ditulisnya teks tersebut dihubungkan dengan dimensi teks dan dimensi praktik wacana sekaligus. Kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Konstruksi ideologi dalam teks pidato Joko Widodo pada HUT RI selama masa jabatannya.
- b. Pembagian kekuasaan dalam teks pidato tersebut.
- c. Hubungan ideologi yang dibawa oleh penulis di dalam teks dengan situasi pada masa itu.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dikemukakan deskripsi data, analisis data, rangkuman data, interpretasi data, pembahasan, dan keterbatasan penelitian.

#### **4.1 Deskripsi Data**

Data pada penelitian ini berupa ideologi pada tataran dimensi teks, dimensi praktik wacana, dan dimensi praktik sosiokultural. Data diperoleh setelah dilakukan analisis pada dua pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Agustus 2015 dan 16 Agustus 2016, yang masing-masing akan dilihat dari kalimat yang terdapat dari setiap paragraf. Data keseluruhan yang didapat dari dua teks pidato berjumlah 128 paragraf dan 317 kalimat, yang berasal dari pidato kenegaraan tahun 2015 berjumlah 66 paragraf dan 153 kalimat, sementara itu pada pidato kenegaraan 2016 berjumlah 62 paragraf dan 164 kalimat.

Data ideologi disajikan dalam bentuk tabel. Tabel tersebut memuat frekuensi kemunculan kosakata dan bentuk gramatikal pembawa ideologi pada masing-masing teks pidato yang nantinya akan dilihat keterkaitannya dengan indikator ideologi yang terdiri dari hegemoni, kekuasaan, politik, ekonomi dan sosial budaya.

Tabel 4.1 Deskripsi Data Ideologi pada Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo

No.	Teks Pidato	Bentuk		Indikator Ideologi				
		Kosakata	Gramatikal	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya
1	Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, di depan Sidang Bersama DPR RI Dan DPD RI, Jakarta, 14 Agustus 2015	39	45	6	17	16	27	18
2	Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke-71 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DRI RI dan DPD RI, Jakarta, 16 Agustus 2016	54	62	2	20	27	43	24
<b>Jumlah</b>		93	107	8	37	43	70	42
<b>Presentase (%)</b>		46,5	53,5	4	18,5	21,5	35	21

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat, bahwa pada teks pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo terkandung ideologi. Dapat diketahui pula pada tahap analisis teks, bahwa dari 200 kalimat pembawa ideologi, terdapat 8 kalimat yang mengandung ideologi hegemoni (4%), 37 kalimat yang mengandung ideologi kekuasaan (18,5%), 43 kalimat yang mengandung ideologi politik (21,5%), 70 kalimat yang mengandung ideologi ekonomi (35%), dan 42 kalimat yang mengandung ideologi sosial budaya (21%), baik

pada bentuk kosakata maupun bentuk gramatikal. Hasil analisis juga telah didukung dengan tahap dimensi praktik wacana dan praktik sosiokultural.

Data tersebut didapatkan setelah proses analisis terhadap kedua teks pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo yang didapatkan dari *website* milik Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Pada masing-masing teks pidato ditemukan ideologi yang berbeda jenis dan jumlahnya. Perbedaan jenis dan jumlah data dikarenakan faktor tema yang diangkat dari pidato. Pemaparan mengenai deskripsi data masing-masing teks pidato akan dijelaskan lebih lanjut pada deskripsi data berikut:

#### **4.1.1 Deskripsi Data “Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka HUT Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Di Depan Sidang Bersama DPR RI Dan DPD RI, Jakarta, 14 Agustus 2015”**

Data kemunculan ideologi pada tataran kosakata dan gramatikal dalam teks pidato yang berjudul “Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka HUT Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Di Depan Sidang Bersama DPR RI Dan DPD RI, Jakarta, 14 Agustus 2015” menunjukkan terdapat 153 kalimat. Dari 153 kalimat tersebut, terdapat 84 kalimat yang mengandung ideologi. Dari 84 kalimat yang mengandung ideologi tersebut terdapat 1 kalimat yang mengandung lebih dari satu ideologi. Dari keseluruhan data tersebut, dapat ditemukan terdapat 39 bentuk kosakata dan 45 bentuk gramatikal yang membawa ideologi yang telah didukung dengan tahap praktik wacana dan praktik sosiokultural, yaitu

dengan indikator hegemoni sebanyak 6 data, kekuasaan sebanyak 17 data, politik sebanyak 16 data, ekonomi sebanyak 27 data, dan sosial budaya sebanyak 18 data dengan jumlah frekuensi kemunculan sebanyak 84 data.

#### **4.1.2 Deskripsi Data “Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke-71 Proklamasi Kemerdekaan RI di Depan Sidang Bersama DRI RI dan DPD RI, Jakarta, 16 Agustus 2016”.**

Data kemunculan ideologi pada tataran kosakata dan gramatikal dalam teks pidato “Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke-71 Proklamasi Kemerdekaan RI di Depan Sidang Bersama DRI RI dan DPD RI, Jakarta, 16 Agustus 2016” menunjukkan terdapat 165 kalimat. Dari 165 kalimat tersebut, terdapat 115 kalimat yang mengandung ideologi. Dari 115 kalimat, terdapat satu kalimat yang mengandung lebih dari satu ideologi. Dari keseluruhan data tersebut, terdapat 54 bentuk kosakata dan 62 bentuk gramatikal yang membawa ideologi yang telah didukung dengan tahap praktik wacana dan praktik sosiokultural, yaitu dengan indikator hegemoni sebanyak 2 data, kekuasaan sebanyak 20 data, politik sebanyak 27 data, ekonomi sebanyak 43 dan sosial budaya sebanyak 24 data dengan jumlah frekuensi kemunculan kosakata dan gramatikal sebanyak 116 data.

## **4.2 Analisis Data**

Pemaparan mengenai deskripsi data lebih lanjut akan disajikan melalui contoh kemunculan ideologi dengan menganalisis data yang dilakukan

melalui tiga tahap, yaitu dimensi teks, dimensi praktik wacana, dan dimensi praktik sosiokultural.

#### 4.2.1 Dimensi Teks

Pada tataran dimensi teks, analisis data dilihat dari kosakata atau gramatikal yang digunakan yang dapat merujuk kepada suatu realita ataupun ide yang dipandang mengandung ideologi. Dari keseluruhan data diperoleh bentuk kosakata yang mengandung ideologi sebanyak 138 data dan bentuk gramatikal sebanyak 141 data.

##### a. Kosakata

###### **Contoh 1:**

Tanpa *kesantunan politik*, tatakrama hukum dan ketatanegaraan, serta *kedisiplinan ekonomi*, kita akan kehilangan optimisme, dan lamban mengatasi persoalan-persoalan lain termasuk tantangan ekonomi yang saat ini sedang dihadapi bangsa Indonesia.

###### **Analisis:**

Dalam kalimat tersebut terdapat kosakata yang berhubungan dengan pemerintahan Indonesia, yaitu “kesantunan politik”. Hal itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut mengandung ideologi politik. Selain itu, terdapat pula kosakata yang berhubungan dengan ekonomi pun dapat ditemukan dalam kalimat tersebut, yaitu “kedisiplinan ekonomi”. Jadi, selain mengandung ideologi politik, kalimat tersebut juga mengandung ideologi ekonomi. Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo berpendapat bahwa kesantunan politik, tatakrama hukum dan

ketatanegaraan, serta kedisiplinan ekonomi merupakan hal-hal penting untuk mengatasi persoalan-persoalan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, salah satunya yaitu tantangan ekonomi.

**Contoh 2:**

Oleh sebab itu, untuk mengatasi seluruh *persoalan bangsa* dewasa ini, kita harus tetap utuh, bekerja bahu membahu, tidak boleh terpecah belah oleh pertentangan politik dan kepentingan jangka pendek.

**Analisis:**

Kosakata “persoalan bangsa” dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan. Dalam konteks ini, bentuk gramatikal “persoalan bangsa” dimaknai dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Permasalahan-permasalahan tersebut, menurut Presiden Joko Widodo, dapat diatasi dengan menjaga keutuhan bangsa, bekerja bahu membahu, dan tidak boleh terpecah belah oleh pertentangan politik dan kepentingan jangka pendek. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi politik.

**Contoh 3:**

Kemerdekaan yang kita raih adalah jembatan untuk *memakmurkan* rakyat, untuk menegakkan keadilan, untuk membuat seluruh rakyat Indonesia meraih kemajuan bersama.



**Analisis:**

Kosakata “memakmurkan” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu keadaan yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, memakmurkan dimaknai dengan suatu tindakan untuk membuat rakyat Indonesia berada dalam keadaan makmur, atau serba kecukupan. Sementara itu, kemajuan dimaknai dengan suatu keadaan dimana seluruh rakyat Indonesia menjadi lebih maju atau lebih berkembang. Oleh karena itu, kalimat tersebut mengandung ideologi sosial budaya.

**Contoh 4:**

Dengan *kerja nyata* bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang, dengan Kerja nyata bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa maju, menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berbudaya.

**Analisis:**

Kosakata “kerja nyata” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu siasat mengenai pemerintahan negara. Dalam konteks ini, “kerja nyata dimaknai dengan ketegasan terhadap kesinambungan pemerintah. Dalam kalimat tersebut Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dengan kerja nyata bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang, dengan Kerja nyata bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa maju, menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berbudaya. Sehingga dalam kalimat tersebut terdapat ideologi politik.

**b. Bentuk Gramatikal****Contoh 1:**

Dengan kemampuan yang ada, kita berikan bantuan dan pertolongan kepada warga yang tertimpa musibah.

**Analisis:**

Bentuk gramatikal “kita berikan bantuan” yang terdapat dalam kalimat tersebut mencerminkan unsur kekuasaan. Sebagai seorang presiden, tentu saja Jokowi memiliki kekuasaan atau kewenangan agar rakyatnya mengikuti apa yang dikatakannya. Dalam hal ini, Jokowi menghimbau rakyatnya untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada korban musibah. Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah memberikan bantuan dan pertolongan kepada warga yang tertimpa musibah, sesuai dengan kemampuan yang ada. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terdapat ideologi kekuasaan.

**Contoh 2:**

Kita *berikan penghormatan dan penghargaan* kepada para prajurit yang gugur akibat jatuhnya pesawat Hercules.

**Analisis:**

Bentuk gramatikal “berikan penghormatan dan penghargaan” mengandung arti perbuatan menghormati dan perbuatan menghargai. Kedua perbuatan tersebut merupakan perilaku yang menjadi budaya sosial di Indonesia. Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo mengajak untuk memberikan penghormatan dan penghargaan kepada para prajurit yang gugur akibat jatuhnya pesawat Hercules. Pada Selasa, 30 Juni

2015, sebuah pesawat Lockheed C-130 Hercules milik TNI AU terjatuh, dua menit setelah lepas landas dari Pangkalan Udara Soewondo di Padang Bulan, kota Medan, Sumatera Utara. Pesawat tersebut awalnya direncanakan untuk terbang ke Lanud Tanjung Pinang, setelah menyelesaikan penerbangan dari Lanud Dumai, Lanud Pekanbaru, Bandar Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, dan Bandar Udara Abdul Rachman Saleh di Malang. Pesawat juga rencananya berangkat menuju Lanud Ranai, Lanud Pontianak, dan Lanud Yogyakarta. Sebelum jatuh, dilaporkan bahwa pilot pesawat sempat meminta izin untuk kembali ke pangkalan. Pesawat tersebut membawa 12 kru dan 101 penumpang yang merupakan prajurit TNI dan keluarganya, seluruhnya dinyatakan meninggal. Sehingga dalam kalimat tersebut terdapat ideologi sosial budaya.

**Contoh 3:**

Pemerintah juga *mendukung kemandirian industri dalam negeri* untuk memasok alutsista TNI dan alat operasional Polri.

**Analisis:**

Bentuk gramatikal “pemerintah juga mendukung kemandirian industri dalam negeri” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu tindakan yang berkaitan dengan pemerintahan negara. Dalam konteks ini, “pemerintah juga mendukung kemandirian industri dalam negeri” dimaknai sebagai tindakan pemerintah untuk mendorong kemandirian industri dalam negeri untuk memasok alutsista TNI dan alat operasional Polri.

Oleh karena itu, kalimat tersebut mengandung ideologi politik.

**Contoh 4:**

*Kita kembangkan daerah seperti Entikong, Natuna, dan Atambua agar dunia melihat bahwa Indonesia adalah negara besar dan setiap jengkal tanah airnya diperhatikan dengan sungguh-sungguh.*

**Analisis:**

Bentuk gramatikal “kita kembangkan daerah seperti Entikong, Natuna, dan Atambua” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu pernyataan yang dilakukan oleh seorang presiden atas kekuasaannya. Dalam konteks ini, “kita kembangkan daerah seperti Entikong, Natuna, dan Atambua” dimaknai sebagai seruan Presiden Joko Widodo untuk terus memajukan daerah seperti Entikong, Natuna, dan Atambua dengan tujuan agar dunia melihat bahwa Indonesia adalah negara besar dan setiap jengkal tanah airnya diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kalimat tersebut mengandung ideologi kekuasaan.

#### **4. 2. 2 Dimensi Praktik Wacana**

Pada tahap praktik wacana analisis terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap produksi dan tahap konsumsi teks. Pada tahap produksi teks, penelitian melihat dari pembuat teks pidato tersebut, yaitu Presiden Joko Widodo dan juga isi dari kedua teks pidato tersebut.

## **Biografi Presiden Joko Widodo**

Presiden Joko Widodo merupakan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 setelah Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Megawati Soekarnopoetri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Ir. H. Joko Widodo (dikenal dengan panggilan Jokowi) lahir di Surakarta, 21 Juni 1961. Jokowi menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Solo, kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Gajah Mada (UGM). Selesai menempuh pendidikan tingginya di UGM, Jokowi memutuskan untuk bekerja di sebuah perusahaan. Namun, pekerjaan tersebut tidak bertahan lama karena kemudian Jokowi memutuskan untuk meneruskan usaha mebel milik keluarganya. Berkat peran Jokowi, tanpa membutuhkan waktu yang lama, usaha mebel itu pun berhasil mendapatkan banyak keuntungan.

Pada tahun 2005, Jokowi terpilih menjadi Walikota Solo dan berhasil mencapai banyak prestasi. Sehingga akhirnya pada 2010, Jokowi terpilih lagi menjadi Walikota Solo untuk kedua kalinya. Belum selesai mengabdikan diri sebagai Walikota Solo, pada tahun 2012 Jokowi dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta dan berhasil memenangkan PILKADA Jakarta 2012. Sejak saat itulah karier Joko Widodo semakin melejit, salah satunya berkat kebiasaannya yang melakukan “blusukan” ke berbagai daerah kepemimpinannya.

Dua tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, tepatnya pada 14 Maret 2014, Jokowi mendapatkan surat mandat dari Megawati untuk

menjadi calon presiden, dan Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014. Pada tanggal 19 Mei 2014, Jokowi mengumumkan bahwa Jusuf Kalla akan menjadi calon wakil presidennya. Pengumuman sekaligus deklarasi tersebut berlangsung di Gedung Joeang 45 di Menteng, Jakarta. Pencalonan tersebut didukung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura. Di hari yang sama, Jokowi dan Jusuf Kalla secara resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum.<sup>56</sup>

Jokowi akhirnya berhasil memenangkan PILPRES INDONESIA 2014, meski sebelumnya, tepatnya pada tanggal 19 Maret 2014, Jokowi digugat oleh Tim Advokasi Jakarta Baru di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dinilai telah melanggar hukum perdata, karena meninggalkan jabatannya sebagai gubernur sebelum merealisasikan janji-janjinya untuk melaksanakan program kerakyatan. Namun, Menteri Dalam Negeri yang menjabat saat itu, Gamawan Fauzi, mengkonfirmasi bahwa pencapresan Jokowi tidaklah melanggar hukum. Ia berhak maju dan akan dengan mudah mendapat izin dari Presiden tanpa harus mengundurkan diri karena sudah diatur dalam Undang Undang No 47 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Seorang kepala daerah yang hendak maju dalam Pemilihan Presiden harus mengajukan surat

---

<sup>56</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Joko\\_Widodo](https://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodo) diakses pada 30 Juni 2017, 11:55

permintaan izin kepada Presiden dan Gamawan Fauzi tidak merasa memiliki alasan untuk menghalanginya.

Jokowi mulai menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sejak 20 Oktober 2014 dan memulai masa kepemimpinannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Upaya ini oleh partai oposisi dianggap untuk meredam sementara kenaikan harga BBM, yang merupakan sebuah kebijakan di awal masa kepemimpinannya yang menuai kontroversi. Jokowi dikritik karena meluncurkan program yang tidak memiliki payung hukum dan melanggar tertib anggaran, namun hal ini dibantah oleh Jusuf Kalla, dengan argumen bahwa program kartu tersebut sebenarnya kelanjutan dari program yang sudah ada sehingga anggarannya pun mengikuti program tersebut.

Sampai saat ini, Presiden Joko Widodo masih menjadi presiden aktif Republik Indonesia, yang banyak mengeluarkan terobosan-terobosan dan kebijakan-kebijakan demi memajukan bangsa Indonesia.

Teks Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia merupakan teks yang dibuat berdasarkan ide-ide yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian, terdapat tim-tim kenegaraan yang merumuskan dan membuat teks pidato kenegaraan tersebut. Setelah teks pidato kenegaraan telah jadi, teks pidato tersebut diserahkan kembali kepada Presiden Joko Widodo untuk disetujui.

**Isi pidato 1:**

Teks Pidato Kenegaraan tersebut dibuat atas ide-ide yang berasal dari Presiden Joko Widodo yang kemudian dijabarkan oleh Kementerian Kesekretariatan Negara hingga akhirnya disetujui kembali oleh Presiden. Dalam pidato kenegaraan tahun 2015, ide-ide tersebut berkaitan dengan situasi-situasi yang terjadi di Indonesia dan juga program-program yang dilakukan oleh pemerintah pada masa jabatannya. Ide-ide yang terdapat dalam pidato tersebut berkaitan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang dialami Indonesia. Ide-ide yang berkaitan dengan kondisi sosial antara lain, pernyataan Presiden bahwa Indonesia dapat mengatasi segala persoalan yang menghadang, menipisnya nilai sosial, lunturnya nilai-nilai dan norma-norma kehidupan berbangsa dan bernegara, persatuan, kerja keras untuk membangun bangsa dan negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlindungan sosial, program bantuan sosial, kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, dan perhatian terhadap tanah Papua. Ide-ide yang berkaitan dengan kondisi ekonomi antara lain adalah percepatan program aksi pembangunan, transformasi fundamental perekonomian nasional, paradigma pembangunan, kemakmuran rakyat, kebijakan fiskal, pengendalian anggaran, penataan kembali sistem subsidi, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, pembangunan nasional, pembangunan tol laut, penggunaan rupiah untuk transaksi dalam negeri, dan transformasi ekonomi. Sementara itu, ide-ide yang berkaitan dengan kondisi politik adalah kepentingan nasional, perhatian terhadap laut Indonesia, Indonesia



sebagai negara maritim, Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia, kekuatan pertahanan negara, sinergisitas, sinkronisasi, dan harmonisasi KPK-POLRI-Kejaksaan Agung, rekonsiliasi nasional, dan Gerakan Nasional Revolusi Mental.

### **Isi pidato 2:**

Teks Pidato Kenegaraan tersebut dibuat atas ide-ide yang berasal dari Presiden Joko Widodo yang kemudian dijabarkan oleh Kementerian Kesekretariatan Negara hingga akhirnya disetujui kembali oleh Presiden. Dalam pidato kenegaraan tahun 2015, ide-ide tersebut berkaitan dengan situasi-situasi yang terjadi di Indonesia dan juga program-program yang dilakukan oleh pemerintah pada masa jabatannya. Ide-ide yang terdapat dalam pidato tersebut berkaitan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang dialami Indonesia. Ide-ide yang berkaitan dengan kondisi sosial antara lain, memakmurkan rakyat, membangun bangsa dan negara, membangun jiwa Indonesia, membangun badan Indonesia, pendidikan vokasional, Program Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, kesejahteraan guru, perlindungan terhadap kelompok marjinal, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat, dan perlindungan WNI. Ide-ide yang berkaitan dengan kondisi ekonomi antara lain adalah pembangunan Sabang-Merauke, pembangunan Miangas-Rote, paradigma pembangunan, pembangunan infrastruktur, transformasi fundamental ekonomi, tahun percepatan pembangunan nasional, percepatan pembangunan, pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial, peraturan Amnesti Pajak, UMKM, Paket Kebijakan Ekonomi, manajemen

anggaran pembangunan, dan anggaran pembangunan. Sementara itu, ide-ide yang berkaitan dengan kondisi politik adalah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju, regulasi dan birokrasi, komitmen mencegah dan melawan terorisme, peraruran daerah, reformasi hukum, politik luar negeri, diplomasi, demokrasi, stabilitas politik, keamanan, PILKADA, kedaulatan bangsa, Revolusi Karakter Mental, dan kerja nyata.

#### 4. 2. 3 Dimensi Praktik Sosiokultural

Pada tahap interpretasi, peneliti menafsirkan data-data linguistik pada tataran dimensi teks. Berikut analisis tahap dimensi teks:

##### **Pidato 1:**

Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka HUT Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, di Depan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, 14 Agustus 2015 di Jakarta. Saat itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pertamanya setelah beliau terpilih menjadi presiden Republik Indonesia atas kemenangannya pada Pemilihan Umum pada tahun 2014. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pertamanya tersebut di hadapan seluruh anggota MPR, DPR, dan DPD RI dalam sidang tahunan MPR RI 2015. Pada pidatonya kali ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan kebijakannya tentang penghentian subsidi bahan bakar minyak yang diprediksi akan berhasil. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan tentang kebijakannya melakukan *reshuffle* beberapa menteri dan memberikan rasa optimis kepada semua pihak serta jajaran

menteri.

### **Pidato 2:**

Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke-71 Proklamasi Kemerdekaan RI di Depan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dilaksanakan di Jakarta, pada 16 Agustus 2016. Pada pidatonya tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa hal penting yaitu tahun 2016 sebagai tahun percepatan pembangunan nasional, ekonomi, sumber daya manusia, reformasi hukum, kesehatan, pendidikan, dan RAPBN 2017.

#### **4. 2. 5 Indikator Ideologi**

Identifikasi dilakukan setelah melakukan analisis terhadap teks berdasarkan tahap tiga dimensi yaitu dimensi teks, dimensi praktik wacana, dan dimensi praktik sosiokultural. Identifikasi dilakukan terhadap kalimat yang menyatakan bentuk ideologi, yaitu (1) hegemoni, (2) kekuasaan, (3) politik, (4) ekonomi, dan (5) sosial budaya.

##### **a. Hegemoni**

Hegemoni merupakan pengaruh kepemimpinan, dominasi, kekuasaan suatu negara atau negara lain. Berdasarkan tabel deskripsi data, data berupa ideologi dengan indikator hegemoni adalah sebanyak 7 data, yang berasal dari “Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka HUT Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Di Depan Sidang Bersama DPR RI Dan DPD RI, Jakarta, 14 Agustus 2015” sebanyak 6 data, dan “Pidato Kenegaraan Presiden

Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke-71 Proklamasi Kemerdekaan RI di Depan Sidang Bersama DRI RI dan DPD RI, Jakarta, 16 Agustus 2016” sebanyak 2 data.

Berikut contoh analisis ideologi hegemoni pada teks pidato:

**Contoh 1:**

*Sejarah telah mengajarkan kepada kita*, kunci untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut adalah persatuan.

**Analisis:**

Bentuk gramatikal “sejarah telah mengajarkan kepada kita” menunjukkan suatu pernyataan atas pengaruh kekuasaan di masa lalu Indonesia. Dalam konteks ini, pernyataan Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya atau pada masa lalu Indonesia, persatuan bangsa Indonesia merupakan sebuah kunci untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi hegemoni.

**Contoh 2:**

Sejalan dengan nafas Nawacita, Pemerintah saat ini terus *mempercepat* pembangunan infrastruktur.

**Analisis:**

Kosakata “mempercepat” dalam kalimat tersebut bermakna menjalankan atau melakukan dengan lebih cepat. Hal tersebut dilakukan oleh presiden atas pengaruh kekuasaannya. Dalam konteks ini, istilah “nawacita” merupakan istilah yang diusung oleh Presiden Joko Widodo tentang visi dan misinya saat pemilihan presiden tahun

2014. Salah satu poin yang terdapat dalam Nawacita tersebut adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. Untuk mewujudkan salah satu poin Nawacita tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah saat ini terus mempercepat pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi hegemoni.

**Contoh 3:**

*Dirgahayu Republik Indonesia!*

**Analisis:**

Bentuk gramatikal “Dirgahayu Republik Indonesia!” menunjukkan suatu keadaan atas pengaruh kepemimpinan para pemimpin bangsa terdahulu. Dalam konteks ini, “Dirgahayu Republik Indonesia” dimaknai dengan ucapan hari lahirnya Republik Indonesia. Jadi dalam kalimat tersebut terkandung ideologi hegemoni.

**b. Kekuasaan**

Kekuasaan merupakan kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuasaan fisik. Berdasarkan tabel deskripsi data, data berupa ideologi dengan indikator kekuasaan adalah

sebanyak 37 data, yang berasal dari “Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka HUT Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Di Depan Sidang Bersama DPR RI Dan DPD RI, Jakarta, 14 Agustus 2015” sebanyak 17 data, dan “Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke-71 Proklamasi Kemerdekaan RI di Depan Sidang Bersama DRI RI dan DPD RI, Jakarta, 16 Agustus 2016” sebanyak 20 data. Berikut contoh analisis ideologi kekuasaan:

**Contoh 1:**

Seperti Saudara-saudara ketahui, saya baru saja melakukan *perombakan Kabinet Kerja*. (pidato 1, paragraf 26, kalimat 1)

**Analisis:**

Bentuk gramatikal “*perombakan Kabinet Kerja*” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu tindakan yang dilakukan atas dasar kekuasaan. Dalam konteks ini, tindakan “*perombakan Kabinet Kerja*” dimaknai dengan penyusunan kembali Kabinet Kerja pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo di awal kepemimpinannya pada Agustus 2015. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi kekuasaan.

**Contoh 2:**

*Kapal-kapal yang tertangkap harus menghadapi ketegasan kita, termasuk ditenggelamkan.* (pidato 1, paragraf 42, kalimat 5)

**Analisis:**

Bentuk gramatikal “*kapal-kapal yang tertangkap harus menghadapi ketegasan kita*” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan perintah dari seseorang yang berkuasa, yaitu presiden. Perintah tersebut disampaikan oleh presiden atas kekuasaan yang dimilikinya. Dalam konteks ini, kapal-kapal asing yang tertangkap harus menghadapi ketegasan atau ketentuan hukum kelautan Indonesia, salah satunya adalah kapal tersebut ditenggelamkan. Oleh karena itu, di dalam kalimat tersebut terkandung ideologi kekuasaan.

**Contoh 3:**

Oleh karena itu saya *mengajak* seluruh lapisan masyarakat untuk terus meneguhkan komitmen bersama mencegah dan melawan aksi terorisme. (pidato 2, paragraf 12, kalimat 3)

**Analisis:**

Kosa kata “*mengajak*” yang terdapat dalam kalimat tersebut merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang presiden atas dasar kekuasaan. Dalam konteks ini, ajakan dari Presiden Joko Widodo untuk terus meneguhkan komitmen bersama mencegah dan melawan aksi terorisme dimaknai dengan suatu himbauan atau seruan kepada seluruh rakyat Indonesia agar tidak takut pada teror dan agar terus bersama-sama mencegah dan melawan aksi terorisme. Hal ini disampaikan oleh seorang presiden kepada rakyatnya agar semua rakyatnya menuruti perkataannya dan tunduk kepada presiden atas

dasar kekuasaan. Sehingga, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi kekuasaan.

### c. Politik

Politik adalah segala hal urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Berdasarkan tabel deskripsi data, data berupa ideologi dengan indikator kekuasaan adalah sebanyak 43 data, yang berasal dari “Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka HUT Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Di Depan Sidang Bersama DPR RI Dan DPD RI, Jakarta, 14 Agustus 2015” sebanyak 16 data, dan “Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke-71 Proklamasi Kemerdekaan RI di Depan Sidang Bersama DRI RI dan DPD RI, Jakarta, 16 Agustus 2016” sebanyak 27 data. Berikut contoh analisis ideologi politik.

#### **Contoh 1:**

Dalam hal *berdemokrasi*, kita telah menjadi salah satu contoh gemilang di dunia. (pidato 1, paragraf 9, kalimat 2)

#### **Analisis:**

Kosakata “*berdemokrasi*” yang terdapat dalam kalimat “dalam hal berdemokrasi, kita telah menjadi salah satu contoh gemilang di dunia”, mengandung makna pemerintahan dan kepemimpinan yang berhubungan dengan politik. Pada konteks ini, “*berdemokrasi*” bermakna bentuk atau sistem pemerintahan yang di dalamnya terdapat gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak



atau kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Indonesia telah menjalankan sistem pemerintahan secara demokrasi ini dengan sangat baik, sehingga Indonesia telah menjadi salah satu contoh gemilang di dunia. Maka dalam kalimat tersebut terdapat ideologi politik.

**Contoh 2:**

Seperti Saudara-saudara ketahui, saya baru saja *melakukan perombakan Kabinet Kerja*. (pidato 1, paragraf 26, kalimat 1)

**Analisis:**

Bentuk gramatikal “*melakukan perombakan Kabinet Kerja*” juga menunjukkan suatu tindakan yang berkaitan dengan pemerintahan negara Indonesia. Dalam konteks ini, tindakan “*perombakan Kabinet Kerja*” dimaknai dengan penyusunan kembali Kabinet Kerja pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo di awal kepemimpinannya pada Agustus 2015. Jadi, dalam kalimat itu pun terkandung ideologi politik.

**Contoh 3:**

Kita juga bersyukur *Pilkada* serentak tanggal 9 Desember 2015 secara umum berlangsung aman, tertib dan damai. (pidato 2, paragraf 48, kalimat 1)

**Analisis:**

Kosa kata “*pilkada*” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu urusan mengenai pemerintahan negara. Dalam konteks ini, “*pilkada*” dimaknai dengan suatu pemilihan kepala daerah

secara langsung oleh rakyat Indonesia. Pada tanggal 9 Desember 2015 lalu, pilkada dilakukan secara serentak di sembilan provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, kalimat tersebut mengandung ideologi politik.

#### **d. Ekonomi**

Ekonomi adalah segala hal urusan dan tindakan mengenai perekonomian negara. Berdasarkan tabel deskripsi data, data berupa ideologi dengan indikator kekuasaan adalah sebanyak 70 data, yang berasal dari “Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka HUT Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Di Depan Sidang Bersama DPR RI Dan DPD RI, Jakarta, 14 Agustus 2015” sebanyak 27 data, dan “Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke-71 Proklamasi Kemerdekaan RI di Depan Sidang Bersama DRI RI dan DPD RI, Jakarta, 16 Agustus 2016” sebanyak 43 data. Berikut contoh analisis ideologi ekonomi:

##### **Contoh 1**

Semoga terpilihnya pimpinan KPK yang amanah, yang dapat membawa lembaga anti-rasuah itu bekerja efektif, dan dapat bekerjasama dengan penegak hukum lainnya, membersihkan jubah Republik yang dikotori oleh *korupsi*. (pidato 1, paragraf 52, kalimat 2)

##### **Analisis**

Kosa kata “*korupsi*” yang terdapat dalam kalimat tersebut bermakna penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan perekonomian negara. Dalam konteks ini kosa kata “*korupsi*” dimaknai dengan suatu tindakan penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi. Maraknya tindakan korupsi di Indonesia tentu saja sangat merugikan negara. Meskipun begitu, hukum di Indonesia belum tegas untuk menyikapinya. Karena itulah, Indonesia berharap ke depannya pemimpin KPK adalah seseorang yang amanah, bisa bekerja secara efektif, dan dapat bekerjasama dengan penegak hukum lainnya untuk membersihkan kasus korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.

## **Contoh 2**

Juga banyak *usaha Mikro, Kecil dan Menengah* yang bisa digerakkan. (pidato 1, paragraf 35, kalimat 4)

## **Analisis**

Kosa kata “*usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan usaha-usaha yang bergerak di bidang perekonomian yang terdapat di Indonesia. Dalam konteks ini, *usaha Mikro, Kecil dan Menengah* merupakan sebuah istilah tentang perekonomian di Indonesia. Istilah ini kemudian disingkat menjadi UMKM. UMKM terdiri atas usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang masing-masing memiliki pengertian dan batasan yang berbeda. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, kalimat tersebut mengandung ideologi ekonomi.

### **Contoh 3**

Banyak program bantuan sosial untuk kelompok masyarakat miskin yang dapat diberikan pemerintah untuk membantu mereka *keluar dari belenggu kemiskinan*.. (pidato 2, paragraf 41, kalimat 1)

### **Analisis**

Bentuk gramatikal “*keluar dari belenggu kemiskinan*” dalam kalimat tersebut merupakan bentuk gramatikal yang menunjukkan adanya strata sosial yang rendah di Indonesia, yaitu kemiskinan. Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan perekonomian suatu bangsa. Dalam

konteks ini, bentuk gramatikal “*keluar dari belenggu kemiskinan*” dimaknai dengan keluar dari jeratan kemiskinan. Seperti yang telah diketahui, kemiskinan di Indonesia masih menempati angka yang tinggi. Untuk itu, pemerintah membuat program-program bantuan sosial sebagai suatu solusi agar masyarakat miskin terbebas dari kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kalimat ini terdapat ideologi ekonomi.

#### e. **Sosial Budaya**

Sosial budaya memiliki pengertian yakni segala hal yang diciptakan oleh manusia dengan pikiran dan budi daya dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan tabel deskripsi data, data berupa ideologi dengan indikator kekuasaan adalah sebanyak 42 data, yang berasal dari “Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka HUT Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Di Depan Sidang Bersama DPR RI Dan DPD RI, Jakarta, 14 Agustus 2015” sebanyak 18 data, dan “Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke-71 Proklamasi Kemerdekaan RI di Depan Sidang Bersama DRI RI dan DPD RI, Jakarta, 16 Agustus 2016” sebanyak 24 data. Berikut contoh analisis ideologi sosial budaya.

#### **Contoh 1:**

Pemerintah seakan-akan *tidak berpihak kepada rakyat*. (pidato 1, paragraf 30, kalimat 2)

**Analisis:**

Bentuk gramatikal “*tidak berpihak kepada rakyat*” dalam kalimat tersebut memiliki makna memilih salah satu pihak, yaitu rakyat. Dalam konteks ini bentuk gramatikal “*tidak berpihak kepada rakyat*” dimaknai dengan pemerintah tidak membela rakyat atau terkesan seperti tidak peduli pada rakyat. Ketidakpedulian tersebut masih berkaitan dengan naiknya harga BBM. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kalimat tersebut terkandung ideologi sosial budaya.

**Contoh 2:**

Banyak *program perlindungan sosial* yang dapat dijalankan secara berkelanjutan untuk seluruh masyarakat dan pekerja. (pidato 1, paragraf 35, kalimat 3)

**Analisis:**

Bentuk gramatikal “*program perlindungan sosial*” dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah gagasan atau pemikiran yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, bentuk gramatikal “*program perlindungan sosial*” akan dilaksanakan secara berkelanjutan atau terus menerus untuk seluruh masyarakat dan para pekerja yang bekerja di Indonesia. Sehingga dalam kalimat tersebut terdapat ideologi sosial budaya.

**Contoh 3:**

Indonesia juga terus *mendukung kemerdekaan Palestina* dari penjajahan dan kedzaliman serta menyerukan agar saudara-saudara

Muslim di Timur Tengah meletakkan senjata dan berdamai demi kepentingan ukhuwah Islamiyah. (pidato 1, paragraf 49, kalimat 2)

**Analisis:**

Bentuk gramatikal “*mendukung kemerdekaan Palestina*” berkaitan dengan kehidupan sosial bernegara. Dalam konteks ini, bentuk gramatikal “*mendukung kemerdekaan Palestina*” dalam kalimat tersebut bermakna bahwa bangsa Indonesia berada di pihak Palestina untuk merdeka dari penjajahan dan kedzaliman serta menyerukan agar saudara-saudara Muslim di Timur Tengah meletakkan senjata dan berdamai demi kepentingan ukhuwah Islamiyah. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi sosial budaya.

**4.3 Rangkuman Data**

Berdasarkan hasil analisis kerja ideologi teks Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo pada dimensi teks, dimensi praktik wacana, dan dimensi praktik sosiokultural, dapat dibuat rangkuman dari keseluruhan data ideologi pada ketiga dimensi tersebut. Rangkuman dapat dilihat pada tabel 4.2.

**Tabel 4.2 Rangkuman Data Ideologi pada Teks Pidato  
Kenegaraan Presiden Joko Widodo**

<b>Dimensi Teks</b>	<b>Dimensi Praktik Wacana</b>	<b>Dimensi Praktik Sosiokultural</b>
1. Kosakata dan gramatikal yang mengandung ideologi hegemoni sebanyak 8 bentuk (4%). 2. Kosakata dan gramatikal yang	<b>Produksi teks:</b> Produksi teks didasarkan pada biografi pembuat teks. Pidato kenegaraan	<b>Pidato 1:</b> Pidato kenegaraan Presiden Soekarno ini dibacakan pada peringatan

<p>mengandung ideologi kekuasaan sebanyak 37 bentuk (18,5%).</p> <p>3. Kosakata dan gramatikal yang mengandung ideologi politik sebanyak 43 bentuk (21,5%).</p> <p>4. Kosakata dan gramatikal yang mengandung ideologi ekonomi sebanyak 70 bentuk (35%).</p> <p>5. Kosakata dan gramatikal yang mengandung ideologi sosial budaya sebanyak 42 bentuk (21%).</p>	<p>pertama yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, berlangsung di Depan Sidang Bersama DPR RI Dan DPD RI, Jakarta, 14 Agustus 2015, pada tahun pertama menjabat sebagai Presiden RI. Teks Pidato Kenegaraan tersebut dibuat atas ide-ide yang berasal dari Presiden Joko Widodo yang kemudian dijabarkan oleh Kementerian Kesekretariatan Negara hingga akhirnya disetujui kembali oleh Presiden. Dalam pidato kenegaraan tahun 2015, ide-ide tersebut berkaitan dengan situasi-situasi yang terjadi di Indonesia dan juga program-program yang dilakukan oleh pemerintah pada masa jabatannya. Ide-ide yang terdapat dalam pidato tersebut berkaitan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang dialami Indonesia.</p> <p><b>Pidato 2:</b></p> <p>Pidato kenegaraan kedua yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, berlangsung di Depan Sidang Bersama DPR RI Dan DPD RI, Jakarta, 16 Agustus 2016, pada tahun</p>	<p>ulang tahun Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2015 di Depan Sidang Bersama DPR RI Dan DPD RI, di Jakarta.</p> <p><b>Pidato 2:</b></p> <p>Pidato kenegaraan Presiden Soekarno ini dibacakan pada peringatan ulang tahun Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2016 di Depan Sidang Bersama DPR RI</p>
---	--	---



	<p>kedua menjabat sebagai Presiden RI. Teks Pidato Kenegaraan tersebut dibuat atas ide-ide yang berasal dari Presiden Joko Widodo yang kemudian dijabarkan oleh Kementerian Kesekretariatan Negara hingga akhirnya disetujui kembali oleh Presiden. Dalam pidato kenegaraan tahun 2015, ide-ide tersebut berkaitan dengan situasi-situasi yang terjadi di Indonesia dan juga program-program yang dilakukan oleh pemerintah pada masa jabatannya. Ide-ide yang terdapat dalam pidato tersebut berkaitan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang dialami Indonesia.</p>	<p>dan DPD RI, di Jakarta.</p>
--	---	--------------------------------

#### 4.4 Interpretasi Data

Berdasarkan rangkuman data di atas, dapat diinterpretasikan data berupa ideologi pada tiga dimensi yakni, dimensi teks, dimensi praktik wacana, dan dimensi praktik sosiokultural.

Pada tataran dimensi teks, analisis dilakukan dengan melihat kosakata atau tata bahasa yang digunakan dapat merujuk kepada suatu realita ataupun ide yang dipandang mengandung ideologi. Dari

keseluruhan data diperoleh bentuk kosakata yang mengandung ideologi sebanyak 93 data dan bentuk gramatikal sebanyak 107 data.

Dapat diketahui bahwa indikator ideologi ekonomi yang paling banyak muncul dan menempati urutan pertama dalam analisis teks pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. Dalam analisis tersebut, terdapat kosakata dan gramatikal pembawa ideologi ekonomi sebanyak 70 data. Dalam hal ini, ideologi ekonomi merupakan ideologi yang paling menonjol pada kedua teks pidato Presiden Joko Widodo tersebut. Hal tersebut disebabkan karena ekonomi di Indonesia masih tertinggal, terutama di kawasan ASEAN. Sehingga, masalah ekonomi menjadi isu yang sensitif atau rawan untuk dibahas karena hal itu menjadi suatu pokok sentral peraturan negara. Sampai saat ini, Indonesia masih belum terbebas dari masalah perekonomian, salah satunya adalah kemiskinan. Sampai dengan tahun 2017 ini, angka kemiskinan di Indonesia masih mencapai jumlah 27,76 juta jiwa.

Selain itu, ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi dunia juga menjadi salah satu alasan yang membuat ideologi ekonomi lebih menonjol daripada ideologi-ideologi lainnya dalam teks pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. Ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi dunia tersebut pun tentunya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sehingga, perekonomian di Indonesia merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Hal tersebut juga sejalan dengan visi misi Presiden Joko Widodo dalam masa pemerintahannya, yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera dan mewujudkan

bangsa yang berdaya saing. Untuk mencapai kedua hal tersebut, salah satu kuncinya adalah dengan memajukan perekonomian di Indonesia.

Setelah ideologi ekonomi yang menempati urutan pertama yang banyak muncul, urutan kedua adalah kosakata dan bentuk gramatikal yang mengandung ideologi politik sebanyak 43 data; urutan ketiga adalah kosakata dan bentuk gramatikal yang mengandung ideologi sosial budaya sebanyak 42 data; urutan keempat adalah kosakata dan bentuk gramatikal yang mengandung ideologi kekuasaan sebanyak 37 bentuk; dan urutan terakhir adalah kosakata dan bentuk gramatikal yang mengandung ideologi hegemoni sebanyak 8 data.

Berdasarkan data-data yang telah dianalisis tersebut, ideologi ekonomi menjadi ideologi yang sering muncul dan menjadi topik utama dan mendominasi pada setiap pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo lebih banyak mengangkat tema pembangunan ekonomi di tengah pembangunan bangsa Indonesia pada saat ini.

Sebagai pembuat teks, Presiden Joko Widodo mengangkat isi pidato berdasarkan program-program pembangunan yang dilakukan pada masa jabatannya dan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama dua tahun masa jabatannya. Hal tersebut terkait dengan ideologi yang terdapat dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang mempunyai pesan dan ide-ide yang bertujuan untuk membangun bangsa Indonesia menjadi negara yang maju.

Pada proses inteprestasi teks, pilihan kosakata dan bentuk gramatikal yang terdapat dalam teks pidato tersebut menunjukkan bahwa teks pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo tersebut merupakan sebuah representasi dari berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia selama dua tahun ia menjabat sebagai presiden Republik Indonesia.

Pada tataran dimensi praktik sosiokultural, dimensi ini memfokuskan pada analisis konteks situasi dan keadaan pada tiap tahun perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia sebagai setting dari teks Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. Proses konsumsi teks Pidato Presiden Joko Widodo memiliki pengaruh terhadap kalangan masyarakat Indonesia. Terbukti dengan antusiasme dari pendengar yang terdiri dari berbagai kalangan pendengar dan juga para pencari teks pidato tersebut.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan teks Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia dan disiarkan langsung di beberapa stasiun televisi Indonesia, mampu mempengaruhi pendengarnya yaitu masyarakat Indonesia.

#### **4.5 Pembahasan**

Dalam Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough, terdapat tiga tahapan untuk menganalisis suatu teks. Yang pertama adalah dengan menganalisis dimensi teks tersebut. Yang kedua adalah dengan melihat dimensi praktik wacana dari teks tersebut. Dan yang terakhir adalah dengan melihat dimensi praktik sosiokultural dari teks tersebut.

Pada tataran dimensi teks, analisis dilakukan dengan pengelompokan kosa kata atau bentuk gramatikal yang terdapat dalam kalimat-kalimat yang ada dalam pidato menjadi beberapa indikator ideologi, yaitu hegemoni, kekuasaan, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Berdasarkan interpretasi data yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa secara umum ideologi ekonomi menjadi ideologi yang sering muncul dan menjadi topik utama dan mendominasi kedua pidato yang dibawakan oleh Presiden Joko Widodo, dibandingkan dengan ideologi-ideologi lainnya, yaitu hegemoni, kekuasaan, politik, dan sosial budaya. Presiden Joko Widodo banyak mengangkat tema ekonomi ditengah pembangunan bangsa Indonesia pada saat ini yang tengah melakukan banyak pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam tataran dimensi praktik wacana, sebagai pembuat teks, Presiden Joko Widodo mengangkat peristiwa-peristiwa dan suasana-suasana yang terjadi di Indonesia selama ini, dari awal kemerdekaan Indonesia hingga tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa ideologi-ideologi yang terdapat dalam pidato tersebut mempunyai pesan dan ide-ide yang bersifat membangun dan menghimbau seluruh rakyat Indonesia.

Pada proses intepretasi teks, pilihan kosakata, gramatikal, metafora, dan keruntutan teks yang terdapat pada dimensi teks dapat diperkuat dengan melihat konteks yang sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadil. Hal itu semakin menjelaskan bajwa teks pidato yang dibacakan oleh Presiden Joko Widodo merupakan sebuah bentuk

representasi dari berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia selama dua tahun ia menjabat sebagai presiden Republik Indonesia.

Pada tataran dimensi praktik sosiokultural, dimensi ini memfokuskan pada analisis perwujudan atau pembuktian dari situasi dan keadaan pada tiap tahun perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia sebagai latar belakang dari dibuatnya teks Pidato Kenegaraan Joko Widodo. Dalam perwujudannya, ada beberapa dari kebijakan-kebijakannya yang tidak terwujud selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, salah satunya adalah pembangunan jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Proses konsumsi teks Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kalangan masyarakat Indonesia. Terbukti dengan antusiasme dari pendengar yang terdiri dari berbagai kalangan pendengar.

#### **4.6 Keterbatasan Penelitian**

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pada tahap Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough, peneliti hanya menggunakan tahap kosakata dan bentuk gramatikal.
2. Dalam penelitian ini peneliti hanya terfokus dengan menganalisis kosakata dan gramatikal yang membawa ideologi hegemoni, kekuasaan, politik, ekonomi, dan sosial budaya.

3. Pada dimensi praktik wacana, sehubungan dengan keterbatasan waktu, tidak dilakukan wawancara dengan pihak yang membuat pidato.
4. Instrumen yang digunakan adalah tabel analisis kerja yang memungkinkan terdapat kesalahan dalam proses menganalisis data. Hal ini memungkinkan adanya kekurangam karena keterbatasan dalam penguasaan teori. Dengan demikian, adanya kesalahan dan ketidakcermatan dalam menganalisis data tak dapat dihindari.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis rangkuman data, intepetasi, dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam teks Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo ideologi ekonomi adalah ideologi yang paling menonjol atau dominan dibandingkan dengan ideologi-ideologi lainnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah frekuensi yang terdapat dalam kedua teks tersebut mencapai jumlah 70 bentuk (35%). Ideologi ekonomi menjadi ekonomi yang paling menonjol atau dominan disebabkan karena sampai saat ini, Indonesia masih belum terbebas dari masalah perekonomian, salah satunya adalah kemiskinan. Selain itu, ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi dunia juga menjadi salah satu alasan yang membuat ideologi ekonomi lebih menonjol daripada ideologi-ideologi lainnya dalam teks pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo.

Setelah ideologi ekonomi menempati urutan pertama yang banyak muncul, urutan kedua adalah kosakata dan bentuk gramatikal yang



mengandung ideologi politik sebanyak 43 data (21,5%); urutan ketiga adalah kosakata dan bentuk gramatikal yang mengandung ideologi sosial budaya sebanyak 42 data (21%); urutan keempat adalah kosakata dan bentuk gramatikal yang mengandung ideologi kekuasaan sebanyak 37 bentuk (18,5%); dan urutan terakhir adalah kosakata dan bentuk gramatikal yang mengandung ideologi hegemoni sebanyak 8 data (4%).

### **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang akan peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Pada tahap Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough, peneliti hanya menggunakan tahap kosakata dan bentuk gramatikal. Oleh karena itu, untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang konsep ideologi dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo disarankan untuk menganalisis secara lebih mendalam lagi, seperti bentuk semantik, koherensi, atau kohesivitas.
2. Dalam penelitian ini peneliti hanya terfokus dengan menganalisis kosakata dan bentuk gramatikal yang mengandung ideologi hegemoni, kekuasaan, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Oleh karena itu, untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang konsep ideologi dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo disarankan untuk mencari indikator yang lain agar lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Y. Z. (2013). *Pengantar Retorika*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bau, Y. K. (2009). *Pengantar Sistem Sosial Budaya*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama Yogyakarta.
- Blommaert, J. (2005). *Discourse*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Budiarjo, M. (1977). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, M. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyono, C. H. (1986). *Ideologi Politik*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset.
- Darma, Y. A. (2009). *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- Ebyhara, A. B. (2016). *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Hakim, R. (2010). *Kiat Jitu Mahir Pidato*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan.
- Haryatmoko. (2016). *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis): Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

- Jorgensen, M. W., & Phillips, L. J. (2007). *Analisis Wacana Teori dan Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keraf, G. (1971). *Komposisi*. Flores: Penerbit Nusa Indah.
- Sobur, A. (2001). *Analisis Teks Media*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sukarna. (1981). *Ideologi Suatu Studi Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sumarlam. (2003). *Teori dan Praktik Analisis Wacana*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Sumarlam, d. (2003). *Teori dan Praktik Analisis Wacana*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Percetakan PT Gramedia.
- Thoha, M. (2003). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Perkasa.
- Yanuarita, A. (2012). *Langkah Cerdas Mempersiapkan Pidato dan MC*. Sukoharjo: Teranova Books.
- Zainuddin, A. R. (1992). *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Negara Politik Ibnu Khaldun*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

## Sumber Internet

Gaptek\_ancorez. (2012, September). *Pengertian Ekonomi*. Diakses 17 Maret

2017, dari Ancorez Community:

<http://thedarkancokullujaba.blogspot.co.id/2012/09/pengertian-ekonomi.html>

Indonesia, W. B. (2017, Mei 29). *Joko Widodo*. Diakses 30 Juni 2017, dari

Wikipedia Ensiklopedia Bebas: [https://id.wikipedia.org/wiki/Joko\\_Widodo](https://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodo)

*Pengertian Ekonomi Menurut Para Ahli*. (2013, Agustus). Diakses 17 Maret

2017, dari Pengertian Ahli: Kumpulan Pengertian Menurut Para Ahli:

<http://www.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-ekonomi-menurut-para-ahli.html>

[Repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26164/Chapter%20II.pdf](http://Repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26164/Chapter%20II.pdf) (diakses pada  
Senin, 2 Januari 2017)

Riska, A. R. (2012, April 3). *Hegemoni 'kekuasaan' Negara*. Diakses 30

Desember 2016, dari Sosial Budaya: understanding culture in daily life:

<https://sosiologibudaya.wordpress.com/2012/04/03/hegemoni-kekuasaan-negara/>

Wulani, C. (n.d.). *Pengertian Ekonomi Secara Umum*. Diakses 17 Maret 2017,

dari Citra Wulani: a great wordpress.com:

<https://citrawulani.wordpress.com/mata-pelajaran/ekonomi/pengertian-ekonomi-secara-umum/>

# LAMPIRAN

**Lampiran 1** (Teks Pidato Kenegaraan Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, di depan Sidang Bersama DPR RI Dan DPD RI, Jakarta, 14 Agustus 2015)

**PIDATO KENEGARAAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**DALAM RANGKA**

**HUT KE-70 PROKLAMASI KEMERDEKAAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

**DI DEPAN SIDANG BERSAMADEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 14 Agustus 2015

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

*Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,*

*Om Swastiastu,*

*Namo Buddhaya*

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;

Yang saya hormati Bapak BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia Ketiga;

Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima;

Yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia Keenam, beserta Ibu Ani Yudhoyono;

Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno dan Bapak Hamzah Haz;

Yang saya hormati Bapak Boediono beserta Ibu Herawati Boediono;

Yang saya hormati Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid;

Yang saya hormati Ibu Karlina Umar Wirahadikusumah;

Yang saya hormati para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Marilah kita bersama-sama bersyukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam rangka Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70.

Hari ini di depan sidang yang terhormat, saya akan menyampaikan Pidato Kenegaraan pertama saya sebagai Presiden Republik Indonesia.

Hadirin yang saya hormati,

Kita patut berterimakasih kepada para pendahulu kita, para pemimpin nasional, mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden

Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Atas perjuangan dan kerja keras para pemimpin nasional tersebut, disertai dukungan sepenuh hati dari seluruh rakyat Indonesia, hari ini di saat kita memperingati 70 tahun Indonesia Merdeka, kita mempunyai modal yang lebih dari cukup untuk melompat maju.

Persatuan Indonesia sudah kokoh, pendidikan rakyat semakin maju, dan peluang peserta didik untuk melakukan mobilitas sosial terbuka lebar. Saat ini, kita telah memiliki hampir 300 ribu sekolah, lebih dari dua juta guru, dan hampir 40 juta siswa, tidak termasuk Taman Kanak-Kanak yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air.

Lebih dari itu, Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, adalah negeri dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, negeri demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dalam hal berdemokrasi, kita telah menjadi salah satu contoh gemilang di dunia. Dibandingkan dengan tahun 2013, indeks demokrasi kita naik dari 63,72 menjadi 73,04 pada tahun 2015. Kita juga memiliki pemilih muda yang kritis, dan bersemangat mengawal jalannya demokrasi dan pemerintahan.

Selain itu, saat ini Indonesia juga mempunyai jumlah kelas menengah yang signifikan dan akan terus bertambah seiring dengan bonus demografi yang sedang dan akan kita nikmati. Dalam 15 tahun terakhir, Indonesia juga mengalami lonjakan Produk Domestik Bruto, dari sekitar 1000 triliun rupiah, menjadi sekitar 10 ribu triliun rupiah dan menjadi kekuatan ke-16 ekonomi dunia. Kini Indonesia duduk sejajar dengan negara-negara maju di Forum G-20.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Semua itu menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Sebagai bangsa yang besar, kita harus percaya diri, harus optimis, bahwa kita dapat mengatasi segala persoalan yang menghadang di hadapan kita.



Selama ini kita terjebak pada pemahaman bahwa melambannya perekonomian global, yang berdampak pada perekonomian nasional adalah masalah paling utama. Padahal kalau kita cermati lebih seksama, menipisnya nilai kesantunan dan tatakrama, sekali lagi, menipisnya nilai kesantunan dan tatakrama, juga berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa.

Menipisnya budaya saling menghargai, mengeringnya kultur tenggang rasa, baik di masyarakat maupun institusi resmi seperti lembaga penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, media, dan partai politik, menyebabkan bangsa ini terjebak pada lingkaran ego masing-masing. Hal ini tentu saja menghambat program aksi pembangunan, budaya kerja, semangat gotong royong, dan tumbuhnya karakter bangsa.

Lebih-lebih, saat ini ada kecenderungan semua orang merasa bebas, sebebas-bebasnya, dalam berperilaku dan menyuarakan kepentingan. Keadaan ini menjadi semakin kurang produktif ketika media juga hanya mengejar rating dibandingkan memandu publik untuk meneguhkan nilai-nilai keutamaan dan budaya kerja produktif. Masyarakat mudah terjebak pada ‘histeria publik’ dalam merespon suatu persoalan, khususnya menyangkut isu-isu yang berdimensi sensasional.

Tanpa kesantunan politik, tatakrama hukum dan ketatanegaraan, serta kedisiplinan ekonomi, kita akan kehilangan optimisme, dan lamban mengatasi persoalan-persoalan lain termasuk tantangan ekonomi yang saat ini sedang dihadapi bangsa Indonesia. Kita akan miskin tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Sekarang ini siklus perekonomian global maupun nasional kurang menggembirakan. Goncangan ekonomi seperti itu bukanlah yang pertama kali kita rasakan. Kita telah mengalami berulang kali. Kita optimis dapat melaluinya dengan selamat.

Selain itu, banyak masalah mendasar yang menuntut penyelesaian. Di bidang pangan, kita belum mencapai kedaulatan pangan, rentan gagal panen, dan mudah

diterpa ketidakstabilan harga pangan. Di bidang infrastruktur, moda transportasi massal di tiap wilayah masih sangat kurang dan belum terintegrasi dengan baik.

Di bidang maritim, illegal fishing, pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut menyebabkan kerugian negara sangat besar. Sedangkan untuk energi, kita masih menghadapi masalah ketersediaan tenaga listrik untuk menopang kehidupan warga dan pembangunan ekonomi. Ditambah lagi, produksi BBM masih defisit sekitar 600 ribu barel per hari.

Sementara itu, di bidang kesehatan, gizi buruk dan angka kematian ibu yang relatif tinggi masih menjadi masalah utama. Di bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah baru mencapai sekitar 8 tahun dari 12 tahun wajib belajar. Selain itu, kita juga belum mentas dari kemiskinan dan kesenjangan sosial, baik antar kelompok masyarakat maupun antarwilayah. Gini ratio tahun ini masih di atas 0,4. Yang memperihatinkan fenomena kekerasan terhadap anak diduga juga meningkat.

Indonesia juga dihadapkan pada beberapa cobaan. Letusan Gunung Sinabung, Gunung Raung, hujan salju di Papua, dan dampak El-Nino serta perubahan iklim. Tanpa diduga, beberapa bulan lalu pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara jatuh di Medan dan merenggut sejumlah prajurit terbaik kita dan masyarakat sipil.

Pemerintah tentu tidak hanya berpangku tangan. Dengan kemampuan yang ada, kita berikan bantuan dan pertolongan kepada warga yang tertimpa musibah. Kita berikan penghormatan dan penghargaan kepada para prajurit yang gugur akibat jatuhnya pesawat Hercules.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Sejarah telah mengajarkan kepada kita, kunci untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut adalah persatuan. Persatuan!

Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, bangsa Indonesia terus dihadapkan pada persoalan besar, yaitu melawan penjajah yang ingin kembali berkuasa.

Dalam kondisi sulit seperti itu, hubungan antara pemimpin dengan pemimpin, antara pemimpin dengan rakyat, dan antara rakyat dengan rakyat, justru terjalin

sangat erat dan mendalam. Semangat persatuan mereka laksana semen yang menyatukan butir-butir pasir menjadi pilar yang kokoh. Karena persatuan itu, kita tetap menjadi bangsa yang merdeka dan bermartabat.

Oleh sebab itu, untuk mengatasi seluruh persoalan bangsa dewasa ini, kita harus tetap utuh, bekerja bahu membahu, tidak boleh terpecah belah oleh pertentangan politik dan kepentingan jangka pendek. Sehingga kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dapat terwujud.

Seperti Saudara-saudara ketahui, saya baru saja melakukan perombakan Kabinet Kerja. Keputusan ini saya ambil guna memperkuat kinerja Pemerintah untuk percepatan implementasi program aksi pembangunan. Para putra terbaik bangsa harus mau berkeringat, membanting tulang membangun bangsa dan negara. Bagi saya, perombakan Kabinet Kerja adalah salah satu jembatan terbaik untuk memenuhi janji saya pada rakyat, yaitu meningkatkan kesejahteraan dalam perikehidupan mereka.

Saudara-saudara yang saya banggakan,

Konsolidasi demokrasi telah kita raih. Kini saatnya, demi menjaga kepentingan nasional, kita lakukan transformasi fundamental perekonomian nasional. Paradigma pembangunan yang bersifat konsumtif harus diubah menjadi produktif. Pembangunan harus dimulai dari pinggiran, dari daerah dan desa-desa, dengan meningkatkan produktivitas sumberdaya manusia, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan digerakkan oleh sikap mental kreatif, inovatif, dan gigih. Dengan cara itu juga, kita akan memanfaatkan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tanpa keberanian melakukan lompatan tersebut, kita tidak akan pernah bisa meletakkan fondasi pembangunan nasional yang kokoh, mandiri secara ekonomi, dan menegakkan kepentingan nasional.

Sejauh ini Pemerintah senantiasa menjaga APBN tetap sehat, berkualitas, dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung kemandirian fiskal melalui peningkatan penerimaan tanpa mengganggu iklim investasi. Kita kurangi

ketergantungan pada penerimaan dari sumberdaya alam. Kita kendalikan defisit anggaran dalam batas aman, dan kita jaga debt ratio, rasio hutang dalam batas yang terkendali. Selain itu, kita juga tata kembali sistem subsidi agar lebih tepat sasaran. Kita juga dorong pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Saya memahami, kebijakan yang saya ambil di awal pemerintahan adalah kebijakan yang tidak populer. Pemerintah seakan-akan tidak berpihak kepada rakyat.

Namun, moral politik saya mengatakan, saya harus bertindak dan menghentikan praktik yang tidak benar.

Langkah awal yang saya tempuh adalah mengalihkan subsidi bahan bakar minyak ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial. Selain itu juga menata jalur pengadaan dan distribusi BBM. Kita harus meninggalkan perilaku konsumtif menjadi produktif.

Sebagai ilustrasi, tahun 2014, sekitar 240 triliun rupiah subsidi BBM hanya dibakar di jalan-jalan, hanya dibakar-bakar dan dinikmati oleh jutaan mobil pribadi; bukan dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di gunung-gunung, di pesisir-pesisir, di pulau-pulau terpencil, atau mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Itulah yang saya sebut sebagai praktik yang tidak benar tersebut. Padahal uang sebesar itu dapat digunakan untuk membangun sekolah, membangun rumah sakit, meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program ekonomi produktif dan perlindungan sosial, serta membangun lebih banyak lagi infrastruktur.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Pemerintah menyadari kebijakan pengalihan subsidi BBM untuk sementara waktu mengurangi kenyamanan hidup kita. Namun untuk jangka panjang, kebijakan yang saat ini dirasa pahit, pada saatnya akan berbuah manis.

Banyak infrastruktur dan fasilitas publik yang dapat dibangun pemerintah untuk dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Banyak program bantuan sosial untuk kelompok masyarakat miskin yang dapat diberikan pemerintah untuk membantu mereka keluar dari belenggu kemiskinan. Banyak program perlindungan sosial yang dapat dijalankan secara berkelanjutan untuk seluruh masyarakat dan pekerja. Juga banyak usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bisa digerakkan. Semua itu bisa kita lakukan dengan pengalihan subsidi BBM dan subsidi-subsidi lainnya yang saat ini tidak tepat sasaran.

Bagi masyarakat kita yang kurang beruntung, yang rentan terhadap perubahan, pemerintah menyiapkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Asistensi Sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat. Pemerintah juga akan terus mendukung efektivitas dan keberlanjutan program Sistem Jaminan Sosial Nasional, baik Jaminan Kesehatan Nasional maupun Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Berbagai program itu merupakan jaring pengaman sosial agar saudara-saudara kita yang kurang beruntung, pada saat terjadi gejolak tidak mengalami penurunan tingkat kesejahteraan. Mereka harus tetap menjadi bagian dari pembangunan nasional yang produktif.

Saudara-saudara yang saya muliakan,

Sejalan dengan nafas Nawacita, Pemerintah saat ini terus mempercepat pembangunan infrastruktur. Kita bangun jalan tol yang tidak lama lagi akan menyambungkan Pulau Jawa, bahkan dalam beberapa tahun ke depan, akan terbentang di Pulau Sumatera. Kita bangun pula jalur kereta api di Sulawesi dan segera di Kalimantan dan Papua; kita bangun lebih banyak waduk; dan pelabuhan-pelabuhan untuk mendukung tol laut dengan tambahan banyak galangan kapal.

Di bidang energi, dalam sepuluh bulan ini, pemerintah sudah memulai membangun lebih banyak pembangkit listrik di berbagai pelosok Tanah Air. Sehingga dalam kurun waktu lima tahun ke depan, kita bisa penuhi kebutuhan listrik yang menopang kemajuan industri dan pencapaian rasio elektrifikasi yang

tinggi, guna menjamin pertumbuhan ekonomi bagi lompatan kemajuan bangsa kita.

Kita juga perbanyak pasar rakyat, agar menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, dan memberikan insentif fiskal bagi kegiatan ekonomi produktif. Sejalan dengan itu, Pemerintah juga mempercepat pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri di luar Pulau Jawa, khususnya untuk industri pertanian dan pertambangan.

Pemerintah juga mengupayakan agar beragam program aksi pembangunan itu dapat dikelola dengan mengedepankan kapasitas dan daya inovasi anak bangsa sendiri. Program aksi pembangunan itu, khususnya untuk ekonomi kreatif, harus bisa menjadi akses untuk perolehan lapangan kerja yang makin berkualitas, perbaikan kesejahteraan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi anak bangsa.

Hadirin sekalian yang saya muliakan

Saya ingin membuktikan bahwa kita tidak boleh lagi memungungi samudera dan laut. Laut kita yang terbentang luas, memiliki potensi ekonomi, potensi pertahanan, dan potensi persatuan. Lingkungan laut yang kini terancam oleh perubahan iklim perlu kita selamatkan. Kita juga harus melindungi laut kita dari ancaman keamanan seperti pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut. Kapal-kapal yang tertangkap harus menghadapi ketegasan kita, termasuk ditenggelamkan. Hukum internasional juga menentang pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut.

Salah satu agenda saya yang terpenting adalah mewujudkan tol laut. Tol laut yang menjadi bagian dari infrastruktur maritim akan dilengkapi dengan galangan-galangan kapal yang produktif. Insya Allah, kebijakan ini akan mendorong peningkatan ekonomi maritim yang berkesinambungan, kelestarian laut, dan tata ruang laut yang baik.

Seiring dengan itu, kita juga harus menggali lagi budaya maritim dan identitas maritim bangsa Indonesia. Kita harus mampu menunjukkan kepada dunia, bahwa

bangsa Indonesia adalah bangsa maritim. Bangsa yang menjaga dan mendayagunakan lautnya dengan penuh kesungguhan.

Itulah bagian awal dari upaya kita untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim yang tidak saja digagas untuk menciptakan ketahanan nasional tetapi juga ketahanan regional dan global. Strategi inilah yang tengah digodok dan akan dituangkan menjadi Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Guna mendorong penguatan ekonomi nasional melalui transformasi fundamental, Pemerintah mewajibkan penggunaan rupiah untuk transaksi di dalam negeri. Langkah ini untuk menunjukkan bahwa kita adalah Negara berdaulat. Transformasi ekonomi juga memerlukan topangan yang kuat dari bidang-bidang lain seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, dan penghargaan pada hak azasi manusia. Tanpa sinergi bidang-bidang tersebut, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan kokoh.

Seperti digariskan dalam UUD 1945, prinsip dasar politik luar negeri kita adalah bebas aktif. Prinsip ini menuntut Indonesia menentukan kebijakan politik luar negeri secara bebas, mandiri, dan tanpa beban aliansi. Indonesia ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk itu Indonesia akan terus mengirimkan pasukan perdamaian ke berbagai belahan dunia, menjadi penengah konflik, memberikan kepemimpinan dalam pembuatan norma-norma regional dan global.

Indonesia akan terus berkontribusi dan berperan dalam menciptakan keamanan di Asia Tenggara, serta memberikan kepemimpinan di Samudra Hindia, di mana Indonesia akan menjadi pemimpin Indian Ocean Rim Association pada 2015-2017. Indonesia juga terus mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan dan kedzaliman serta menyerukan agar saudara-saudara Muslim di Timur Tengah meletakkan senjata dan berdamai demi kepentingan ukhuwah Islamiyah.

Kita juga akan membangun kekuatan pertahanan Negara yang tangguh dengan memberdayakan alutsista produksi dalam negeri. Kita harus memiliki kekuatan pertahanan Negara yang tidak hanya sebatas kekuatan esensial minimum, namun kekuatan yang mampu mengamankan dan menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi sekitar 250 juta warganya. Kekuatan pertahanan yang kita bangun itu harus tetap menjunjung tinggi karakter negara dan bangsa Indonesia sebagai negara dan bangsa yang cinta damai.

Sejalan dengan itu, dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, Pemerintah mendorong sinergi KPK-POLRI-Kejaksaan Agung agar bahu membahu dalam bekerja dan menjadi pendorong pembangunan. Sinkronisasi dan harmonisasi antar lembaga penegak hukum terus ditingkatkan sehingga terbangun sistem hukum yang modern, yang menekankan aspek preventif dan fasilitatif.

Pemerintah juga telah membentuk Panitia Seleksi Pimpinan KPK yang terdiri dari para tokoh masyarakat yang kredibel, independen, dan berintegritas. Semoga terpilih pimpinan KPK yang amanah, yang dapat membawa lembaga anti-rasuah itu bekerja efektif, dan dapat bekerjasama dengan penegak hukum lainnya, membersihkan jubah Republik yang dikotori oleh korupsi.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Secara khusus saya ingin memberikan perhatian kepada tanah Papua. Pemerintah berkomitmen untuk membangun Papua dan menjadikan Papua sebagai Tanah Damai. Kerusuhan seperti kasus Tolikara, seharusnya tidak terjadi lagi di masa depan. Pemerintah memberikan akses bagi wartawan asing untuk masuk dan meliput di Papua.

Pemerintah juga berkomitmen untuk melindungi masyarakat adat yang menghadapi konflik agraria, menurunkan emisi karbon dengan menghentikan kebakaran hutan, mengelola hutan secara lestari, melindungi nelayan dari para pencuri ikan dari negara-negara lain, melindungi generasi mendatang dari ancaman bahaya narkoba, serta membentuk komite rekonsiliasi untuk pelanggaran HAM berat.



Saat ini Pemerintah sedang berusaha mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Air. Pemerintah menginginkan ada rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu. Anak-anak bangsa harus bebas menatap masa depan yang terbentang luas. Semua itu merupakan langkah awal pemerintah untuk menegakkan kemanusiaan di bumi Nusantara.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Di akhir pidato kenegaraan yang terhormat ini, saya ingin berterimakasih atas ketulusan, kesabaran, dan optimisme Saudara-saudara dan seluruh rakyat Indonesia, sehingga Pemerintah mempunyai ruang untuk melakukan transformasi fundamental perekonomian nasional.

Juga kepada beberapa perwakilan Saudara-saudara kita dari daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terdepan, pedalaman, dan para juara olimpiade sains dan teknologi, olah raga, dan lain-lain, atas prestasi dan dedikasinya yang luar biasa, yang ikut hadir bersama-sama kita di ruangan yang terhormat ini.

Kita membutuhkan lebih banyak lagi pejuang-pejuang pembangunan seperti Saudara-saudara, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas, Etos Kerja, dan semangat Gotong Royong. Untuk itu, pada hari ini saya menegaskan kembali perlunya gerakan nasional revolusi mental. Gerakan tersebut akan menyuburkan kembali nilai-nilai semangat juang, optimisme, kerja keras, kesantunan, tatakrama, dan memperkokoh karakter bangsa, serta memperkuat tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan dukungan tulus, kesabaran, dan sikap optimis seluruh rakyat Indonesia, Insya Allah transformasi fundamental ekonomi nasional yang dijalankan pemerintah pada saatnya akan berbuah manis.

Mengakhiri pidato ini, saya ingin mengingat pesan Bung Karno pada Sewindu Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1953;

"...kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja, kita bertujuan bernegara seribu windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya."

Untuk hidup sejahtera perlu kerja keras, butuh pengorbanan. AYO KERJA untuk bangsa! AYO KERJA untuk negara! AYO KERJA untuk rakyat!

Dirgahayu Republik Indonesia!

Terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

*Om Shanti Shanti Shanti Om,*

*Namo Buddhaya.*

Jakarta, 14 Agustus 2015

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**JOKO WIDODO**

**Lampiran 2** (Teks Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke-71 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DRI RI dan DPD RI, Jakarta, 16 Agustus 2016)

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

*Selamat pagi,*

*Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,*

*Om Swastiastu,*

*Namo Buddhaya*

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;

Yang saya hormati Bapak BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia Ketiga;

Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima;

Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno;

Yang saya hormati Bapak Boediono;

Yang saya hormati Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid;

Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Marilah kita bersama-sama bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya kita dapat menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-71 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Hadirin yang saya muliakan,

Kemerdekaan yang kita raih adalah jembatan untuk memakmurkan rakyat, untuk menegakkan keadilan, untuk membuat seluruh rakyat Indonesia meraih kemajuan bersama. Untuk mencapai semua itu, kita harus membangun. Bangunlah jiwanya! Bangunlah badannya! Dari Sabang sampai Merauke harus kita bangun. Dari Miangas hingga Rote harus kita bangun. Kita harus menjadi bangsa yang maju, Indonesia maju, bangsa yang berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Dalam Pidato Kenegaraan tahun lalu sudah saya sampaikan bahwa Kabinet Kerja berkehendak meletakkan fondasi pembangunan nasional yang kokoh pada tahun pertama pemerintahan. Paradigma pembangunan nasional kita ubah dari yang bersifat konsumtif menjadi produktif, dari yang bersifat Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris. Regulasi dan birokrasi juga kita perbaiki secara masif seiring dengan penerapan teknologi informasi dan telekomunikasi. Kita juga telah tetapkan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Tanah Air khususnya di desa-desa, di daerah-daerah pinggiran dan wilayah perbatasan guna memperkuat konektivitas nasional kita.

Berbekal pencapaian transformasi fundamental ekonomi tersebut, memasuki tahun kedua, Pemerintah bertekad melakukan percepatan pembangunan. Tahun 2016 ini dapat disebut sebagai Tahun Percepatan Pembangunan Nasional. Kita harus melangkah menuju Indonesia maju.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Percepatan pembangunan tersebut mutlak kita perlukan. Sudah 71 tahun Indonesia merdeka, kita belum mampu memutus rantai kemiskinan, memutus rantai pengangguran, memutus rantai ketimpangan dan kesenjangan sosial.

Setiap Presiden Republik Indonesia telah bekerja keras, telah membanting tulang, telah berjuang untuk mengatasi tiga tantangan tersebut di masanya masing-masing. Mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, sampai masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tantangan yang sama, juga sedang kita hadapi sekarang ini.

Perbedaannya, kita menghadapi tantangan tersebut di tengah tatanan baru dunia, di tengah era kompetisi global. Kompetisi tidak lagi terjadi antardaerah tetapi antarnegara, antarkawasan. Sebuah era dimana semua negara saling terhubung satu sama lain, satu masalah bisa menjadi masalah bagi negara-negara di dunia.

Sampai sekarang ekonomi global masih mengalami perlambatan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi nasional juga terpengaruh. Namun kita patut bersyukur bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan pertama tahun 2016 tumbuh 4,92 persen. Bahkan dalam triwulan kedua tahun ini, pertumbuhan ekonomi nasional naik menjadi 5,18 persen. Pertumbuhan ini jauh lebih besar di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia dan negara-negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan salah satu pertumbuhan yang tertinggi di Asia.

Sementara itu, tantangan politik dan keamanan global juga semakin berat dan semakin beragam. Fenomena pergolakan politik di Timur Tengah, misalnya, berdampak pada ketidakstabilan kawasan dan memicu perluasan aksi terorisme di dunia termasuk di Ibukota negara kita.

Masih segar dalam ingatan kita, pada tanggal 14 Januari 2016 di Jalan MH Thamrin, Jakarta, teroris mencoba menimbulkan kepanikan masyarakat. Namun mereka gagal. Bangsa Indonesia tidak bisa diteror. Modal persatuan kita sebagai sebuah bangsa sangat kuat.

Masyarakat dunia pun memuji kecepatan, respon, dan penanggulangan terorisme yang kita lakukan. Oleh karena itu saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus meneguhkan komitmen bersama mencegah dan melawan aksi terorisme. Mari kita tegaskan bahwa tidak ada tempat untuk terorisme di Nusantara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Hadirin yang saya muliakan,

Pada tahun percepatan pembangunan ini, Pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial. Ketiga langkah itu adalah: yang pertama, percepatan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, penyiapan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia. Ketiga, deregulasi dan debirokratisasi.

Melalui percepatan pembangunan infrastruktur, kita bangun sarana infrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial. Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan nasional dan jalan tol, jembatan, jalur kereta api tidak hanya di pulau Jawa tapi juga di Pulau Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan juga dibangun *Mass Rapid Transportation (MRT)*, *Light Rail Train (LRT)*, dan *commuter line*.

Pelabuhan, sebagai perwujudan program tol laut, dan juga bandara. Sedangkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis mencakup pembangkit listrik, waduk, telekomunikasi, dan perumahan rakyat.

Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut, baik infrastruktur logistik maupun infrastruktur strategis, tentu saja tidak melupakan kelestarian alam. Pemenuhan target rasio kelistrikan juga mengutamakan penggunaan energi baru dan terbarukan. Selain itu juga dilakukan percepatan pembangunan waduk dan embung untuk memperkuat program Ketahanan Air.

Bersamaan dengan pembangunan infrastruktur yang mengedepankan kelestarian alam itu, Pemerintah melakukan konservasi lahan gambut dan pencegahan

pembakarannya. Pemerintah tidak ada toleransi pada pelaku pembakaran lahan gambut dan hutan karena tindakan itu termasuk kejahatan kemanusiaan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Dalam percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah berkewajiban untuk membangun wilayah-wilayah yang marginal, wilayah-wilayah yang tertinggal dengan menggunakan dana APBN. Sedangkan daerah-daerah lain yang ekonominya menggeliat dan tumbuh, Pemerintah mendorong peran dunia usaha dan kerjasama dunia usaha dengan BUMN. Nilai investasi BUMN akan terus kita perbesar.

Selain itu, dengan dukungan DPR, Pemerintah melakukan terobosan dengan mengeluarkan aturan tentang Amnesti Pajak. Diharapkan basis penerimaan pajak menjadi semakin luas guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing nasional.

Hadirin yang saya hormati,

Di era kompetisi global, pembangunan infrastruktur fisik saja belum cukup untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial. Terlebih Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah dimulai yang berarti persaingan di Asia Tenggara akan semakin sengit.

Agar Indonesia bisa bersaing dalam kompetisi global maka pembangunan infrastruktur sosial, yaitu kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia (SDM) harus dipercepat. Dengan demikian Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam perlombaan ekonomi global, Indonesia harus menjadi ikut berlomba dan harus menjadi pemenang.

Terkait dengan itu, Pemerintah memandang penting untuk memperluas akses masyarakat pada kegiatan ekonomi produktif, dengan mendorong kemajuan dan produktifitas sektor UMKM. Sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Untuk itu, dalam dua tahun terakhir Pemerintah telah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) per tahun dari 22 persen

menjadi 12 persen pada tahun 2015, dan turun menjadi 9 persen pada tahun 2016. Pemerintah juga terus mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh KUR.

Sedangkan dalam rangka menyiapkan SDM menghadapi kompetisi global, Pemerintah memperkuat sistem pendidikan vokasional. Melalui pendidikan vokasional, kita dapat melahirkan angkatan kerja dengan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri. Di saat yang bersamaan, kita pastikan masyarakat usia produktif bisa lebih cepat mendapatkan pekerjaan.

Pemerintah juga terus mendorong terwujudnya hilirisasi penelitian dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia industri. Begitu juga sejumlah Sentra Teknologi dan Inovasi dibangun di tanah air untuk mendukung industrialisasi nasional. Sedangkan untuk mempercepat BUMN agar makin produktif dan menguat daya saingnya, Pemerintah mempersiapkan 'holdingisasi'.

Secara khusus Pemerintah Pusat mengapresiasi terobosan-terobosan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyiapan kapasitas produktif Indonesia. Termasuk kesigapan daerah dalam percepatan pelaksanaan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Sidang yang terhormat,

Tujuan Pemerintah membangun infrastruktur sosial khususnya pembangunan SDM adalah agar setiap insan Indonesia dapat mencapai potensi maksimalnya. Langkah ini dimulai dari pemenuhan nutrisi pada 1.000 hari pertama kehidupan.

Selanjutnya, dalam membangun manusia Indonesia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing, kita tingkatkan kualitas pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial.

Di sektor kesehatan, Program Indonesia Sehat yang memiliki tiga pilar. Pertama, penerapan paradigma sehat. Kedua, penguatan pelayanan kesehatan. Ketiga, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan data BPJS



Kesehatan per Juli 2016, peserta JKN sudah mencapai hampir 170 juta jiwa. Jumlah sarana pelayanan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan juga terus meningkat.

Di sektor pendidikan, sekarang ini sedang dilakukan percepatan pembagian Kartu Indonesia Pintar di seluruh pelosok Tanah Air. Perhatian Pemerintah terutama diberikan kepada anak usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu. Melalui KIP diberikan jaminan untuk mendapatkan layanan Pendidikan Dasar sampai Menengah, pendidikan formal dan non formal, termasuk untuk mendapatkan ketrampilan dari lembaga kursus/BLK.

Selain itu, juga sosialisasi nilai-nilai keutamaan dan pendidikan karakter pada anak didik. Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang mengabdikan di daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terdepan, dan wilayah-wilayah perbatasan.

Hadirin yang saya muliakan,

Sebagai katalisator pembangunan infrastruktur fisik dan sosial, Pemerintah berkomitmen melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Banyak regulasi kita sudah usang, sudah harus diperbaharui untuk menyongsong perubahan jaman.

Maka regulasi yang membingungkan harus disederhanakan, prosedur yang rumit harus dipangkas. Deregulasi dan debirokratisasi itu kita lakukan untuk memberikan kecepatan pelayanan, kepastian, sinkronisasi, kemudahan berinvestasi, serta meningkatkan produktivitas.

Wujud nyata adalah 12 Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dikeluarkan Pemerintah sampai dengan awal Juni 2016. Dari 12 Paket Ekonomi tersebut, dapat saya sampaikan bahwa 96 persen perangkat regulasinya sudah selesai disiapkan. Guna mempercepat manfaat dari Paket-Paket itu, telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan dan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi pada tanggal 28 Juni 2016. Ke depan, diupayakan pembentukan Paket Kebijakan Ekonomi lainnya guna mempercepat peningkatan ekonomi nasional.

Sebagai bagian dari deregulasi, Pemerintah telah mensinkronkan berbagai peraturan daerah (Perda) terkait perdagangan dan investasi. Lebih dari 3.000 Perda sudah dibatalkan karena tidak kondusif bagi kemajuan perdagangan dan kemudahan berusaha. Mencermati berbagai kesalahpahaman tentang pembatalan Perda, saya tegaskan dua hal. Pertama, sinkronisasi Perda dilakukan untuk kepentingan nasional, yang artinya termasuk kepentingan daerah. Sinkronisasi yang telah dilakukan akan membawa manfaat bagi daerah dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Kedua, Perda yang dibatalkan hanya terkait urusan perdagangan dan investasi.

Sinkronisasi dilakukan agar ada keselarasan, agar ada kesinambungan regulasi dari Undang-Undang Dasar 1945 dengan beragam regulasi di tingkat pusat hingga daerah. Tidak ada peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Semuanya harus berada di bawah konstitusi, di bawah kehendak rakyat.

Sidang yang saya hormati,

Agar terobosan-terobosan yang dilakukan di Tahun Percepatan Pembangunan mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran, dan menurunkan ketimpangan dan kesenjangan sosial, Pemerintah menaruh perhatian besar pada empat aspek strategis.

Aspek strategis pertama adalah mempercepat reformasi hukum untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta terus mendorong reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima. Bagian penting dari ini adalah reformasi dalam institusi Polri dan Kejaksaan. Reformasi yang menyeluruh dari hulu sampai hilir. Bukan reformasi tambal sulam atau parsial. Untuk itu profesionalisme Polri dan Kejaksaan terus ditingkatkan. Demikian pula kualitas Aparatur Sipil Negara terus ditingkatkan agar Negara kita semakin kompetitif.

Percepatan penggunaan Teknologi Informasi dalam sistem kerja Pemerintah juga terus dipercepat, sebagai bagian penting dari peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi, dan pencegahan praktik korupsi.

Selain itu dalam rangka terus menguatkan rasa keadilan, Pemerintah melakukan terobosan-terobosan dalam perlindungan terhadap kelompok marjinal. Bagi kalangan penyandang disabilitas, Pemerintah telah menargetkan lebih dari 55.000 orang penyandang disabilitas untuk menerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) di tahun 2016. Kemudian untuk membentengi anak dari perilaku kejahatan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016. Perppu ini menegaskan kejahatan terhadap anak digolongkan dalam kejahatan luar biasa dan butuh penanganan yang luar biasa.

Aspek strategis kedua adalah perombakan manajemen anggaran pembangunan. Berulang kali telah saya sampaikan bahwa kita harus meninggalkan paradigma lama, yaitu paradigma anggaran dibagi rata. Kita harus bekerja dengan paradigma baru, yaitu anggaran difokuskan untuk program-program prioritas. Esensinya adalah uang rakyat harus digunakan untuk kepentingan rakyat melalui program-program yang nyata, melalui kerja yang nyata, dan terasa manfaatnya bagi rakyat.

Sudah tidak bisa lagi anggaran pembangunan, uang rakyat, habis untuk kegiatan operasional birokrasi seperti perjalanan dinas dan anggaran rapat yang sebenarnya dapat di-efisienkan. Begitu pula tradisi lama penggunaan kalimat-kalimat yang bersayap pada nomenklatur penyusunan anggaran harus ditinggalkan karena berujung pada ketidakefisienan penggunaan dana pembangunan.

Aspek strategis ketiga adalah politik luar negeri. Dengan diplomasi yang kuat Pemerintah mempercepat peninjauan berbagai kerjasama perdagangan internasional dan mempertimbangkan partisipasi Indonesia di *Trans-Pacific Partnership Agreement* (TPPA), RCEP, dan lain-lainnya.

Kita juga terus mendorong penyelesaian konflik internasional secara damai. Seperti semangat yang kita bawa saat menyerukan ajakan toleransi dan

perdamaian dalam berbagai pertemuan dengan negara-negara Arab dan dengan Amerika Serikat. Baik itu melalui jalur dialog dan maupun penggunaan media sosial. Begitu pula Indonesia terus terlibat aktif dalam mendorong penyelesaian perselisihan di Laut Tiongkok Selatan melalui negosiasi dan upaya damai paska penetapan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag.

Kita juga mendorong penuntasan perang saudara di Suriah secara damai serta pemenuhan hak-hak kemerdekaan rakyat Palestina.

Seiring dengan itu, kita tingkatkan kualitas perlindungan WNI di luar negeri. Melalui diplomasi menyeluruh dari berbagai jalur, kita telah berhasil membebaskan 14 WNI yang disandera kelompok bersenjata di Filipina Selatan. Melalui diplomasi pula, 2 WNI yang disandera di Papua Nugini berhasil dibebaskan. Menyelesaikan kasus WNI di luar negeri yang mayoritas terkait TKI. Hingga akhir Juli 2016, tidak kurang dari 23.651 TKI difasilitasi pemulangannya melalui berbagai cara.

Sedangkan dalam rangka pemantapan kedaulatan, Pemerintah mengedepankan pembangunan daerah-daerah terdepan, daerah-daerah yang menjadi beranda Indonesia. Kita kembangkan daerah seperti Entikong, Natuna, dan Atambua agar dunia melihat bahwa Indonesia adalah negara besar dan setiap jengkal tanah airnya diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Aspek strategis keempat adalah demokrasi, stabilitas politik, dan keamanan. Bangsa ini tidak akan produktif, tidak akan maju, tidak akan menjadi bangsa pemenang apabila tidak menghargai hak asasi manusia dan terus didera gonjang-ganjing politik. Energi kita sebagai bangsa akan habis untuk meredakan keriuhan politik daripada melakukan lompatan-lompatan kemajuan.

Kita bersyukur sekarang ini kerjasama politik sudah kondusif dan konsolidasi politik menjadi semakin matang. Berbagai proses pengambilan keputusan politik dan pengesahan beragam produk hukum terlaksana secara demokratis.

Kita juga bersyukur Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 secara umum berlangsung aman, tertib dan damai. Semua terlaksana dengan tradisi demokrasi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selanjutnya, Pemerintah bersama DPR-RI dan DPD-RI terus melakukan upaya perbaikan regulasi Pilkada, agar dapat terlaksana secara lebih baik untuk Pilkada serentak tahun 2017 dan Pilkada-pilkada selanjutnya.

Sementara itu, kedaulatan bangsa dan keamanan masyarakat terus terjaga karena TNI dan Polri terus siaga dan tak pernah berhenti mengabdikan. Pemerintah terus berupaya meningkatkan profesionalisme TNI dan Polri dengan pendekatan kesejahteraan dan modernisasi persenjataan. Pemerintah juga mendukung kemandirian industri dalam negeri untuk memasok alutsista TNI dan alat operasional Polri.

Secara khusus saya ingin mengapresiasi keberhasilan TNI dan Polri yang sudah melumpuhkan salah satu pemimpin kelompok teroris di Indonesia, yaitu Santoso. Tetap waspada dan terus tekan potensi dan ancaman terorisme di Nusantara.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Kita hanya dapat membuat terobosan bagi kemajuan bangsa dan negara kalau pola pikir kita progresif, optimis, dan inovatif. Untuk itu Pemerintah terus menjalankan proses Revolusi Karakter Mental, yaitu perubahan pola pikir dan perubahan sistem yang dimulai dari berbagai institusi pemerintahan.

Selama ini kita terkungkung oleh sikap pesimis dan tidak sadar bahwa sebagian dari hambatan kemajuan Indonesia justru datang dari diri kita sendiri. Padahal Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang pernah menginspirasi negara-negara yang terjajah untuk merdeka, bangsa yang memberikan Pancasila, memberikan Trisakti, memberikan nilai-nilai gotong royong untuk dunia. Oleh sebab itu, kita harus percaya diri, harus yakin, bahwa kita bisa menjadi bangsa pemenang.

Hadirin yang saya muliakan,

Di akhir Pidato Kenegaraan di depan Sidang Terhormat, saya mengajak segenap elemen bangsa untuk bersinergi mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, serta mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial. Tanpa kerjasama, tanpa gotong royong, kita akan digulung oleh arus sejarah. Kita tidak menginginkan itu.

Oleh sebab itu, apapun bidang yang saudara-saudara geluti, jadilah yang terbaik. Dengan kerja nyata bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang, dengan Kerja nyata bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa maju, menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berbudaya. Sekarang ini biduk kita sedang berlayar menuju ke sana. Menuju kemajuan Indonesia Raya!

Dirgahayu Republik Indonesia!

Dirgahayu Negeri Pancasila!

Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

*Om Shanti Shanti Shanti Om,*

*Namo Buddhaya.*

Jakarta, 16 Agustus 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

**(Humas Setkab)**

No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis		
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik		Ekonomi	Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
1.	Kemerdekaan yang kita raih adalah jembatan untuk memakmurkan rakyat, untuk menegakkan keadilan, untuk membuat seluruh rakyat Indonesia meraih kemajuan bersama.	√		memakmurkan	Teks Pidato Kenegaraan tersebut dibuat atas ide-ide yang berasal dari Presiden Joko Widodo yang kemudian dijabarkan oleh Kementerian Kesekretariatan Negara hingga akhirnya disetujui kembali oleh Presiden. Dalam pidato kenegaraan tahun 2015, ide-ide tersebut berkaitan dengan	Wujud bahwa “kemerdekaan yang telah diraih adalah jembatan untuk memakmurkan rakyat, untuk menegakkan keadilan, untuk membuat seluruh rakyat Indonesia meraih kemajuan bersama” adalah bahwa dengan diraihnya kemerdekaan tersebut membuat Indonesia bebas melakukan hal-hal di atas tanpa dikuasai oleh pihak asing.					√	Kosakata “memakmurkan” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu keadaan yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, memakmurkan dimaknai dengan suatu tindakan untuk membuat rakyat Indonesia berada dalam keadaan makmur, atau serba kecukupan. Sementara itu, kemajuan dimaknai dengan suatu keadaan dimana seluruh rakyat Indonesia menjadi lebih maju atau lebih berkembang. Oleh karena itu, kalimat tersebut mengandung ideologi sosial budaya.
2.	Untuk mencapai semua itu, kita harus membangun.		√	Kita harus membangun	situasi-situasi yang terjadi di Indonesia dan juga program-program yang dilakukan oleh pemerintah pada masa jabatannya. Ide-ide yang terdapat dalam pidato tersebut berkaitan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang dialami Indonesia. Ide-ide yang berkaitan dengan kondisi sosial	Wujud bahwa “kita harus membangun untuk mencapai semua itu” adalah banyaknya pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah demi memakmurkan rakyat, menegakkan keadilan, dan untuk membuat seluruh rakyat Indonesia meraih kemajuan bersama.		√				Bentuk gramatikal “kita harus membangun” dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh seorang presiden atas dasar kekuasaan. Dalam konteks ini, bentuk gramatikal “kita harus membangun” dimaknai dengan bahwa semua rakyat Indonesia, juga Presiden dan pejabat-pejabat negeri ini harus membangkitkan negeri Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat, untuk menegakkan keadilan, dan untuk membuat seluruh rakyat Indonesia meraih kemajuan bersama. Sehingga, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi kekuasaan.
3.	Bangunlah jiwanya!		√	Bangunlah jiwanya!	ide yang berkaitan dengan kondisi sosial	Wujud bahwa jiwa Indonesia telah dibangun		√				Bentuk gramatikal “bangunlah jiwanya!” dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah pernyataan

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
					antara lain, memakmurkan rakyat, membangun bangsa dan negara, membangun jiwa Indonesia, membangun badan Indonesia, pendidikan vokasional, Program Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, kesejahteraan guru, perlindungan terhadap kelompok marjinal, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat, dan perlindungan WNI. Ide-ide yang berkaitan dengan kondisi ekonomi antara lain	adalah adanya usaha untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku agar berorientasi pada kemajuan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan kompetitif.						yang diungkapkan oleh seorang presiden atas dasar kekuasaan. Dalam konteks ini, “bangunlah jiwanya!” dimaknai dengan membangun atau membangkitkan jiwa nasionalisme atau jiwa bangsa Indonesia yang terletak pada tiap-tiap warga Indonesia. Sehingga, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi kekuasaan.
4.	Bangunlah badannya!		√	Bangunlah badannya!	adalah pembangunan Indonesia adalah pembangunan Miangas-Rote, paradigma pembangunan, pembangunan infrastruktur, transformasi fundamental ekonomi,	Wujud bahwa Indonesia telah membangun badannya adalah banyaknya program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah demi memajukan negara Indonesia.		√				Bentuk gramatikal “bangunlah badannya!” dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh seorang presiden atas dasar kekuasaan. Dalam konteks ini, “bangunlah badannya!” dimaknai dengan membangun atau membangkitkan badan atau raga setiap warga Indonesia agar melaksanakan tugas atau masing-masing sebagai setiap warga Indonesia. Sehingga, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi kekuasaan.
5.	Dari Sabang sampai Merauke harus kita bangun.		√	Dari Sabang sampai Merauke harus kita bangun	adalah pembangunan Sabang-Merauke, pembangunan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) di Saboi, Sabang, Aceh, dengan daya listrik yang dihasilkan mencapai sekitar 80 Mega		√					Bentuk gramatikal “dari Sabang sampai Merauke harus kita bangun” dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh seorang presiden atas dasar kekuasaan. Dalam konteks ini, “dari Sabang sampai Merauke harus kita bangun” dimaknai dengan sebuah seruan yang diucapkan oleh Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembangunan secara merata, dari ujung ke ujung wilayah Indonesia, dari barat sampai timur



No.	Data	Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
					tahun percepatan pembangunan nasional, percepatan pembangunan, pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial, peraturan Amnesti Pajak, UMKM, Paket Kebijakan Ekonomi, manajemen anggaran pembangunan, dan anggaran pembangunan. Sementara itu, ide-ide yang berkaitan dengan kondisi politik adalah menjadikan bangsa	Watt (MW). Sementara itu, pembangunan di Merauke salah satunya diwujudkan dengan adanya Trans Papua yang memudahkan perjalanan dari Jayapura menuju Merauke.						Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Sehingga, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi kekuasaan.
6.	Dari Miangas hingga Rote harus kita bangun.		√	Dari Miangas hingga Rote harus kita bangun	Indonesia sebagai bangsa yang maju, regulasi dan birokrasi, komitmen mencegah dan melawan terorisme, peraruran daerah, reformasi hukum, politik luar negeri, diplomasi, demokrasi,	Wujud dari adanya pembangunan di Miangas adalah dibangunnya Bandara Miangas yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Sementara itu, wujud dari adanya pembangunan di Rote salah satunya adalah Jembatan Layang Pulau Usu-Rote.		√				Bentuk gramatikal “dari Miangas hingga Rote harus kita bangun” dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh seorang presiden atas dasar kekuasaan. Dalam konteks ini, “dari Sabang sampai Merauke harus kita bangun” dimaknai dengan sebuah seruan yang diucapkan oleh Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembangunan secara merata, dari ujung ke ujung wilayah Indonesia, dari barat sampai timur Indonesia, yaitu dari Miangas hingga Rote. Sehingga, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi kekuasaan.
7.	Kita harus menjadi bangsa yang maju, Indonesia maju, bangsa yang berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.		√	kita harus menjadi bangsa yang maju, Indonesia maju, bangsa yang berdiri sejajar dengan bangsa-	Indonesia sebagai bangsa yang maju, regulasi dan birokrasi, komitmen mencegah dan melawan terorisme, peraruran daerah, reformasi hukum, politik luar negeri, diplomasi, demokrasi,	Wujud bahwa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia salah satunya adalah kini Indonesia duduk sejajar dengan negara-negara maju di Forum G-20. Forum G-20 merupakan		√				Bentuk gramatikal “kita harus menjadi bangsa yang maju, Indonesia maju, bangsa yang berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia” dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh seorang presiden atas dasar kekuasaan. Dalam konteks ini, ungkapan Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa “kita harus menjadi bangsa yang maju, Indonesia maju, bangsa yang berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di

No.	Data	Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
				bangsa lain di dunia	stabilitas politik, keamanan, PILKADA, kedaulatan bangsa, Revolusi Karakter Mental, dan kerja nyata.	sebuah kelompok 20 Ekonomi Utama yang memiliki arti kelompok 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Secara resmi G-20 dinamakan The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors atau Kelompok Duapuluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Dalam forum ini, Indonesia berada di posisi ke-10 keanggotaan forum.						dunia” dimaknai sebagai sebuah himbauan bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju dan berada pada kedudukan yang sama dengan bangsa-bangsa maju lain di dunia. Sehingga, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi kekuasaan.
8.	Paradigma pembangunan nasional kita ubah dari yang bersifat konsumtif menjadi produktif, dari yang bersifat Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris.	√		Paradigma pembangunan		Wujud bahwa paradigma pembangunan telah berubah dari Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris dapat ditemukan pada pernyataan yang dikemukakan oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Rosita				√		Kosakata “paradigma pembangunan” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah pandangan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian di Indonesia. Dalam konteks ini, kosakata “paradigma pembangunan” dimaknai dengan suatu cara pandang tentang persoalan pembangunan yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pembangunan baik pembangunan dalam arti sebagai proses maupun sebagai metode yang bertujuan untuk mencapai peningkatan kualitas kehidupan manusia dan kesejahteraan

No.	Data		Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						<p>Niken Widiastuti usai pagelaran wayang kulit dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional di alun-alun Rembang, Kamis (18 Mei 2017) malam. Beliau menyatakan bahwa kini pembangunan di Indonesia tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa saja, tetapi juga di pulau-pulau lain termasuk daerah perbatasan. Jika sebelumnya yang bisa merasakan transportasi kereta api hanya pulau Jawa, saat ini Sulawesi dan Sumatera juga mulai dibangun kereta api dan tol laut. Hal itu merupakan suatu upaya pemerataan pembangunan infrastruktur. Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa pemerintah juga terus berupaya melakukan pemerataan kesejahteraan masyarakat.</p>						<p>rakyat Indonesia. Dalam hal ini, terdapat perubahan paradigma, dari konsumtif menjadi produktif, dan dari Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris. Hal ini berarti bahwa pembangunan tidak lagi hanya berpusat di Pulau Jawa, tetapi disebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.</p>

No.	Data Kalimat	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis		
		Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik		Ekonomi	Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
9.	Regulasi dan birokrasi juga kita perbaiki secara masif seiring dengan penerapan teknologi informasi dan telekomunikasi.	√		birokrasi		Wujud bahwa regulasi dan birokrasi telah diperbaiki secara masif seiring dengan penerapan teknologi informasi dan telekomunikasi adalah adanya pebisnis dari Amerika Serikat yang mengapresiasi perbaikan regulasi di Indonesia. Perbaikan regulasi tersebut kelancaran dan kemudahan dalam bisnis dan investasi di Indonesia.			√			Kosakata “birokrasi” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah gagasan yang berkaitan dengan pemerintahan. Dalam konteks ini, “regulasi” dimaknai dengan sebuah pengaturan. Sementara itu, “birokrasi” dimaknai dengan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi politik.
10.	Kita juga telah tetapkan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Tanah Air khususnya di desa-desa, di daerah-daerah pinggiran dan wilayah perbatasan guna memperkuat konektivitas nasional kita.	√		Pembangunan infrastruktur		Wujud bahwa pemerintah telah menetapkan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Tanah Air khususnya di desa-desa, di daerah-daerah pinggiran dan wilayah perbatasan guna memperkuat konektivitas nasional adalah adanya gagasan pemerintah tentang paradigma pembangunan di Indonesia, dari Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris, yang				√		Kosakata “pembangunan infrastruktur” dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian. Dalam konteks ini, “pembangunan infrastruktur” dimaknai dengan pembangunan prasarana di Indonesia menjadi lebih baik dan lebih layak lagi. Pembangunan infrastruktur diterapkan di seluruh pelosok Tanah Air, khususnya di desa-desa, di daerah-daerah pinggiran dan wilayah perbatasan guna memperkuat konektivitas nasional Indonesia. Konektivitas nasional merupakan suatu keadaan dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.

No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis		
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik		Ekonomi	Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
					merupakan suatu gagasan agar pembangunan dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah pelosok Indonesia.							
11.	Berbekal pencapaian transformasi fundamental ekonomi tersebut, memasuki tahun kedua, Pemerintah bertekad melakukan percepatan pembangunan.	√		Transformasi fundamental ekonomi	Wujud bahwa Pemerintah bertekad melakukan percepatan pembangunan adalah Pemerintah menjadikan tahun 2016 sebagai Tahun Percepatan Pembangunan Nasional.				√		Kosa kata “transformasi fundamental ekonomi” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah gagasan mengenai perekonomian Indonesia. Dalam konteks ini, “transformasi fundamental ekonomi” dimaknai dengan suatu gagasan yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015. Pada tahun 2016, transformasi fundamental ekonomi tersebut memasuki tahun kedua, dan pada saat itu Pemerintah bertekad untuk melakukan percepatan pembangunan. Sehingga kalimat tersebut mengandung ideologi ekonomi.	
12.	Tahun 2016 ini dapat disebut sebagai Tahun Percepatan Pembangunan Nasional.		√	tahun 2016 ini dapat disebut sebagai Tahun Percepatan Pembangunan Nasional	Wujud bahwa tahun 2016 dapat disebut sebagai Tahun Percepatan Pembangunan Nasional salah satunya adalah keputusan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mendorong percepatan pembangunan Kawasan Industri Konawe di				√		Bentuk gramatikal “tahun 2016 ini dapat disebut sebagai Tahun Percepatan Pembangunan Nasional” pada kalimat tersebut menunjukkan sebuah keadaan di Indonesia yang terjadi akibat pengaruh dari kepemimpinan. Dalam konteks ini, tahun 2016 sebagai tahun percepatan pembangunan nasional dimaknai dengan sebuah tekad pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan. Hal ini merupakan program di tahun kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf	

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						Sulawesi Tenggara dan Kawasan Morowali di Sulawesi Tengah, pada 11 Januari 2017.						Kalla. Oleh karena itu, kalimat tersebut mengandung ideologi hegemoni.
13.	Kita harus melangkah menuju Indonesia maju.		√	Kita harus melangkah menuju Indonesia maju.		Wujud bahwa Indonesia harus melangkah menuju Indonesia maju adalah dengan majunya negara Indonesia, maka tujuan Pemerintah untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia akan tercapai.		√				Bentuk gramatikal “kita harus melangkah menuju Indonesia maju” dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh seorang presiden atas dasar kekuasaan. Dalam konteks ini, pernyataan Presiden Joko Widodo “kita harus melangkah menuju Indonesia maju” dimaknai sebagai sebuah himbauan dari seorang presiden kepada seluruh rakyatnya untuk terus memajukan Indonesia dan tidak hanya diam saja. Sehingga, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi kekuasaan.
14.	Percepatan pembangunan tersebut mutlak kita perlukan.	√		Percepatan pembangunan		Wujud bahwa Indonesia secara mutlak memerlukan percepatan pembangunan adalah saat ini, Indonesia sedang melangkah untuk menjadi negara maju. Salah satu cara untuk menjadi negara maju tersebut adalah dengan diadakannya percepatan pembangunan.				√		Kosakata “percepatan pembangunan” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah tindakan yang berkaitan dengan perekonomian. Dalam konteks ini, “percepatan pembangunan” dimaknai sebagai sebuah kebijakan untuk mempercepat selesainya pembangunan-pembangunan di Indonesia yang secara mutlak diperlukan oleh Indonesia. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.
15.	Bangsa Indonesia tidak bisa diteror.		√	Bangsa Indonesia tidak bisa		Dalam hal ini, tidak bisa diterornya Bangsa Indonesia belum dapat		√				Bentuk gramatikal “bangsa Indonesia tidak bisa diteror” merupakan sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh seorang presiden atas dasar

No.	Data		Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
				diteror.		diwujudkan karena sampai pada bulan Mei 2017 masih ada teror-teror yang terjadi di Indonesia, seperti ledakan yang terjadi di Kampung Melayu.						kekuasaan. Dalam konteks ini tidak bisa diterornya bangsa Indonesia dimaknai dengan sebuah pernyataan dari Presiden Joko Widodo bahwa Bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang bisa diteror. Sehingga, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi kekuasaan.
16.	Oleh karena itu saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus meneguhkan komitmen bersama mencegah dan melawan aksi terorisme.	√		mengajak		Wujud bahwa Presiden Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus meneguhkan komitmen bersama mencegah dan melawan aksi terorisme adalah saat itu, Presiden Joko Widodo menghimbau masyarakat Indonesia untuk mencegah dan melawan aksi terorisme. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga berkali-kali menyampaikan tentang cara mengatasi terorisme di dunia, termasuk di Indonesia.		√				Kosakata “mengajak” yang terdapat dalam kalimat tersebut merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang presiden atas dasar kekuasaan. Dalam konteks ini, ajakan dari Presiden Joko Widodo untuk terus meneguhkan komitmen bersama mencegah dan melawan aksi terorisme dimaknai dengan suatu himbuan atau seruan kepada seluruh rakyat Indonesia agar tidak takut pada teror dan agar terus bersama-sama mencegah dan melawan aksi terorisme. Hal ini disampaikan oleh seorang presiden kepada rakyatnya agar semua rakyatnya menuruti perkataannya dan tunduk kepada presiden atas dasar kekuasaan. Sehingga, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi kekuasaan.
17.	Mari kita tegaskan bahwa tidak ada tempat untuk terorisme di Nusantara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.		√	Mari kita tegaskan		Dalam hal ini, penegasan atas tidak adanya tempat untuk terorisme di Nusantara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika belum		√				Bentuk gramatikal “mari kita tegaskan” yang terdapat dalam kalimat tersebut merupakan sebuah seruan yang diungkapkan oleh seorang presiden atas dasar kekuasaan. Dalam konteks ini, ungkapan “mari kita tegaskan” dimaknai sebagai himbuan

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						terwujud karena sampai pada bulan Mei 2017, aksi terorisme masih terjadi di Indonesia.						atau seruan dari Presiden Joko Widodo kepada seluruh rakyatnya untuk menegaskan bahwa tidak ada tempat untuk terorisme di Nusantara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, atau di Indonesia. Sehingga, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi kekuasaan.
18.	Pada tahun percepatan pembangunan ini, Pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial.	√		Percepatan pembangunan		Wujud bahwa pada tahun percepatan pembangunan ini, Pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial adalah sampai pada tahun 2017, banyak program yang dijalankan oleh pemerintah yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial.				√		Kosakata “percepatan pembangunan”, yang terdapat dalam kalimat tersebut berkaitan dengan perekonomian Indonesia. Dalam konteks ini, “percepatan pembangunan” dimaknai dengan upaya sadar untuk mempercepat pembangunan. Dalam hal ini, percepatan pembangunan tersebut terfokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.
19.	Ketiga langkah itu adalah: yang pertama, percepatan pembangunan infrastruktur.		√	Percepatan pembangunan infrastruktur		Wujud bahwa percepatan pembangunan infrastruktur merupakan langkah pertama untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial adalah				√		Bentuk gramatikal “percepatan pembangunan infrastruktur” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah tindakan yang berkaitan dengan perekonomian. Dalam konteks ini, “percepatan pembangunan infrastruktur” dimaknai dengan upaya sadar untuk mempercepat pembangunan prasarana. Hal ini merupakan



No.	Data		Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						<p>pembangunan infrastruktur dianggap merupakan sektor prioritas yang harus memperoleh perhatian dalam rangka mengatasi kemiskinan. Bagi para investor atau pelaku pasar termasuk para arsitek pembangunan, core value daya saing suatu negara dalam menarik investasi diukur dari daya tarik dan kinerja infrastruktur, baik infrastruktur dasar, sains, maupun infrastruktur teknologi. Miskin dan rentannya infrastruktur suatu negara berdampak terhadap kehidupan suatu masyarakat. Hal ini dapat dipahami karena kebijakan infrastruktur memberikan dampak positif terhadap percepatan pertumbuhan. Selanjutnya strategi infrastruktur dapat memacu pertumbuhan sosial ekonomi dan mengentaskan</p>						<p>langkah pertama dari terobosan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.</p>

No.	Data		Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
20.	Yang kedua, penyiapan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia.		√	Penyiapan kapasitas produktif		kemiskinan. Wujud bahwa penyediaan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia sebagai langkah kedua untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial adalah jika Indonesia memiliki masyarakat atau Sumber Daya Manusia yang produktif, maka angka kemiskinan di Indonesia akan berkurang sehingga masalah kemiskinan dapat diatasi.				√		Bentuk gramatikal “penyiapan kapasitas produktif” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah gagasan yang berkaitan dengan perekonomian. Dalam konteks ini, “penyiapan kapasitas produktif” dimaknai dengan proses atau cara untuk menyiapkan keluaran maksimum yang produktif dan sumber daya manusia. Hal ini merupakan langkah kedua dari terobosan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.
21.	Ketiga, deregulasi dan debirokratisasi.	√		debirokratisasi		Wujud bahwa deregulasi dan debirokratisasi sebagai langkah ketiga dalam usaha untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial adalah dengan adanya deregulasi dan debirokratisasi maka hal itu akan memudahkan masyarakat Indonesia			√			Kosakata “debirokratisasi” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah gagasan yang berkaitan dengan pemerintahan. Dalam konteks ini, “deregulasi” dimaknai sebagai kegiatan atau proses menghapuskan pembatasan dan peraturan. Sementara itu, “debirokratisasi” dimaknai sebagai penghapusan atau pengurangan hambatan yang terdapat di sistem birokrasi. Hal ini merupakan langkah ketiga dari terobosan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial. Oleh karena

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						sehingga ke depaannya masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial dapat diantisipasi.						itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi politik.
22.	Melalui percepatan pembangunan infrastruktur, kita bangun sarana infrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial.		√	melalui percepatan pembangunan infrastruktur		Wujud bahwa melalui percepatan pembangunan infrastruktur, kita bangun sarana infrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial adalah banyaknya pembangunan-pembangunan yang dilakukan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Pembangunan-pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan dalam berbagai macam bidang, seperti pendidikan, transportasi, fasilitas umum, dan lain-lain.				√		Bentuk gramatikal “melalui percepatan pembangunan infrastruktur” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah tindakan yang berkaitan dengan perekonomian. Dalam konteks ini, “melalui percepatan pembangunan infrastruktur” dimaknai dengan upaya sadar untuk mempercepat pembangunan prasarana sebagai jembatan untuk membangun sarana infrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.

No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks		Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal								
23.	Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan nasional dan jalan tol, jembatan, jalur kereta api tidak hanya di pulau Jawa tapi juga di Pulau Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan juga dibangun <i>Mass Rapid Transportation</i> (MRT), <i>Light Rail Train</i> (LRT), dan <i>commuter line</i> .		√	Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik	Wujud bahwa akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan nasional dan jalan tol, jembatan, jalur kereta api tidak hanya di pulau Jawa tapi juga di Pulau Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan juga dibangun <i>Mass Rapid Transportation</i> (MRT), <i>Light Rail Train</i> (LRT), dan <i>commuter line</i> adalah sampai tahun 2017 ini, pembangunan infrastruktur logistik tersebut masih dalam proses pengerjaan.				√	Bentuk gramatikal “akselerasi pembangunan infrastruktur logistik” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah tindakan yang berkaitan dengan perekonomian. Dalam konteks ini, “akeselerasi pembangunan infrastruktur logistik” dimaknai dengan percepatan pembangunan ifrastruktur logistik, yang meliputi jalan nasional dan jalan tol, jembatan, jalur kereta api tidak hanya di pulau Jawa tapi juga di Pulau Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan juga dibangun <i>Mass Rapid Transportation</i> (MRT), <i>Light Rail Train</i> (LRT), dan <i>commuter line</i> . Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.	
24.	Sedangkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis mencakup pembangkit listrik, waduk, telekomunikasi, dan perumahan rakyat.		√	akselerasi pembangunan infrastruktur strategis	Wujud bahwa akselerasi pembangunan infrastruktur strategis mencakup pembangkit listrik, waduk, telekomunikasi, dan perumahan rakyat adalah dibangunnya pembangkit listrik di daerah yang belum dialiri arus listri, juga pembangunan waduk dan perumahan rakyat di				√	Bentuk gramatikal “akselerasi pembangunan infrastruktur strategis” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah tindakan yang berkaitan dengan perekonomian. Dalam konteks ini, “akselerasi pembangunan infrastruktur strategis” dimaknai dengan percepatan infrastruktur strategis, yang meliputi pembangkit listrik, waduk, telekomunikasi, dan perumahan rakyat. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.	

No.	Kalimat	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis		
		Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik		Ekonomi	Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
25.	Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut, baik infrastruktur logistik maupun infrastruktur strategis, tentu saja tidak melupakan kelestarian alam.		√	Percepatan pembangunan infrastruktur		daerah-daerah di Indonesia. Wujud bahwa percepatan pembangunan infrastruktur tersebut, baik infrastruktur logistik maupun infrastruktur strategis, tentu saja tidak melupakan kelestarian alam adalah banyaknya usaha-usaha untuk tetap melestarikan alam Indonesia dalam bentuk himbauan atau ajakan dari Presiden Joko Widodo untuk gotong royong menjaga alam Indonesia dan alam Nusantara yang penuh dengan keanekaragaman hayatinya.				√		Bentuk gramatikal “percepatan pembangunan infrastruktur” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah tindakan yang berkaitan dengan perekonomian. Dalam konteks ini, “percepatan pembangunan infrastruktur” dimaknai dengan upaya sadar untuk mempercepat pembangunan prasarana, baik logistik maupun strategis, tidak melupakan kelestarian alam. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.
26.	Pemenuhan target rasio kelistrikan juga mengutamakan penggunaan energi baru dan terbarukan.	√		Pemenuhan target		Wujud bahwa pemenuhan target rasio kelistrikan juga mengutamakan penggunaan energi baru dan terbarukan adalah adanya target pemerintah untuk tahun 2019 nanti bahwa rasio elektrifikasi menjadi 100. Pembangunan tersebut				√		Kosakata “pemenuhan target” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah gagasan yang berkaitan dengan perekonomian. Dalam konteks ini. “pemenuhan target” dimaknai dengan proses atau cara untuk memenuhi target rasio kelistrikan juga mengutamakan penggunaan energi baru dan terbarukan. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.

No.	Data	Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						direncanakan akan menggunakan energi baru dan terbaukan, salah satunya seperti panas bumi.						
27.	Selain itu juga dilakukan percepatan pembangunan waduk dan embung untuk memperkuat program Ketahanan Air.	√		Percepatan pembangunan		Wujud bahwa dilakukannya percepatan pembangunan waduk dan embung untuk memperkuat program Ketahanan Air adalah banyaknya waduk dan bendungan yang dibangun di Indonesia sampai tahun 2017 dengan tujuan untuk memperkuat program Ketahanan Air				√		Kosakata “percepatan pembangunan” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah tindakan yang berkaitan dengan perekonomian. Dalam konteks ini, “percepatan pembangunan” dimaknai dengan upaya sadar untuk mempercepat pembangunan. Dalam hal ini, percepatan tersebut dilakukan dalam pembangunan waduk dan embung untuk memperkuat program ketahanan air. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.
28.	Bersamaan dengan pembangunan infrastruktur yang mengedepankan kelestarian alam itu, Pemerintah melakukan konservasi lahan gambut dan pencegahan pembakarannya.	√		Pembangunan infrastruktur		Wujud bahwa Pemerintah melakukan konservasi lahan gambut dan pencegahan pembakarannya adalah adanya tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyediakan pengajuan tanah pengganti atau land swap sebagai pengganti lahan gambut. Selain itu, pemerintah juga sering kali				√		Kosakata “pembangunan infrastruktur” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah tindakan yang berkaitan dengan perekonomian. Dalam konteks ini, “pembangunan infrastruktur” dimaknai dengan pembangunan prasarana di Indonesia menjadi lebih baik dan lebih layak lagi. Kalimat ini menyatakan bahwa Pemerintah melakukan konservasi lahan gambut dan pencegahan pembakarannya berbarengan dengan pembangunan infrastruktur yang mengedepankan kelestarian alam. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.

No.	Data Kalimat	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis		
		Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik		Ekonomi	Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
					membuat seruan untuk mencegah pembakaran hutan.							
29.	Pemerintah tidak ada toleransi pada pelaku pembakaran lahan gambut dan hutan karena tindakan itu termasuk kejahatan kemanusiaan.		√	Pemerintah tidak ada toleransi	Wujud bahwa Pemerintah tidak ada toleransi pada pelaku pembakaran lahan gambut dan hutan karena tindakan itu termasuk kejahatan kemanusiaan adalah pelaku pembakaran lahan gambut dan hutan akan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,00 serta jika perlaku pembakaran hutan itu adalah suatu perusahaan, maka hak izin perusahaan itu akan dicabut.		√				Bentuk gramatikal “pemerintah tidak ada toleransi” yang terdapat dalam kalimat tersebut merupakan sebuah tindakan yang diambil oleh pemerintah atas dasar kekuasaan. Dalam konteks ini, “pemerintah tidak ada toleransi” dimaknai sebagai keputusan pemerintah untuk tidak memberikan toleransi pada pelaku pembakaran lahan gambut dan hutan karena tindakan tersebut termasuk kejahatan kemanusiaan. Sehingga, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi kekuasaan.	
30.	Dalam percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah berkewajiban untuk membangun wilayah-wilayah yang marginal, wilayah-wilayah yang tertinggal dengan menggunakan dana APBN.	√		Percepatan pembangunan	Wujud bahwa dalam percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah berkewajiban untuk membangun wilayah-wilayah yang marginal, wilayah-wilayah yang tertinggal dengan				√		Kosakata “percepatan pembangunan” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah tindakan yang berkaitan dengan perekonomian. Dalam konteks ini, “percepatan pembangunan” dimaknai dengan upaya sadar untuk mempercepat pembangunan. Dalam hal percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah memiliki kewajiban untuk membangun wilayah-wilayah	

No.	Data		Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						menggunakan dana APBN adalah pada tahun 2017, sejumlah lima daerah tertinggal di Indonesia mendapatkan fokus penanganan lintas sektor. Penentuan lima kabupaten daerah tertinggal tersebut sebagai lokasi terintegrasi dengan mempertimbangkan strategis, serta memperhatikan karakteristik wilayah yang antara lain merupakan kawasan perbatasan, rawan bencana, rawan konflik, rawan pangan dan daerah kepulauan.						yang marginal, wilayah-wilayah yang tertinggal dengan menggunakan dana APBN. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.
31.	Sedangkan daerah-daerah lain yang ekonominya menggeliat dan tumbuh, Pemerintah mendorong peran dunia usaha dan kerjasama dunia usaha dengan BUMN.	√		ekonomi		Wujud bahwa daerah-daerah lain yang ekonominya menggeliat dan tumbuh, Pemerintah mendorong peran dunia usaha dan kerjasama dunia usaha dengan BUMN adalah pemerintah terus meningkatkan kualitas belanja APBN, yaitu				√		Kosakata “ekonomi” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu hal yang berkaitan dengan perekonomian. Dalam konteks ini, “ekonomi” dimaknai dengan urusan keuangan daerah. Kalimat tersebut menunjukkan peran Pemerintah untuk mendorong peran dunia usaha dan kerjasama dunia usaha dengan BUMN, di daerah-daerah lain yang keadaan ekonominya menggeliat dan tumbuh. Oleh karena itu, kalimat tersebut mengandung ideologi ekonomi.



No.	Data		Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						dengan menitikberatkan alokasi belanja pada sektor-sektor prioritas untuk menggerakkan perekonomian, seperti ifrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, dana desa, serta pembayaran masyarakat.						
32.	Nilai investasi BUMN akan terus kita perbesar.		√	Nilai investasi BUMN akan terus kita perbesar.		Wujud bahwa pemerintah terus memperbesar nilai investasi BUMN adalah adanya target BUMN yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mencapai RP 765 triliun pada tahun 2019.				√	Bentuk gramatikal “nilai investasi BUMN akan terus kita perbesar” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah gagasan yang berhubungan dengan perekonomian negara Indonesia. Dalam konteks ini, “nilai investasi” dimaknai dengan nilai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dalam hal ini, nilai investasi yang dimaksud adalah nilai investasi BUMN yang akan terus diperbesar oleh pemerintah. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.	
33.	Selain itu, dengan dukungan DPR, Pemerintah melakukan terobosan dengan mengeluarkan aturan tentang Amnesti Pajak.		√	Pemerintah melakukan terobosan dengan mengeluarkan aturan tentang Amnesti Pajak		Wujud bahwa dengan dukungan DPR, Pemerintah melakukan terobosan dengan mengeluarkan aturan tentang Amnesti Pajak adalah Direktorat Jenderal (Dirjen) mengeluarkan dua aturan				√	Bentuk gramatikal “Pemerintah melakukan terobosan dengan mengeluarkan aturan tentang Amnesti Pajak” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal perekonomian. Dalam konteks ini, “Pemerintah melakukan terobosan dengan mengeluarkan aturan tentang Amnesti Pajak” dimaknai dengan	

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						baru jelang batas akhir program Amnesti Pajak (tax amnesty) yang bertepatan dengan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2016 bagi Wajib Pajak orang pribadi. Dalam keputusan Dirjen Pajak ini mengatur bahwa Wajib Pajak orang pribadi memiliki waktu tambahan dari 1 April 2017 hingga 21 April 2017 untuk melaporkan SPT Tahunan PPh tanpa dikenakan denda. Aturan kedua tentang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2017 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan dalam Rangka Pengampunan Pajak.						pemerintah akan mengeluarkan inovasi baru dengan mengeluarkan aturan tentang Amnesti Pajak. Amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Sehingga, kalimat tersebut mengandung ideologi ekonomi.
34.	Diharapkan basis penerimaan pajak menjadi semakin luas guna mempercepat	√		Penerimaan pajak		Wujud dari pengharapan basis penerimaan pajak menjadi semakin luas guna				√		Kosakata “penerimaan pajak” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian di Indonesia.

No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks		Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal								
	pembangunan dan meningkatkan daya saing nasional.				mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing nasional adalah penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 ditargetkan sebesar Rp 1.307,9 triliun. Target ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2016 yang terkumpul sebanyak Rp 1.105 triliun. Namun, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, target penerimaan pajak pada tahun ini diperkirakan tidak tercapai. Hal ini dilakukan setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap program tax amnesty dan proyeksi penerimaan negara.						Dalam konteks ini, “penerimaan pajak” dimaknai dengan besarnya uang yang diterima dari pajak. Kalimat tersebut menunjukkan suatu harapan dari diberlakukannya amnesti pajak, yaitu basis penerimaan pajak menjadi semakin luas guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing nasional. Sehingga, kalimat tersebut mengandung ideologi ekonomi.
35.	Di era kompetisi global, pembangunan infrastruktur fisik saja belum cukup untuk mengatasi kemiskinan,	√		Pembangunan infrastruktur	Wujud bahwa di era kompetisi global, pembangunan infrastruktur fisik saja belum cukup				√		Kosakata “pembangunan infrastruktur” dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian. Dalam konteks ini, “pembangunan infrastruktur” dimaknai

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
	mengatasi pengangguran, mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial.					untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial adalah karena sumber daya manusia yang ada di Indonesia pun perlu dibina agar menjadi lebih produktif dan berpikiran maju untuk menyeimbangkan pembangunan infrastruktur fisik agar bisa mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial.						dengan pembangunan prasarana di Indonesia menjadi lebih baik dan lebih layak lagi. Dalam hal ini, di era kompetisi global, pembangunan infrastruktur fisik saja belum cukup untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.
36.	Agar Indonesia bisa bersaing dalam kompetisi global maka pembangunan infrastruktur sosial, yaitu kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia (SDM) harus dipercepat.	√		Pembangunan infrastruktur		Wujud bahwa Indonesia bisa bersaing dalam kompetisi global maka pembangunan infrastruktur sosial, jika kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia (SDM) harus dipercepat adalah fokus yang dipilih oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri				√		Kosakata “pembangunan infrastruktur” dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian. Dalam konteks ini, “pembangunan infrastruktur” dimaknai dengan pembangunan prasarana di Indonesia menjadi lebih baik dan lebih layak lagi. Dalam hal ini yang dibangun adalah infrastruktur sosial, yaitu kapasitas produktif dan SDM harus dipercepat, agar Indonesia bisa bersaing dalam kompetisi global. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						Mulyani yang menyoroti kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Menurutnya, meski memiliki bonus demografi berupa jumlah penduduk produktif yang besar, tapi kualitas SDM yang dimiliki masih rendah.						ekonomi.
37.	Dengan demikian Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam perlombaan ekonomi global, Indonesia harus menjadi ikut berlomba dan harus menjadi pemenang.	√		Ekonomi global		Wujud bahwa Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam perlombaan ekonomi global, Indonesia harus menjadi ikut berlomba dan harus menjadi pemenang adalah dengan berlomba naiknya harga komoditas di Indonesia. Hal tersebut telah diperkirakan oleh pihak Bank Indonesia yang menyatakan bahwa harga mayoritas komoditas strategis akan meningkat sepanjang 2017. Kondisi itu kemudian akan berdampak pada terdongkraknya nilai ekspor dan pertumbuhan ekonomi.				√		Kosakata “ekonomi global” dalam kalimat tersebut berkaitan dengan perekonomian. Dalam konteks ini, “ekonomi global” dimaknai dengan ekonomi yang merujuk pada ekonomi yang didasarkan pada ekonomi nasional semua negara di dunia. Ekonomi global dapat dipandang sebagai ekonomi masyarakat global dan ekonomi nasional, yaitu ekonomi masyarakat setempat, sehingga menciptakan suatu ekonomi global. Dalam kalimat tersebut Presiden Joko Widodo menunjukkan pengharapan agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam perlombaan ekonomi global, Indonesia harus menjadi ikut berlomba dan harus menjadi pemenang. Hal tersebut bisa diwujudkan dengan melakukan pembangunan infrastruktur sosial, seperti yang telah disebutkan dalam kalimat sebelumnya. Oleh karena itu, kalimat tersebut mengandung ideologi ekonomi.

No.	Data	Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
38.	Terkait dengan itu, Pemerintah memandang penting untuk memperluas akses masyarakat pada kegiatan ekonomi produktif, dengan mendorong kemajuan dan produktifitas sektor UMKM.		√	Kegiatan ekonomi produktif		Wujud bahwa Pemerintah memandang penting untuk memperluas akses masyarakat pada kegiatan ekonomi produktif, dengan mendorong kemajuan dan produktifitas sektor UMKM adalah dengan adanya peran serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan kegiatan UMKM. Pemerintah juga telah menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, serta dukungan kelembagaan.				√		Bentuk gramatikal “kegiatan ekonomi produktif” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah kegiatan perekonomian. Dalam konteks ini, “kegiatan ekonomi produktif” dimaknai dengan kegiatan di bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh Rumah Tangga dan atau Kelompok Usaha Ekonomi/Poktan/Gapoktan/Koperasi Tani/KUD untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan ketahanan pangan masyarakat berbasis sumberdaya lokal. Dalam kalimat tersebut terdapat pandangan pemerintah tentang pentingnya memperluas akses masyarakat pada kegiatan ekonomi produktif, dengan mendorong kemajuan dan produktifitas sektor UMKM. Oleh karena itu, kalimat tersebut mengandung ideologi ekonomi.
39.	Untuk itu, dalam dua tahun terakhir Pemerintah telah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) per tahun dari 22 persen menjadi 12 persen pada tahun 2015, dan		√	Pemerintah telah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR)		Wujud bahwa dalam dua tahun terakhir, Pemerintah telah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) per tahun dari 22 persen menjadi 12 persen				√		Bentuk gramatikal “Pemerintah telah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR)” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang perekonomian. Dalam konteks ini, “Pemerintah telah menurunkan suku bunga Kredit

No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks		Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal								
	turun menjadi 9 persen pada tahun 2016.				pada tahun 2015, dan turun menjadi 9 persen pada tahun 2016 adalah sampai pada tahun 206, KUR turun menjadi 9 persen, dan pada tahun 2017 diharapkan KUR turun lagi menjadi 7 persen.						Usaha Rakyat (KUR)” dimaknai dengan upaya atau kebijakan pemerintah untuk menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) per tahun dari 22 persen menjadi 12 persen pada tahun 2015, dan turun menjadi 9 persen pada tahun 2016. Oleh karena itu, kalimat tersebut mengandung ideologi ekonomi.
40.	Pemerintah juga terus mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh KUR.		√	mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh KUR	Wujud bahwa pemerintah juga terus mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh KUR adalah pada tahun ini (tahun 2017) KUR harus menjangkau banyak rakyat. Semakin besar jumlahnya dan semakin mudah cara memperolehnya bagi rakyat.				√		Bentuk gramatikal “mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh KUR” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang perekonomian. Dalam konteks ini, “mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh KUR” dimaknai dengan keputusan pemerintah untuk memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh KUR. Oleh karena itu, kalimat tersebut mengandung ideologi ekonomi.
41.	Sedangkan dalam rangka menyiapkan SDM menghadapi kompetisi global, Pemerintah memperkuat sistem pendidikan vokasional.	√		Pendidikan vokasional	Salah satu wujud bahwa dalam rangka menyiapkan SDM menghadapi kompetisi global, Pemerintah memperkuat sistem pendidikan vokasional adalah adanya kegiatan yang diadakan oleh Menteri Luar Negeri					√	Kosakata “pendidikan vokasional” yang terdapat dalam kalimat tersebut berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, “pendidikan vokasional” dimaknai dengan sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Dalam hal ini, Pemerintah melakukan penguatan pada sistem pendidikan vokasional dalam rangka menyiapkan SDM menghadapi kompetisi global. Jadi, dalam

No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks		Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal								
					RI, Retno LP Marsudi, yang mengajak pemerintah Jerman untuk terlibat mengembangkan pendidikan vokasional di Indonesia.						kalimat tersebut terkandung ideologi sosial budaya.
42.	Melalui pendidikan vokasional, kita dapat melahirkan angkatan kerja dengan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri.	√		Pendidikan vokasional	Wujud bahwa melalui pendidikan vokasional, kita dapat melahirkan angkatan kerja dengan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri adalah adanya pendidikan vokasional yang bekerja sama dengan bidang-bidang tertentu, salah satunya bidang industri, yang kemudian dikenal dengan istilah ikatan dinas. Sehingga, lulusan dari pendidikan vokasional tersebut terlahir menjadi angkatan kerja dengan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri.					√	Kosakata “pendidikan vokasional” yang terdapat dalam kalimat tersebut berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, “pendidikan vokasional” dimaknai dengan sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Dalam hal ini, pemerintah beranggapan bahwa melalui pendidikan vokasional, maka dapat dilahirkan angkatan kerja dengan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi sosial budaya.
43.	Di saat yang bersamaan, kita pastikan masyarakat usia produktif bisa lebih cepat	√		pekerjaan	Wujud bahwa kita kita pastikan masyarakat usia produktif bisa lebih cepat					√	Kosakata “pekerjaan” yang terdapat dalam kalimat tersebut berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini,



No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks		Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal								
	mendapatkan pekerjaan.				mendapatkan pekerjaan adalah dengan adanya pekerja yang kompeten maka pada saat masyarakat Indonesia menempati usia produktif, mereka akan lebih mudah dalam mendapatkan pekerjaan.						“pekerjaan” dimaknai dengan mata pencaharian yang dijadikan sebagai pokok penghidupan. Dalam hal ini, pemerintah memastikan bahwa masyarakat usia produktif, usia 15 sampai 64 tahun, bisa lebih cepat mendapatkan pekerjaan. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi sosial budaya.
44.	Pemerintah juga terus mendorong terwujudnya hilirisasi penelitian dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia industri.	√		sinergi	Pada kalimat yang menyatakan bahwa pemerintah juga terus mendorong terwujudnya hilirisasi penelitian dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia industri, belum dapat diwujudkan karena masih terhambat oleh regulasi aparat sipil.					√	Kosakata “sinergi” yang terdapat dalam kalimat tersebut berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, “sinergi” dimaknai dengan kegiatan atau operasi gabungan antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi sosial budaya.
45.	Begitu juga sejumlah Sentra Teknologi dan Inovasi dibangun di tanah air untuk mendukung industrialisasi nasional.	√		Sentra Teknologi dan Inovasi	Wujud atas dibangunnya sejumlah Sentra Teknologi dan Inovasi di tanah air untuk mendukung industrialisasi nasional adalah dibangunnya Sentra Inovasi Teknologi dan Bisnis di Simeulee, Aceh oleh Kementerian Kelautan					√	Kosakata “Sentra Teknologi dan Inovasi” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah gagasan yang berkaitan dengan perekonomian negara. Dalam konteks ini, “Sentra Teknologi dan Inovasi” dimaknai dengan Pusat Teknologi dan Inovasi yang dibangun di tanah air untuk mendukung industrialisasi nasional. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.

No.	Data		Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
46.	Sedangkan untuk mempercepat BUMN agar makin produktif dan menguat daya saingnya, Pemerintah mempersiapkan 'holdingisasi'.		√	Mempercepat BUMN	dan Perikanan. Kalimat yang menyatakan bahwa untuk mempercepat BUMN agar makin produktif dan menguat daya saingnya, Pemerintah mempersiapkan 'holdingisasi, sampai saat ini belum dapat diwujudkan karena terganjal oleh restu DPR di Peraturan Presiden (PP) Nomor 72 Tahun 2016. PP No. 72 Tahun 2016 merupakan perubahan atas PP 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas (PT) yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2016.				√		Bentuk gramatikal "mempercepat BUMN" yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah gagasan yang berkaitan dengan perekonomian. Dalam konteks ini, "mempercepat BUMN" dimaknai dengan menambah cepat pertumbuhan BUMN. Untuk membuat BUMN menjadi lebih produktif dan menguat daya saingnya, maka pemerintah mempersiapkan holdingisasi, atau membentuk induk usaha Badan Usaha Milik Negara Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.	
47.	Tujuan Pemerintah membangun infrastruktur sosial khususnya pembangunan SDM adalah agar setiap insan Indonesia dapat mencapai potensi maksimalnya.		√	Membangun infrastruktur sosial	Wujud bahwa tujuan pemerintah membangun infrastruktur sosial khususnya pembangunan SDM adalah agar setiap				√		Bentuk gramatikal "membangun infrastruktur sosial" yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian. Dalam konteks ini, "membangun infrastruktur sosial" dimaknai dengan	

No.	Data		Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						insan Indonesia dapat mencapai potensi maksimalnya adalah adanya pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa pembangunan fisik saja tidak cukup untuk membangun Indonesia. hal itu disebabkan oleh pembangunan institusi sosial, seperti keluarga, memiliki peran yang sangat penting sebab perkembangan setiap manusia dimulai dari ranah keluarga.						mendirikan atau mengadakan infrastruktur sosial, khususnya pembangunan SDM, yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan agar setiap insan Indonesia dapat mencapai potensi maksimalnya. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.
48.	Langkah ini dimulai dari pemenuhan nutrisi pada 1.000 hari pertama kehidupan.		√	pemenuhan nutrisi pada 1.000 hari pertama kehidupan		Wujud bahwa “langkah ini dari pemenuhan nutrisi pada 1.000 hari pertama kehidupan” adalah adanya penyulihan mengenai pentingnya pemenuhan nutrisi pada 1.000 hari pertama kehidupan.					√	Bentuk gramatikal “pemenuhan nutrisi pada 1.000 hari pertama kehidupan” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan kehidupan sosial rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, “pemenuhan nutrisi pada 1.000 hari pertama kehidupan” dimaknai sebagai langkah awal untuk membangun infrastuktur sosial. Oleh karena itu, kalimat tersebut mengandung ideologi sosial budaya.
49.	Selanjutnya, dalam membangun		√	membangun		Salah satu wujud dalam					√	Bentuk gramatikal “membangun manusia Indonesia

No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis		
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik		Ekonomi	Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
	manusia Indonesia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing, kita tingkatkan kualitas pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial.			manusia Indonesia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing, kita tingkatkan kualitas pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial	membangun manusia Indonesia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing, kita tingkatkan kualitas pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial adalah adanya rapat kerja daerah (rakerda) dalam bidang kesehatan di wilayah Kalimantan Timur sebagai langkah strategis untuk mewujudkan target pembangunan yang sudah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (PRJMD) Kaltim 2013-2018.						yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing, kita tingkatkan kualitas pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah gagasan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang sosial budaya. Dalam konteks ini, “membangun manusia Indonesia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing, kita tingkatkan kualitas pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial” dimaknai dengan suatu usaha untuk membuat rakyat-rakyat Indonesia memiliki kualitas, produktif, dan berdaya saing, maka pemerintah meningkatkan kualitas pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Sehingga, kalimat tersebut mengandung ideologi sosial budaya.	
50.	Di sektor kesehatan, Program Indonesia Sehat yang memiliki tiga pilar.	√		Program Indonesia Sehat		Wujud bahwa di sektor kesehatan, Program Indonesia Sehat yang memiliki tiga pilar, yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).					√	Kosakata “Program Indonesia Sehat” yang terdapat dalam kalimat tersebut merupakan suatu program atau gagasan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk kepentingan sosial rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, “Program Indonesia Sehat” dimaknai dengan program yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka menjaga kesehatan rakyat Indonesia. Program ini, memiliki tiga pilar atau pokok dasar. Sehingga, kalimat

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
												tersebut mengandung ideologi sosial budaya.
51.	Pertama, penerapan paradigma sehat.	√		Paradigma sehat		Wujud dari penerapan paradigma sehat adalah dilakukan dengan strategi pengarus-utamaan kesehatan dalam pembangunan kesehatan, penguatan promotif, preventif dan pemberdayaan masyarakat.					√	<p>Kosakata “paradigma sehat” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah pandangan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, “paradigma sehat” menyoar kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentu kebijakan lintas sektor untuk memperhatikan dampak kesehatan dari kebijakan yang diambil baik di hulu maupun di hilir,</li> <li>2. Tenaga kesehatan yang mengupayakan agar orang sehat tetap sehat atau tidak menjadi sakit, orang yang sakit menjadi sehat, dan orang sakit tidak menjadi lebih sakit,</li> <li>3. Institusi Kesehatan yang diharapkan penerapan standar mutu dan standar tarif dalam pelayanan kepada masyarakat,</li> <li>4. Masyarakat, yang merasa kesehatan adalah harta berharga yang harus dijaga. Oleh karena itu, di dalam kalimat tersebut terkandung ideologi sosial budaya.</li> </ol>
52.	Kedua, penguatan pelayanan kesehatan.		√	Penguatan pelayanan kesehatan		Wujud dari penguatan pelayanan kesehatan adalah dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan pendekatan continuum of					√	<p>Bentuk gramatikal “penguatan pelayanan kesehatan” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan kehidupan sosial rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, “penguatan pelayanan kesehatan” dilakukan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesiapan 6000 puskesmas di 6 regional</li> </ol>

No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks		Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal								
					care, dan intervensi berbasis resiko kesehatan.						2. Terbentuknya 14 rumah sakit rujukan nasional 3. Terbentuknya 184 rumah sakit rujukan regional. Oleh karena itu, kalimat tersebut mengandung ideologi sosial budaya.
53.	Ketiga, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	√		Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Wujud dari pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional adalah adanya Kartu Indonesia Sehat, yang dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit, serta kendali mutu dan kendali biaya.					√	Kosakata “Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan kehidupan sosial rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, “Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)” dimaknai dengan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Oleh karena itu, kalimat tersebut mengandung ideologi sosial budaya.
54.	Di sektor pendidikan, sekarang ini sedang dilakukan percepatan pembagian Kartu Indonesia Pintar di seluruh pelosok Tanah Air.	√		pendidikan	Wujud bahwa di sektor pendidikan, sedang dilakukan percepatan pembagian Kartu Indonesia Pintar di seluruh pelosok Tanah Air adalah pada bulan Januari 2017 lalu, Presiden Joko Widodo telah					√	Kosakata “pendidikan” yang terdapat dalam kalimat tersebut berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, “Pendidikan” dimaknai dengan proses pembelajaran yang dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia. Kalimat tersebut menyatakan bahwa di sektor pendidikan, sekarang ini sedang dilakukan percepatan pembagian Kartu Indonesia Pintar di

No.	Data	Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						membagikan KIP kepada ribuan siswa yatim piatu.						seluruh pelosok Tanah Air. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi sosial budaya.
55.	Perhatian Pemerintah terutama diberikan kepada anak usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu.	√		Perhatian pemerintah		Wujud bahwa perhatian Pemerintah terutama diberikan kepada anak usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu adalah Pemerintah membagikan Kartu Indonesia Pintar untuk 17,9 juta anak, dengan 736.848 di antaranya adalah anak yatim piatu, pada 2017. Hal ini merupakan upaya pemerintah memberantas kemiskinan dengan memudahkan akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. KIP diberikan bagi anak usia 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu. Bantuan Rp 450.000 per tahun untuk murid sekolah dasar, Rp 750.000 per tahun untuk pelajar sekolah menengah pertama, dan Rp 1.000.000 per tahun untuk siswa					√	Kosakata “perhatian pemerintah” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah tindakan pemerintah yang diambil untuk kehidupan sosial rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, “perhatian pemerintah” dimaknai sebagai minat pemerintah atau fokus pemerintah terutama diberikan kepada anak usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi sosial budaya.

No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks		Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal								
					sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan.						
56.	Melalui KIP diberikan jaminan untuk mendapatkan layanan Pendidikan Dasar sampai Menengah, pendidikan formal dan non formal, termasuk untuk mendapatkan ketrampilan dari lembaga kursus/BLK.		√	melalui KIP diberikan jaminan untuk mendapatkan layanan Pendidikan Dasar sampai Menengah, pendidikan formal dan non formal, termasuk untuk mendapatkan ketrampilan dari lembaga kursus/BLK	Wujud bahwa melalui KIP diberikan jaminan untuk mendapatkan layanan Pendidikan Dasar sampai Menengah, pendidikan formal dan non formal, termasuk untuk mendapatkan ketrampilan dari lembaga kursus/BLK adalah keyakinan yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo bahwa implementasi KIP yang tepat sasaran dapat mendorong penuntasan wajib belajar 12 tahun. Selain itu, akses pendidikan juga ditambahkan dengan penguatan praktik lapangan melalui pemagangan di perusahaan-perusahaan akan menghasilkan SDM yang berkualitas.					√	Bentuk gramatikal “melalui KIP diberikan jaminan untuk mendapatkan layanan Pendidikan Dasar sampai Menengah, pendidikan formal dan non formal, termasuk untuk mendapatkan ketrampilan dari lembaga kursus/BLK” menunjukkan sebuah gagasan pemerintah yang diambil untuk kehidupan sosial rakyat Indonesia dalam bidang pendidikan. Dalam konteks ini, “melalui KIP diberikan jaminan untuk mendapatkan layanan Pendidikan Dasar sampai Menengah, pendidikan formal dan non formal, termasuk untuk mendapatkan ketrampilan dari lembaga kursus/BLK” dimaknai sebagai upaya pemerintah agar semua anak Indonesia bisa mendapatkan pendidikan. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi sosial budaya.
57.	Selain itu, juga sosialisasi nilai-nilai keutamaan dan pendidikan	√		Nilai-nilai kemanusiaan	Wujud dari sosialisasi nilai-nilai keutamaan dan					√	Kosakata “nilai-nilai keutamaan” yang terdapat dala kalimat tersebut menunjukkan nilai-nilai sosial



No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks		Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal								
	karakter pada anak didik.				pendidikan karakter pada anak didik adalah adanya pendidikan karakter yang diajarkan dan ditanamkan pada siswa-siswa di berbagai sekolah di Indonesia.						budaya yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks ini, “nilai-nilai keutamaan” dimaknai dengan skala-skala keutamaan. “Pendidikan karakter” dimaknai dengan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi sosial budaya.
58.	Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang mengabdikan di daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terdepan, dan wilayah-wilayah perbatasan.	√		kesejahteraan	Salah satu wujud bahwa Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang mengabdikan di daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terdepan, dan wilayah-wilayah perbatasan adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, merancang peningkatan kesejahteraan guru, terutama di pedalaman. Semakin jauh jarak tempat mengabdikan dari ibukota, semakin besar pula tunjangan yang didapat.				√		Kosakata “kesejahteraan” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu keadaan ekonomi yang dialami oleh seseorang di Indonesia. Dalam konteks ini, “kesejahteraan” dimaknai dengan hal atau keadaan sejahtera. Kalimat tersebut menyatakan bahwa pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang mengabdikan di daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terdepan, dan wilayah-wilayah perbatasan. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.
59.	Sebagai katalisator pembangunan infrastruktur fisik	√		Pembangunan infrastruktur	Wujud bahwa sebagai katalisator pembangunan				√		Kosakata “pembangunan infrastruktur” dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah kegiatan

No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks		Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal								
	dan sosial, Pemerintah berkomitmen melakukan deregulasi dan debirokratisasi.				infrastruktur fisik dan sosial, Pemerintah berkomitmen melakukan deregulasi dan debirokratisasi adalah ketika memperingati dua tahun kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Kementerian Perdagangan berhasil menuntaskan paket deregulasi dan debirokratisasi di bidang perdagangan.						yang berkaitan dengan perekonomian. Dalam konteks ini, “pembangunan infrastruktur” dimaknai dengan pembangunan prasarana di Indonesia menjadi lebih baik dan lebih layak lagi. Dalam hal ini, pembangunan infrastruktur dilakukan dalam bentuk fisik dan sosial, dan sebagai katalisatornya, pemerintah berkomitmen melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.
60.	Banyak regulasi kita sudah usang, sudah harus diperbaharui untuk menyongsong perubahan jaman.	√		regulasi	Wujud bahwa banyak regulasi di Indonesia yang sudah usang, sudah harus diperbaharui untuk menyongsong perubahan jaman adalah adanya 111 Peraturan Daerah yang akan dicabut di Yogyakarta. Perda yang dicabut tersebut merupakan produk hukum yang diterbitkan dari periode 1953 hingga 1996.			√			Kosakata “regulasi” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah gagasan yang berkaitan dengan pemerintahan. Dalam konteks ini, “regulasi” dimaknai dengan pengaturan mengenai pemerintahan negara. Kalimat tersebut menyatakan bahwa banyak regulasi di Indonesia yang sudah usang, sehingga sudah harus diperbaharui untuk menyongsong perubahan zaman. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi politik.
61.	Maka regulasi yang membingungkan harus	√		regulasi	Wujud bahwa regulasi yang membingungkan harus			√			Kosakata “regulasi” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah gagasan yang

No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis		
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik		Ekonomi	Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
	disederhanakan, prosedur yang rumit harus dipangkas.				disederhanakan, prosedur yang rumit harus dipangkas adalah regulasi-regulasi tersebut bisa dilebur dengan yang lain.						berkaitan dengan pemerintahan. Dalam konteks ini, “regulasi” dimaknai dengan pengaturan mengenai pemerintahan negara. Kalimat tersebut menyatakan bahwa regulasi yang membingungkan, yang sudah usang, harus disederhanakan, salah satunya dengan memangkas prosedur yang rumit. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi politik.	
62.	Deregulasi dan debirokratisasi itu kita lakukan untuk memberikan kecepatan pelayanan, kepastian, sinkronisasi, kemudahan berinvestasi, serta meningkatkan produktivitas.	√		debirokratisasi	Wujud bahwa deregulasi dan debirokratisasi itu kita lakukan untuk memberikan kecepatan pelayanan, kepastian, sinkronisasi, kemudahan berinvestasi, serta meningkatkan produktivitas dinilai belum maksimal.			√			Kosakata “debirokratisasi” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah gagasan yang berkaitan dengan pemerintahan. Dalam konteks ini, “deregulasi” dimaknai dengan kegiatan atau proses menghapuskan pembatasan dan peraturan. Sementara itu, “debirokratisasi” dimaknai dengan penghapusan atau pengurangan hambatan yang terdapat dalam sistem birokrasi. Pemberlakuan deregulasi dan debirokratisasi dilakukan untuk memberikan kecepatan pelayanan, kepastian, sinkronisasi, kemudahan berinvestasi, serta meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi politik.	
63.	Guna mempercepat manfaat dari Paket-Paket itu, telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi pada tanggal 28 Juni		√	telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan	Wujud bahwa guna mempercepat manfaat dari Paket-Paket itu, telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan				√		Bentuk gramatikal “telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan dan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi” yang terdapat dalam kalimat tersebut merupakan sebuah tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Dalam konteks ini, “telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan dan Efektifitas	

No.	Data		Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
	2016.			Kebijakan Ekonomi		Ekonomi pada tanggal 28 Juni 2016 adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla meresmikan Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa, 28 Juni 2016, dengan tujuan untuk memastikan paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan akan berjalan dengan baik.						Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi” dimaknai dengan telah disusunnya Satuan Percepatan dan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi pada tanggal 28 Juni 2016 dengan tujuan untuk mempercepat manfaat dari Paket-Paket Ekonomi yang telah disebutkan pada kalimat sebelumnya.Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.
64.	Ke depan, diupayakan pembentukan Paket Kebijakan Ekonomi lainnya guna mempercepat peningkatan ekonomi nasional.	√		Paket Kebijakan Ekonomi		Wujud bahwa diupayakannya pembentukan Paket Kebijakan Ekonomi lainnya guna mempercepat peningkatan ekonomi nasional adalah keluarnya Paket Kebijakan Ekonomi XIII pada Agustus 2016, Paket Kebijakan Ekonomi XIV pada November 2016, dan Paket Kebijakan Ekonomi XV pada Juni 2017.				√		Kosakata “Paket Kebijakan Ekonomi” yang terdapat dalam kalimat tersebut merupakan sebuah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Dalam konteks ini, “Paket Kebijakan Ekonomi” dimaknai sebagai paket yang mengacu pada kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Kalimat tersebut menyatakan Pemerintah mengupayakan pembentukan Paket Kebijakan Ekonomi lainnya untuk mempercepat peningkatan ekonomi nasional. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.

No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis		
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik		Ekonomi	Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
65.	Sebagai bagian dari deregulasi, Pemerintah telah mensinkronkan berbagai peraturan daerah (Perda) terkait perdagangan dan investasi.	√		Peraturan daerah (perda)		Wujud bahwa pemerintah telah mensinkronkan berbagai peraturan daerah (Perda) terkait perdagangan dan investasi, sebagai bagian dari deregulasi adalah hingga bulan Juni 2016, terdapat 3143 Perda yang bermasalah dan telah dibatalkan.			√			Kosakata “peraturan daerah (perda)” dalam kalimat tersebut menunjukkan tata cara atau siasat dalam hal pemerintahan. Dalam konteks ini, “peraturan daerah (perda)” dimaknai dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Kalimat tersebut menyatakan kegiatan pemerintah mensinkronkan berbagai peraturan daerah (perda) terkait dengan perdagangan dan investasi. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari regulasi. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi politik.
66.	Mencermati berbagai kesalahpahaman tentang pembatalan Perda, saya tegaskan dua hal..		√	Pembatalan Perda		Wujud bahwa untuk mencermati berbagai kesalahpahaman tentang pembatalan Perda, saya tegaskan dua hal adalah: 1. Sinkronisasi Perda dilakukan untuk kepentingan nasional, termasuk kepentingan daerah. 2. Perda yang dibatalkan hanya			√			Bentuk gramatikal “pembatalan perda” dalam kalimat tersebut menunjukkan tata cara atau siasat dalam hal pemerintahan. Dalam konteks ini, “pembatalan perda” dimaknai dengan perbuatan membatalkan peraturan daerah. Dalam hal ini, pembatalan tersebut ditegasi dengan dua hal oleh Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi politik.

No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis		
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik		Ekonomi	Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
					terkait urusan perdagangan dan investasi							
67.	Pertama, sinkronisasi Perda dilakukan untuk kepentingan nasional, yang artinya termasuk kepentingan daerah.	√		Perda	Wujud bahwa sinkronisasi Perda dilakukan untuk kepentingan nasional, yang artinya termasuk kepentingan daerah adalah pembatalan tersebut dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar, yang toleran dan memiliki daya saing.			√			Kosakata “perda” dalam kalimat tersebut menunjukkan tata cara atau siasat dalam hal pemerintahan. Dalam konteks ini, “peraturan daerah (perda)” dimaknai dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Dalam kalimat tersebut Presiden Joko Widodo menyatakan hal pertama yang Presiden tegaskan mengenai kesalahpahaman tentang pembatalan perda, yaitu sinkronisasi Perda dilakukan untuk kepentingan nasional, yang artinya termasuk kepentingan daerah. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi politik.	
68	Sinkronisasi yang telah dilakukan akan membawa manfaat bagi daerah dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.	√		Menarik Investasi	Wujud bahwa sinkronisasi yang telah dilakukan akan membawa manfaat bagi daerah dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja adalah dengan adanya sinkronisasi tersebut maka laju investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia diprediksi akan lebih cepat.				√		Kosakata “menarik investasi” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu siasat yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang ekonomi. Dalam konteks ini, “menarik investasi” dimaknai dengan mempengaruhi atau membangkitkan investasi. Hal tersebut merupakan manfaat bagi daerah yang telah melakukan sinkronisasi. Selain menarik investasi, sinkronisasi tersebut juga akan menciptakan lapangan kerja. Sehingga, kalimat tersebut mengandung ideologi ekonomi.	

No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis		
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik		Ekonomi	Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
69	Kedua, Perda yang dibatalkan hanya terkait urusan perdagangan dan investasi.	√		Perdagangan dan Investasi		Wujud bahwa Perda yang dibatalkan hanya terkait urusan perdagangan dan investasi adalah peraturan daerah yang dibatalkan tersebut merupakan peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi. Selain itu, peraturan tersebut juga dianggap menghambat proses perizinan dan investasi serta menghambat kemudahan berusaha.				√		Kosakata “perdagangan dan investasi” merupakan tindakan dalam bidang ekonomi. Dalam konteks ini, “perdagangan dan investasi” dimaknai dengan bidang-bidang yang berkaitan dengan pembatalan perda. Hal ini merupakan poin kedua dari dua poin yang ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo mengenai pembatalan perda. Sehingga, kalimat tersebut juga mengandung ideologi ekonomi
70	Sinkronisasi dilakukan agar ada keselarasan, agar ada kesinambungan regulasi dari Undang-Undang Dasar 1945 dengan beragam regulasi di tingkat pusat hingga daerah.	√		Sinkronisasi		Wujud bahwa sinkronisasi dilakukan agar ada keselarasan, agar ada kesinambungan regulasi dari Undang-Undang Dasar 1945 dengan beragam regulasi di tingkat pusat hingga daerah adalah peraturan-peraturan daerah yang dihapus merupakan peraturan yang bertentangan dengan yang lebih tinggi, yaitu UUD 1945.			√			Kosakata “sinkronisasi” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah gagasan dalam bidang pemerintahan. Dalam konteks ini, “sinkronisasi” dimaknai dengan harmonisasi yang dilakukan dengan tujuan agar ada keselarasan, agar ada kesinambungan regulasi dari Undang-Undang Dasar 1945 dengan beragam regulasi di tingkat pusat hingga daerah. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi politik.

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
71	Semuanya harus berada di bawah konstitusi, di bawah kehendak rakyat.		√	Harus berada dibawah Konstitusi		Wujud bahwa semua (peraturan-peraturan pemerintah) harus berada di bawah konstitusi, di bawah kehendak rakyat adalah peraturan-peraturan pemerintah harus sesuai dengan konstitusi dan menyesuaikan dengan kehendak rakyat.		√				Bentuk gramatikal “harus berada di bawah konstitusi” yang terdapat dalam kalimat tersebut merupakan sebuah ketapan yang diambil oleh pemerintah atas dasar kekuasaan. Dalam konteks ini, “harus di berada di bawah konstitusi” dimaknai dengan perintah Presiden Joko Widodo yang mengharuskan untuk berada di bawah undang-undang dasar, termasuk di bawah kehendak rakyat. Sehingga, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi kekuasaan.
72	Agar terobosan-terobosan yang dilakukan di Tahun Percepatan Pembangunan mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran, dan menurunkan ketimpangan dan kesenjangan sosial, Pemerintah menaruh perhatian besar pada empat aspek strategis.	√		Tahun percepatan pembangunan		Wujud bahwa agar terobosan-terobosan yang dilakukan di Tahun Percepatan Pembangunan mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran, dan menurunkan ketimpangan dan kesenjangan sosial, Pemerintah menaruh perhatian besar pada empat aspek strategis adalah: 1. mempercepat reformasi hukum untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi				√		Kosakata “Tahun Percepatan Pembangunan” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah tindakan yang berkaitan dengan perekonomian. Dalam konteks ini, “Tahun Percepatan Pembangunan” dimaknai dengan tahun dengan program percepatan dalam bidang pembangunan. Pada tahun ini dimunculkan terobosan-terobosan yang akan dilakukan dengan harapan mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran, dan menurunkan ketimpangan dan kesenjangan sosial, Pemerintah menaruh perhatian besar pada empat aspek strategis. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.



No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks		Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal								
					<p>rasa keadilan masyarakat, serta terus mendorong reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima</p> <p>2. perombakan manajemen anggaran pembangunan</p> <p>3. politik luar negeri.</p>						
73	Aspek strategis pertama adalah mempercepat reformasi hukum untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta terus mendorong reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima.	√		Reformasi hukum	Wujud bahwa mempercepat reformasi hukum untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta terus mendorong reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima sebagai aspek strategis pertama adalah dengan adanya Paket Reformasi Hukum, yang sampai Januari 2017, telah			√			Kosakata “reformasi hukum” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah gagasan yang berkaitan dengan pemerintahan. Dalam konteks ini, “reformasi hukum” dimaknai dengan perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang hukum. Dalam kalimat tersebut menyatakan bahwa aspek strategis pertama adalah mempercepat reformasi hukum untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta terus mendorong reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi politik.

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						dikeluarkan dua paket. Paket Reformasi Hukum yang pertama terfokus pada pemberantasan pungutan liar dan Paket Reformasi Hukum yang kedua terfokus pada pembenahan regulasi.						
74	Bagian penting dari ini adalah reformasi dalam institusi Polri dan Kejaksaan.		√	Reformasi dalam institusi Polri dan Kejaksaan		Wujud bahwa re reformasi dalam institusi Polri dan Kejaksaan merupakan bagian 75penting dari reformasi hukum dinilai tidak berjalan dengan baik selama dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.			√			Bentuk gramatikal “reformasi dalam institusi Polri dan Kejaksaan” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah gagasan yang berkaitan dengan pemerintahan. Dalam konteks ini, “reformasi dalam institusi Polri dan Kejaksaan” dimaknai dengan perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam institusi Polri dan Kejaksaan. Presiden Joko Widodo menganggap bahwa reformasi dalam dua institusi tersebut merupakan bagian penting dari reformasi hukum. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi politik.
75	Reformasi yang menyeluruh dari hulu sampai hilir.		√	Reformasi yang menyeluruh		Wujud dari reformasi yang menyeluruh dari hulu sampai hilir adalah pemberantasan pungli (pungutan liar), penyelundupan, dan percepatan pelayanan SIM/STNK.			√			Bentuk gramatikal “reformasi yang menyeluruh” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah gagasan yang berkaitan dengan pemerintahan. Dalam konteks ini, “reformasi tambal sulam atau parsial” dimaknai dengan reformasi yang dilakukan secara setengah-setengah, tidak menyeluruh. Reformasi tersebut bukanlah reformasi yang seharusnya dilakukan dalam bidang reformasi hukum. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi politik.

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
76	Bukan reformasi tambal sulam atau parsial.		√	Reformasi tambal sulam atau parsial		Wujud bahwa bukan reformasi tambal sulam atau parsial adalah selama ini, reformasi hukum di Indonesia dinilai sebagai reformasi tambal sulam atau parsial.			√			Bentuk gramatikal “reformasi tambal sulam atau parsial” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah gagasan yang berkaitan dengan pemerintahan. Dalam konteks ini, “reformasi tambal sulam atau parsial” dimaknai dengan reformasi yang dilakukan secara setengah-setengah, tidak menyeluruh. Reformasi tersebut bukanlah reformasi yang seharusnya dilakukan dalam bidang reformasi hukum. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi politik.
77	Untuk itu profesionalisme Polri dan Kejaksaan terus ditingkatkan.		√	Profesionalisme Polri		Wujud bahwa profesionalisme Polri dan Kejaksaan terus ditingkatkan agar tercapai reformasi yang menyeluruh adalah di lembaga Polri, dipilihnya Komjen Tito Karnavian, yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dinilai sebagai sosok yang tepat untuk memimpin Polri.		√				Bentuk gramatikal “profesionalisme Polri dan Kejaksaan terus ditingkatkan” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh seorang presiden atas dasar kekuasaan. Dalam konteks ini, “profesionalisme Polri dan Kejaksaan terus ditingkatkan” dimaknai dengan terus ditingkatkannya mutu atau kualitas kinerja Polri dan Kejaksaan agar terwujudnya reformasi hukum di Indonesia. Sehingga, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi kekuasaan.
78	Demikian pula kualitas Aparatur Sipil Negara terus ditingkatkan agar Negara kita semakin kompetitif.		√	Kualitas Aparatur Sipil Negara terus ditingkatkan		Wujud bahwa kualitas Aparatur Sipil Negara terus ditingkatkan agar Negara kita semakin kompetitif adalah dengan adanya		√				Bentuk gramatikal “kualitas Aparatur Sipil Negara terus ditingkatkan” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh seorang presiden atas dasar kekuasaan. Dalam konteks ini, “kualitas Aparatur

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						strategi dan kebijakan pengembangan Aparatur Sipil Negara yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan pada Februari 2017.						Sipil Negara terus ditingkatkan” dimaknai dengan terus ditingkatkannya kualitas kinerja Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Peningkatan kualitas itu bertujuan agar negara Indonesia semakin kompetitif. Sehingga, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi kekuasaan.
79	Percepatan penggunaan Teknologi Informasi dalam sistem kerja Pemerintah juga terus dipercepat, sebagai bagian penting dari peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi, dan pencegahan praktik korupsi.		√	Percepatan penggunaan teknologi informasi dalam sistem kerja Pemerintah juga harus dipercepat		Wujud bahwa percepatan penggunaan Teknologi Informasi dalam sistem kerja Pemerintah juga terus dipercepat, sebagai bagian penting dari peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi, dan pencegahan praktik korupsi adalah diberlakukannya pelayanan-pelayanan elektronik dan juga <i>online</i> untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi, dan pencegahan praktik korupsi.		√				Bentuk gramatikal “percepatan penggunaan Teknologi Informasi dalam sistem kerja pemerintah juga harus dipercepat” dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh seorang presiden atas dasar kekuasaan. Dalam konteks ini, percepatan penggunaan Teknologi Informasi dalam sistem kerja pemerintah juga harus dipercepat” dimaknai sebagai perintah dari Presiden Joko Widodo yang merupakan bagian penting dari peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi, dan pencegahan praktik korupsi. Sehingga, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi kekuasaan.

No.	Data	Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
80	Selain itu dalam rangka terus menguatkan rasa keadilan, Pemerintah melakukan terobosan-terobosan dalam perlindungan terhadap kelompok marjinal.		√	Menguatkan rasa keadilan		Wujud bahwa dalam rangka terus menguatkan rasa keadilan, Pemerintah melakukan terobosan-terobosan dalam perlindungan terhadap kelompok marjinal salah satunya adalah pada 16 April 2016 lalu di Semarang, tepatnya di Alun-Alun Jepara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sedang menjabat kala itu, Anies Baswedan, mencanangkan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marjinal (GP3M). Acara tersebut merupakan pencanangan GP3M yang akan dilaksanakan di 20 kabupaten atau kota se Indonesia termasuk Jepara.					√	Bentuk gramatikal “menguatkan rasa keadilan” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal kehidupan sosial rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, “menguatkan rasa keadilan” dimaknai dengan usaha pemerintah untuk menegaskan rasa keadilan. Pemerintah melakukan melakukan terobosan-terobosan dalam perlindungan terhadap kelompok marjinal, sebagai salah satu upaya menguatkan rasa keadilan. Oleh karena itu, kalimat tersebut mengandung ideologi sosial budaya.
81	Bagi kalangan penyandang disabilitas, Pemerintah telah menargetkan lebih dari 55.000 orang penyandang disabilitas untuk menerima Asistensi	√		Asistensi sosial penyandang Disabilitas berat		Wujud bahwa Pemerintah telah menargetkan lebih dari 55.000 orang penyandang disabilitas untuk menerima Asistensi					√	Kosakata “Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah gagasan atau program yang digagas oleh pemerintah untuk kepentingan kehidupan sosial rakyat Indonesia, khususnya

No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis		
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik		Ekonomi	Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
	Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) di tahun 2016.				Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) di tahun 2016 bagi kalangan disabilitas adalah target yang diajukan oleh Kementerian Sosial yaitu anggaran sebesar Rp 586.800.000.000; untuk menggulirkan bantuan dana tunai kepada 163.000 orang dengan kecacatan berat (ODKB) pada 2016.						penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, “Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat” dimaknai dengan suatu program sosial yang digagas oleh pemerintah untuk para penyandang disabilitas berat. Target pemerintah dalam program ini sejumlah lebih dari 55.000 orang penyandang disabilitas untuk menerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) di tahun 2016. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi sosial budaya.	
82	Kemudian untuk membentengi anak dari perilaku kejahatan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016.		√	Telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016	Wujud bahwa untuk membentengi anak dari perilaku kejahatan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 adalah pada 26 Mei 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002			√			Bentuk gramatikal “telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan pemerintahan. Dalam konteks ini, “telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016” dimaknai dengan telah dikeluarkan atau disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 untuk membentengi anak dari perilaku kejahatan. Oleh karena itu, kalimat tersebut mengandung ideologi politik.	

No.	Data Kalimat	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis		
		Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik		Ekonomi	Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
83	Aspek strategis kedua adalah perombakan manajemen anggaran pembangunan.		√	Perombakan manajemen anggaran pembangunan	tentang Perlindungan Anak. Wujud bahwa perombakan manajemen anggaran pembangunan sebagai aspek strategis kedua adalah dilakukannya perombakan manajemen anggaran, yaitu anggaran yang diprioritaskan pada program-program prioritas, sehingga arahan presiden bahwa tahun 2016 adalah tahun percepatan pembangunan nasional dapat terwujud demi Indonesia yang lebih maju.				√		Bentuk gramatikal “perombakan manajemen anggaran pembangunan” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang ekonomi. Dalam konteks ini, “perombakan manajemen anggaran pembangunan” dimaknai dengan penguraian atau pembongkaran manajemen anggaran pembangunan. Sehingga dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.	
84	Berulang kali telah saya sampaikan bahwa kita harus meninggalkan paradigma lama, yaitu paradigma anggaran dibagi rata.		√	Kita harus meninggalkan paradigma lama	Wujud bahwa kita harus meninggalkan paradigma lama, yaitu paradigma anggaran dibagi rata adalah Indonesia sudah tidak lagi menganut paradigma anggaran yang dibagi rata.		√				Bentuk gramatikal “kita harus meninggalkan paradigma lama” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh seorang presiden atas dasar kekuasaan. Dalam konteks ini, “kita harus meninggalkan paradigma lama” dimaknai dengan perintah Presiden yang telah berulang kali disampaikan agar Indonesia meninggalkan teori lama, yaitu paradigma anggaran dibagi rata. Sehingga, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi kekuasaan.	
85	Kita harus bekerja dengan		√	Kita harus	Wujud bahwa kita harus		√				Bentuk gramatikal “kita harus bekerja dengan	

No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks		Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal								
	paradigma baru, yaitu anggaran difokuskan untuk program-program prioritas.			bekerja dengan paradigma baru	bekerja dengan paradigma baru, yaitu anggaran difokuskan untuk program-program prioritas adalah Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) serta kementerian lainnya untuk memastikan anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk program prioritas nasional, benar-benar digunakan secara maksimal. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar anggaran dapat difokuskan untuk proyek atau program-program prioritas.						paradigma baru” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh seorang presiden atas dasar kekuasaan. Dalam konteks ini, “kita harus meninggalkan paradigma lama” dimaknai dengan perintah Presiden untuk bekerja dengan paradigma baru, yaitu anggaran difokuskan untuk program-program prioritas Sehingga, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi kekuasaan.
86	Esensinya adalah uang rakyat harus digunakan untuk kepentingan rakyat melalui program-program yang nyata, melalui kerja yang nyata, dan		√	Uang rakyat harus digunakan untuk kepentingan	Wujud bahwa uang rakyat harus digunakan untuk kepentingan rakyat melalui program-program yang nyata, melalui kerja yang				√		Bentuk gramatikal “uang rakyat harus digunakan untuk kepentingan rakyat” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh seorang presiden mengenai perekonomian negara. Dalam konteks ini, “uang



No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks		Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal								
	terasa manfaatnya bagi rakyat.			rakyat	nyata, dan terasa manfaatnya bagi rakyat adalah penggunaan APBN sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat.						rakyat harus digunakan untuk kepentingan rakyat” dimaknai dengan penggunaan uang rakyat untuk kepentingan rakyat yang diwujudkan melalui program-program yang nyata, melalui kerja yang nyata, dan terasa manfaatnya bagi rakyat. Sehingga, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.
87	Sudah tidak bisa lagi anggaran pembangunan, uang rakyat, habis untuk kegiatan operasional birokrasi seperti perjalanan dinas dan anggaran rapat yang sebenarnya dapat diefisienkan.		√	Sudah tidak bisa lagi anggaran pembangunan, uang rakyat, habis untuk kegiatan operasional birokrasi	Wujud bahwa sudah tidak bisa lagi anggaran pembangunan, uang rakyat, habis untuk kegiatan operasional birokrasi seperti perjalanan dinas dan anggaran rapat yang sebenarnya dapat diefisienkan adalah penggunaan APBN hanya untuk kepentingan rakyat. Karena, APBN merupakan uang rakyat yang sepatutnya diperuntukkan pula untuk kepentingan rakyat.				√		Bentuk gramatikal “sudah tidak bisa lagi anggaran pembangunan, uang rakyat, habis untuk kegiatan operasional birokrasi” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh seorang presiden mengenai perekonomian negara. Dalam konteks ini, “sudah tidak bisa lagi anggaran pembangunan, uang rakyat, habis untuk kegiatan operasional birokrasi” dimaknai dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang menganggap bahwa uang rakyat sudah tidak bisa lagi anggaran pembangunan, uang rakyat, habis untuk kegiatan operasional birokrasi seperti perjalanan dinas dan anggaran rapat yang sebenarnya dapat diefisienkan Sehingga, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.
88	Begitu pula tradisi lama penggunaan kalimat-kalimat yang bersayap pada nomenklatur penyusunan anggaran harus ditinggalkan		√	Nomenklatur penyusunan anggaran	Wujud bahwa tradisi lama penggunaan kalimat-kalimat yang bersayap pada nomenklatur penyusunan anggaran harus ditinggalkan				√		Bentuk gramatikal “nomenklatur penyusunan anggaran” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu hal yang berhubungan dengan perekonomian negara. Dalam konteks ini, “nomenklatur penyusunan anggaran” dimaknai

No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis		
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik		Ekonomi	Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
	karena berujung pada ketidakefisienan penggunaan dana pembangunan.				karena berujung pada ketidakefisienan penggunaan dana pembangunan adalah dengan adanya penyederhanaan nomenklatur anggaran agar lebih jelas serta tidak lagi menggunakan kalimat yang bersayap.						dengan pembentukan penyusunan anggaran. Dalam kalimat tersebut presiden Joko Widodo menyatakan bahwa tradisi lama penggunaan kalimat-kalimat yang bersayap pada nomenklatur penyusunan anggaran harus ditinggalkan karena berujung pada ketidakefisienan penggunaan dana pembangunan. Sehingga, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.	
89	Aspek strategis ketiga adalah politik luar negeri.	√		Politik luar negeri	Wujud bahwa politik luar negeri sebagai aspek strategis ketiga adalah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dapat digunakan untuk mengatur hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia.			√			Kosakata “politik luar negeri” dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu kebijakan mengenai pemerintahan negara dalam rangka melakukan hubungan dengan negara-negara luar. Dalam konteks ini, “politik luar negeri” dimaknai dengan arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk kepentingan nasional negara tersebut dalam lingkup dunia internasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa kalimat tersebut mengandung ideologi politik.	
90	Dengan diplomasi yang kuat Pemerintah mempercepat penjangkakan berbagai kerjasama perdagangan internasional dan mempertimbangkan partisipasi Indonesia di <i>Trans-Pacific Partnership Agreement</i> (TPPA).		√	Kerjasama perdagangan internasional	Wujud bahwa dengan diplomasi yang kuat Pemerintah mempercepat penjangkakan berbagai kerjasama perdagangan internasional dan mempertimbangkan				√		Bentuk gramatikal “kerjasama perdagangan internasional” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah tindakan yang diambil oleh pemerintah mengenai perekonomian negara. Dalam konteks ini, “kerjasama perdagangan internasional” dimaknai dengan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara yang saling menguntungkan untuk	

No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks		Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal								
	RCEP, dan lain-lainnya.				partisipasi Indonesia di <i>Trans-Pacific Partnership Agreement</i> (TPPA), RCEP, dan lain-lainnya adalah Indonesia tidak jadi bergabung dengan TPPA karena dianggap belum memiliki kesiapan yang matang.						memenuhi kebutuhan warga negaranya. Dalam kalimat tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dengan diplomasi yang kuat Pemerintah mempercepat peninjauan berbagai kerjasama perdagangan internasional dan mempertimbangkan partisipasi Indonesia di <i>Trans-Pacific Partnership Agreement</i> (TPPA), RCEP, dan lain-lainnya. Sehingga, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.
91	Kita juga terus mendorong penyelesaian konflik internasional secara damai.		√	Mendorong penyelesaian konflik internasional secara damai	Wujud bahwa Indonesia terus mendorong penyelesaian konflik internasional secara damai adalah Indonesia dan juga Turki merupakan negara yang memiliki semangat yang sama untuk mendorong penyelesaian konflik yang terjadi di beberapa negara secara damai, termasuk di dalamnya konflik Qatar.					√	Bentuk gramatikal “mendorong penyelesaian konflik internasional secara damai” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu tindakan yang dilakukan oleh Indonesia dalam hal sosial. Dalam konteks ini, “mendorong penyelesaian konflik internasional secara damai” dimaknai dengan Indonesia terus mendukung penyelesaian konflik internasional secara damai. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi sosial budaya.
92	Begitu pula Indonesia terus terlibat aktif dalam mendorong penyelesaian perselisihan di Laut Tiongkok Selatan melalui negosiasi dan upaya damai paska penetapan Mahkamah		√	Terlibat aktif dalam mendorong penyelesaian perselisihan	Wujud bahwa Indonesia terus terlibat aktif dalam mendorong penyelesaian perselisihan di Laut Tiongkok Selatan melalui negosiasi dan upaya damai					√	Bentuk gramatikal “terlibat aktif dalam mendorong penyelesaian perselisihan” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu tindakan yang dilakukan oleh Indonesia dalam hal sosial. Dalam konteks ini, “terlibat aktif dalam mendorong perselisihan” dimaknai dengan peran aktif

No.	Data	Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
	Arbitrase Internasional di Den Haag.					paska penetapan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag adalah pada tahun 2015, melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, Pemerintah Indonesia terus mendorong penyelesaian kesepakatan kode etik ( <i>Code of Conduct (CoC)</i> ) untuk mengatasi sengketa Laut China Selatan. Selain itu, Indonesia juga mendorong penyelesaian perselisihan di Laut Tiongkok Selatan melalui negosiasi dan upaya damai paska penetapan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag.						Indonesia dalam mendorong penyelesaian perselisihan di Laut Tiongkok Selatan melalui negosiasi dan upaya damai pasca penetapan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi sosial budaya.
93	Kita juga mendorong penuntasan perang saudara di Suriah secara damai serta pemenuhan hak-hak kemerdekaan rakyat Palestina.		√	Mendorong penuntasan perang saudara di Suriah secara damai		Wujud bahwa Indonesia mendorong penuntasan perang saudara di Suriah secara damai serta pemenuhan hak-hak kemerdekaan rakyat Palestina adalah Indonesia terus menyuguhkan pendekatan secara <i>soft</i>					√	Bentuk gramatikal “mendorong penuntasan perang saudara di Suriah secara damai” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu tindakan yang dilakukan oleh Indonesia dalam hal sosial. Dalam konteks ini, “mendorong penuntasan perang saudara di Suriah secara damai” dimaknai sebagai peran Indonesia dalam mendukung penuntasan perang saudara di Suriah secara damai serta pemenuhan hak-hak kemerdekaan rakyat

No.	Data Kalimat	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis		
		Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik		Ekonomi	Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
					<i>power</i> . Hal itu dianggap akan lebih bertahan lama daripada <i>hard power</i> . Hal itu pun sangat dipahami dan diapresiasi oleh Sekjen PBB.						Palestina. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi sosial budaya.	
94	Seiring dengan itu, kita tingkatkan kualitas perlindungan WNI di luar negeri.		√	Tingkatkan kualitas perlindungan WNI	Wujud bahwa Indonesia meningkatkan kualitas perlindungan WNI di luar negeri dapat dilihat dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Masudi yang menyatakan bahwa diplomasi dan politik luar negeri Indonesia harus dapat memberikan rasa aman kepada WNI. Hal tersebut disampaikan oleh Menlu dalam Pernyataan Pers Tahunan di kantor Kemenlu, Jakarta, 2015.					√	Bentuk gramatikal “tingkatkan kualitas perlindungan WNI” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu tindakan yang dilakukan oleh Indonesia dalam hal sosial. Dalam konteks ini, “tingkatkan kualitas perlindungan WNI” dimaknai dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas perlindungan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi sosial budaya.	
95	Melalui diplomasi menyeluruh dari berbagai jalur, kita telah berhasil membebaskan 14 WNI yang disandera kelompok bersenjata di Filipina Selatan.	√		Diplomasi	Wujud bahwa melalui diplomasi menyeluruh dari berbagai jalur, kita telah berhasil membebaskan 14 WNI yang disandera kelompok bersenjata di Filipina Selatan adalah			√			Kosakata “diplomasi” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu tindakan yang berkaitan dengan pemerintahan. Dalam konteks ini, “diplomasi” dimaknai dengan negosiasi atau perundingan. Dalam kalimat tersebut Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa melalui diplomasi menyeluruh dari berbagai jalur, kita telah berhasil	

No.	Data		Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						adanya konfirmasi dari pemerintah bahwa 14 WNI yang disandera kelompok militan Filipina telah berhasil diselamatkan pemerintah. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengatakan bahwa pemerintah melakukan diplomasi secara total dalam membebaskan ke-14 sandera.						membebaskan 14 WNI yang disandera kelompok bersenjata di Filipina Selatan. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi politik.
96	Melalui diplomasi pula, 2 WNI yang disandera di Papua Nugini berhasil dibebaskan.	√		Diplomasi		Wujud bahwa melalui diplomasi pula, 2 WNI yang disandera di Papua Nugini berhasil dibebaskan dapat dilihat dari pernyataan dari staf ahli presiden, Lenis Kogoya, yang mengklaim pembebasan dua WNI yang disandera oleh kelompok bersenjata di Papua Nugini dilakukan menggunakan penyelesaian adat. Lenis Kogoya mengaku bahwa pemerintah memerintahkan kepala suku di Papua untuk berkomunikasi dengan			√			Kosakata “diplomasi” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu tindakan yang berkaitan dengan pemerintahan. Dalam konteks ini, “diplomasi” dimaknai dengan negosiasi atau perundingan. Dalam kalimat tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa melalui diplomasi pula, 2 WNI yang disandera di Papua Nugini berhasil dibebaskan. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi politik.

No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis		
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik		Ekonomi	Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
					kepala suku di Papua Nugini.							
97	Sedangkan dalam rangka pemantapan kedaulatan, Pemerintah mengedepankan pembangunan daerah-daerah terdepan, daerah-daerah yang menjadi beranda Indonesia.	√		Kedaulatan	Wujud bahwa dalam rangka pemantapan kedaulatan, Pemerintah mengedepankan pembangunan daerah-daerah terdepan, daerah-daerah yang menjadi beranda Indonesia adalah pada kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat tanggal 16-18 Maret 2017, Presiden Joko Widodo secara jelas menggambarkan keinginannya untuk mengubah wajah perbatasan dari 'daerah terluar' menjadi 'daerah terdepan', tepatnya 'etalase depan negara'.			√			Kosakata "kedaulatan" yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu keadaan pemerintahan negara Indonesia. Dalam konteks ini, "kedaulatan" dimaknai dengan kekuasaan. Dalam kalimat tersebut, terdapat pernyataan dalam rangka pemantapan kedaulatan, Pemerintah mengedepankan pembangunan daerah-daerah terdepan, daerah-daerah yang menjadi beranda Indonesia. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi politik.	
98	Kita kembangkan daerah seperti Entikong, Natuna, dan Atambua agar dunia melihat bahwa Indonesia adalah negara besar dan setiap jengkal tanah airnya diperhatikan dengan sungguh-sungguh.		√	Kita kembangkan daerah seperti Entikong, Natuna, dan Atambua	Wujud bahwa pemerintah mengembangkan daerah seperti Entikong, Natuna, dan Atambua agar dunia melihat bahwa Indonesia adalah negara besar dan setiap jengkal tanah airnya		√				Bentuk gramatikal "kita kembangkan daerah seperti Entikong, Natuna, dan Atambua" yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu pernyataan yang dilakukan oleh seorang presiden atas kekuasaannya. Dalam konteks ini, "kita kembangkan daerah seperti Entikong, Natuna, dan Atambua" dimaknai sebagai seruan Presiden Joko	

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						diperhatikan dengan sungguh-sungguh, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur jalan di Entikong .						Widodo untuk terus memajukan daerah seperti Entikong, Natuna, dan Atambua dengan tujuan agar dunia melihat bahwa Indonesia adalah negara besar dan setiap jengkal tanah airnya diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kalimat tersebut mengandung ideologi kekuasaan.
99	Aspek strategis keempat adalah demokrasi, stabilitas politik, dan keamanan.	√		Stabilitas Politik		Wujud bahwa demokrasi, stabilitas politik, dan keamanan sebagai aspek strategis keempat adalah stabilitas politik di Indonesia mampu menarik pemodal yang berinvestasi di Indonesia.			√			Kosakata “stabilitas politik” menunjukkan suatu keadaan negara yang berkaitan dengan pemerintahan. Dalam konteks ini, “stabilitas politik” dimaknai dengan keadaan politik di tanah air yang seharusnya berkembang tumbuh dan sesuai dengan landasan Pancasila dan UUD 1945 dengan sewajarnya, tanpa adanya pergolakan-pergolakan politikk yang menimbulkan kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kalimat tersebut mengandung ideologi politik.
100	Bangsa ini tidak akan produktif, tidak akan maju, tidak akan menjadi bangsa pemenang apabila tidak menghargai hak asasi manusia dan terus didera gonjang-ganjing politik.		√	Terus didera gonjang-ganjing politik		Wujud bahwa bangsa ini tidak akan produktif, tidak akan maju, tidak akan menjadi bangsa pemenang apabila tidak menghargai hak asasi manusia dan terus didera gonjang-ganjing politik adalah jika masyarakat Indonesia tidak menghargai HAM dan mudah terpengaruh oleh gonjang-ganjing politik,			√			Bentuk gramatikal “terus didera gonjang-ganjing politik” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu keadaan yang berkaitan dengan pemerintahan. Dalam konteks ini, “terus didera gonjang-ganjing politik” dimaknai dengan terus diserang dengan guncangan politik. Kalimat tersebut menyatakan bahwa bangsa ini tidak akan produktif, tidak akan maju, tidak akan menjadi bangsa pemenang apabila tidak menghargai hak asasi manusia dan terus didera gonjang-ganjing politik. Oleh karena itu, kalimat tersebut mengandung ideologi politik.



No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis		
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik		Ekonomi	Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
					maka bangsa Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang produktif dan tidak akan menjadi bangsa pemenang.							
101	Selanjutnya, Pemerintah bersama DPR-RI dan DPD-RI terus melakukan upaya perbaikan regulasi Pilkada, agar dapat terlaksana secara lebih baik untuk Pilkada serentak tahun 2017 dan Pilkada-pilkada selanjutnya.		√	Melakukan upaya perbaikan regulasi Pilkada	Wujud bahwa Pemerintah bersama DPR-RI dan DPD-RI terus melakukan upaya perbaikan regulasi Pilkada, agar dapat terlaksana secara lebih baik untuk Pilkada serentak tahun 2017 dan Pilkada-pilkada selanjutnya adalah pada Juni 2016, telah dikeluarkan UU Pilkada yang baru yang disahkan oleh DPR.			√			Bentuk gramatikal “melakukan upaya perbaikan regulasi Pilkada” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu tindakan yang berkaitan dengan pemerintahan negara. Dalam konteks ini, “melakukan upaya perbaikan regulasi Pilkada” dimaknai dengan kebijakan pemerintah bersama DPR-RI dan DPD-RI terus melakukan upaya perbaikan regulasi Pilkada, agar dapat terlaksana secara lebih baik untuk Pilkada serentak tahun 2017 dan Pilkada-pilkada selanjutnya. Oleh karena itu, kalimat tersebut mengandung ideologi politik.	
102	Sementara itu, kedaulatan bangsa dan keamanan masyarakat terus terjaga karena TNI dan Polri terus siaga dan tak pernah berhenti mengabdikan.		√	Kedaulatan bangsa dan keamanan masyarakat	Wujud bahwa kedaulatan bangsa dan keamanan masyarakat terus terjaga karena TNI dan Polri terus siaga dan tak pernah berhenti mengabdikan adalah TNI dan Polri selalu bersiaga dalam menghadapi semua hal yang terjadi di Indonesia.			√			Bentuk gramatikal “kedaulatan bangsa dan keamanan masyarakat” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu keadaan yang berkaitan dengan pemerintahan negara. Dalam konteks ini, “kedaulatan bangsa dan keamanan masyarakat” dimaknai dengan kemandirian bangsa dan keamanan masyarakat yang terus terjaga karena TNI dan Polri terus siaga dan tak pernah berhenti mengabdikan. Oleh karena itu, kalimat tersebut mengandung ideologi politik.	

No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks		Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal								
103	Pemerintah terus berupaya meningkatkan profesionalisme TNI dan Polri dengan pendekatan kesejahteraan dan modernisasi persenjataan.		√	Pemerintah terus berupaya meningkatkan profesionalisme TNI dan Polri	Wujud bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan profesionalisme TNI dan Polri dengan pendekatan kesejahteraan dan modernisasi persenjataan adalah pada tanggal 5 Oktober 2016, institusi pertahanan TNI yang berusia 71 tahun dituntut untuk menjadi lembaga negara yang profesional, yang lebih mengedepankan kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negara.			√			Bentuk gramatikal “pemerintah terus berupaya meningkatkan profesionalisme TNI dan Polri” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu siasat yang berkaitan dengan pemerintahan negara. Dalam konteks ini, “pemerintah terus berupaya meningkatkan profesionalisme TNI dan Polri” dimaknai sebagai usaha pemerintah untuk mencapai kedaulatan bangsa dan keamanan masyarakat yang dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan dan modernisasi persenjataan. Oleh karena itu, kalimat tersebut mengandung ideologi politik.
104	Pemerintah juga mendukung kemandirian industri dalam negeri untuk memasok alutsista TNI dan alat operasional Polri.		√	Pemerintah juga mendukung kemandirian industri dalam negeri	Wujud bahwa pemerintah juga mendukung kemandirian industri dalam negeri untuk memasok alutsista TNI dan alat operasional Polri adalah sampai saat ini, Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk memperkuat pertahanan teritori di Natuna, Provinsi Kepri, yang bersebelahan			√			Bentuk gramatikal “pemerintah juga mendukung kemandirian industri dalam negeri” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu tindakan yang berkaitan dengan pemerintahan negara. Dalam konteks ini, “pemerintah juga mendukung kemandirian industri dalam negeri” dimaknai sebagai tindakan pemerintah untuk mendorong kemandirian industri dalam negeri untuk memasok alutsista TNI dan alat operasional Polri. Oleh karena itu, kalimat tersebut mengandung ideologi politik.

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						dengan kawasan Laut China Selatan dengan memprioritaskan pembangunan alutsista dan fasilitas di wilayah tersebut untuk menjaga kedaulatan NKRI.						
105	Secara khusus saya ingin mengapresiasi keberhasilan TNI dan Polri yang sudah melumpuhkan salah satu pemimpin kelompok teroris di Indonesia, yaitu Santoso.	√		Mengapresiasi		Wujud bahwa secara khusus, Presiden Joko Widodo ingin mengapresiasi keberhasilan TNI dan Polri yang sudah melumpuhkan salah satu pemimpin kelompok teroris di Indonesia, yaitu Santoso adalah pada saat dilumpuhkannya kelompok teroris Santoso berkat keberhasilan TNI dan Polri Juli 2016 lalu, Presiden Joko Widodo langsung memberikan apresiasi yang disampaikan melalui Juru Bicara Presiden, Johan Budi, di Istana Kepresidenan, Jakarta.					√	Kosakata “mengapresiasi” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu nilai sosial di kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, “mengapresiasi” dimaknai dengan memberikan penghargaan. Kalimat tersebut menyatakan bahwa secara khusus Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan atas keberhasilan TNI dan Polri yang sudah melumpuhkan salah satu pemimpin kelompok teroris di Indonesia, yaitu Oleh karena itu, kalimat tersebut mengandung ideologi sosial budaya.
106	Tetap waspada dan terus tekan potensi dan ancaman terorisme		√	Tetap waspada dan		Wujud bahwa tetap waspada dan terus tekan		√				Bentuk gramatikal “tetap waspada dan terus tekan potensi dan ancaman terorisme di Nusantara”

No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis		
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik		Ekonomi	Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
	di Nusantara.			terus tekan potensi dan ancaman terorisme di Nusantara		potensi dan ancaman terorisme di Nusantara adalah permintaan Presiden Joko Widodo untuk TNI dan Polri agar tetap menjalankan operasi serupa guna menumpas jaringan teroris garis keras di Indonesia.						merupakan suatu peringatan yang diucapkan oleh Presiden Joko Widodo atas dasar kekuasaan. Dalam konteks ini, “tetap waspada dan terus tekan potensi dan ancaman terorisme di Nusantara” dimaknai sebagai himbuan dari Presiden Joko Widodo untuk seluruh warga Indonesia. Sehingga kalimat tersebut mengandung ideologi kekuasaan.
107	Kita hanya dapat membuat terobosan bagi kemajuan bangsa dan negara kalau pola pikir kita progresif, optimis, dan inovatif.		√	Pola pikir kita progresif, optimis, dan inovatif		Wujud bahwa pemerintah hanya dapat membuat terobosan bagi kemajuan bangsa dan negara kalau pola pikir kita progresif, optimis, dan inovatif adalah Pemerintah memiliki wewenang untuk membuat terobosan demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia dan hal itu dapat terlaksana jika masyarakat Indonesia memiliki pola pikir yang progresif, optimis, dan inovatif.					√	Bentuk gramatikal “pola pikir kita progresif, optimis, dan inovatif” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu nilai-nilai sosial yang mencerminkan kebudayaan masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, “pola pikir kita progresif, optimis, dan inovatif” dimaknai sebagai konvi agar Indonesia dapat membuat bagi kemajuan bangsa dan negara. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi sosial budaya.
108	Untuk itu Pemerintah terus menjalankan proses Revolusi Karakter Mental, yaitu perubahan pola pikir dan	√		Revolusi Karakter Mental		Wujud bahwa Pemerintah terus menjalankan proses Revolusi Karakter Mental, yaitu perubahan pola pikir			√			Kosakata “Revolusi Karakter Mental” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah tindakan atau gagasan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Indonesia. Dalam

No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks		Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal								
	perubahan sistem yang dimulai dari berbagai institusi pemerintahan.				dan perubahan sistem yang dimulai dari berbagai institusi pemerintahan adalah sampai saat ini Pemerintah masih menjalankan program Revolusi Mental tersebut dalam berbagai bidang.						konteks ini, “Revolusi Karakter Mental” dimaknai sebagai suatu program yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo untuk adanya perubahan pola pikir dan perubahan sistem yang dimulai dari berbagai institusi pemerintahan. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi politik.
109	Oleh sebab itu, kita harus percaya diri, harus yakin, bahwa kita bisa menjadi bangsa pemenang.		√	Kita harus percaya diri, harus yakin, bahwa kita bisa menjadi bangsa pemenang	Wujud bahwa kita harus percaya diri, harus yakin, bahwa kita bisa menjadi bangsa pemenang adalah dengan adanya kepercayaan dan keyakinan pada diri masyarakat Indonesia, maka mereka akan menjadi semakin optimis bahwa bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang.		√				Bentuk gramatikal “kita harus percaya diri, harus yakin, bahwa kita bisa menjadi bangsa pemenang” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu seruan yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo atas kekuasaannya. Dalam konteks ini, “kita harus percaya diri, harus yakin, bahwa kita bisa menjadi bangsa pemenang” dimaknai sebagai himbauan Presiden Joko Widodo kepada rakyatnya. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi kekuasaan.
110	Di akhir Pidato Kenegaraan di depan Sidang Terhormat, saya mengajak segenap elemen bangsa untuk bersinergi mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, serta mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial.		√	Bersinergi mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, serta mengatasi ketimpangan dan	Wujud bahwa di Di akhir Pidato Kenegaraan di depan Sidang Terhormat, Presiden Joko Widodo mengajak segenap elemen bangsa untuk bersinergi mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, serta mengatasi ketimpangan dan				√		Bentuk gramatikal “bersinergi mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, serta mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu siasat mengenai perekonomian di Indonesia. Dalam konteks ini, “bersinergi mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, serta mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial” dimaknai sebagai seruan Presiden Joko Widodo

No.	Data		Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
				kesenjangan sosial		kesenjangan sosial adalah sebuah seruan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika menutup pidato kenegaraannya kepada seluruh rakyat Indonesia agar tetap bersinergi mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, serta mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial.						kepada rakyatnya. Sehingga kalimat tersebut mengandung ideologi ekonomi.
111	Tanpa kerjasama, tanpa gotong royong, kita akan digulung oleh arus sejarah.	√		Kerjasama		Wujud bahwa tanpa kerjasama, tanpa gotong royong, kita akan digulung oleh arus sejarah adalah tanpa adanya kerjasama dan gotong royong antarrakyat Indonesia, maka keinginan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju tidak dapat terwujud. Bangsa Indonesia tidak dapat berkembang, bahkan kemungkinan mengalami kemunduran sehingga bangsa Indonesia dapat					√	Kosakata “kerjasama” menunjukkan budaya yang tertanam pada masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, “kerjasama” dimaknai dengan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh seluruh warga Indonesia untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu, “gotong royong” dimaknai dengan bekerja bersama-sama. Dalam kalimat tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa tanpa kerjasama, tanpa gotong royong, kita akan digulung oleh arus sejarah. Jadi, kalimat tersebut mengandung ideologi sosial budaya.

No.	Data Kalimat	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis		
		Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik		Ekonomi	Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
112	Oleh sebab itu, apapun bidang yang saudara-saudara geluti, jadilah yang terbaik.		√	Jadilah yang terbaik		tergulung oleh sejarah.					√	Bentuk gramatikal “jadilah yang terbaik” dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu karakter budaya yang seharusnya dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, “jadilah yang terbaik” dimaknai sebagai himbuan Presiden Joko Widodo kepada seluruh warga Indonesia untuk selalu menjadi yang terbaik dalam bidang apapun yang digeluti oleh warganya. Sehingga kalimat tersebut mengandung ideologi sosial budaya.
113	Dengan kerja nyata bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang, dengan Kerja nyata bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa maju, menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berbudaya.	√		Kerja nyata		Wujud bahwa dengan kerja nyata bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang, dengan Kerja nyata bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa maju, menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berbudaya adalah dengan adanya kerja nyata yang dilakukan oleh seluruh elemen bangsa Indonesia maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa pemenang, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berdaulat, mandiri,			√			Kosakata “kerja nyata” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu siasat mengenai pemerintahan negara. Dalam konteks ini, “kerja nyata dimaknai dengan ketegasan terhadap kesinambungan pemerintah. Dalam kalimat tersebut Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dengan kerja nyata bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang, dengan Kerja nyata bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa maju, menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berbudaya Sehingga dalam kalimat tersebut terdapat ideologi politik.

No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis		
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik		Ekonomi	Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						serta berbudaya.						
114	Menuju kemajuan Indonesia Raya!	√		Kemajuan		Wujud bahwa menuju kemajuan Indonesia Raya adalah suatu keadaan yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia agar Indonesia menjadi negara yang maju.			√			Kosakata “kemajuan” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu siasat mengenai pemerintahan negara. Dalam konteks ini, “kemajuan” dimaknai sebagai target yang akan dituju atau dicapai oleh bangsa Indonesia. Sehingga dalam kalimat tersebut terdapat ideologi politik.
115	Dirgahayu Republik Indonesia!		√	Dirgahayu Republik Indonesia		Wujud bahwa Dirgahayu Republik Indonesia adalah pada tahun 2016, Indonesia berusia 71 tahun.	√					Bentuk gramatikal “Dirgahayu Republik Indonesia!” menunjukkan suatu keadaan atas pengaruh kepemimpinan para pemimpin bangsa terdahulu. Dalam konteks ini, “Dirgahayu Republik Indonesia” dimaknai dengan ucapan hari lahirnya Republik Indonesia. Jadi dalam kalimat tersebut terkandung ideologi hegemoni.



No.	Data	Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
1.	Sebagai bangsa yang besar, kita harus percaya diri, harus optimis, bahwa kita dapat mengatasi segala persoalan yang menghadang di hadapan kita.		√	“kita harus percaya diri, harus optimis”	Teks Pidato Kenegaraan tersebut dibuat atas ide-ide yang berasal dari Presiden Joko Widodo yang kemudian dijabarkan oleh Kementerian Kesekretariatan Negara hingga akhirnya disetujui kembali oleh Presiden. Dalam pidato kenegaraan tahun 2015, ide-ide tersebut berkaitan dengan situasi-situasi yang terjadi di Indonesia dan juga program-program yang dilakukan oleh pemerintah pada masa jabatannya. Ide-ide yang terdapat dalam pidato tersebut berkaitan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang	Wujud dari kepercayaan diri dan keoptimisan bangsa Indonesia dalam mengatasi persoalan adalah adanya keyakinan bahwa bangsa Indonesia harus optimis untuk menyelesaikan masalah apapun yang terjadi di Indonesia.		√				Bentuk gramatikal “kita harus percaya diri, harus optimis” dalam kalimat tersebut mencerminkan unsur kekuasaan. Dalam konteks ini, sebagai seorang Presiden tentu saja Jokowi memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi rakyatnya atau pendengar pidatonya untuk melakukan hal sesuai dengan yang dikatakannya dalam pidato tersebut. Sehingga, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi kekuasaan.
2.	Padahal kalau kita cermati lebih seksama, menipisnya nilai kesantunan dan tatakrama, sekali lagi, menipisnya nilai kesantunan dan tatakrama, juga berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa.		√	Nilai kesantunan dan tatakrama.	Wujud dari menipisnya nilai kesantunan dan tatakrama adalah banyaknya masyarakat yang bersikap mengikuti egonya masing-masing, tidak memikirkan kembali nilai-nilai kesantunan dan tatakrama. Semakin banyak masyarakat yang bersikap seperti itu tentu saja akan membahayakan kelangsungan hidup bangsa.					√	Bentuk gramatikal “nilai kesantunan dan tatakrama” menunjukkan sebuah nilai yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Hal itu tentu saja berhubungan dengan kebudayaan masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, nilai dari kesantunan dan tatakrama dimaknai dengan nilai kesopanan yang mencerminkan sikap-sikap baik terhadap sesama masyarakat Indonesia, begitu pula tatakrama dimaknai dengan suatu adat sopan santun terhadap sesama masyarakat Indonesia. Oleh karena itu ideologi sosial budaya dapat ditemukan dalam kalimat tersebut.	

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
3.	Menipisnya budaya saling menghargai, mengeringnya kultur tenggang rasa, baik di masyarakat maupun institusi resmi seperti lembaga penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, media, dan partai politik, menyebabkan bangsa ini terjebak pada lingkaran ego masing-masing.		√	Budaya saling menghargai	dialami Indonesia. Ide-ide yang berkaitan dengan kondisi sosial antara lain, pernyataan Presiden bahwa Indonesia dapat mengatasi segala persoalan yang menghadang, menipisnya nilai sosial, lunturnya nilai-nilai dan norma-norma kehidupan berbangsa dan bernegara, persatuan, kerja keras untuk membangun bangsa dan negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlindungan sosial, program bantuan sosial, kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, dan perhatian terhadap	Wujud dari menipisnya budaya saling menghargai dan mengeringnya kultur tenggang rasa adalah banyaknya orang yang tidak menghargai pendapat atau kebijakan yang ada sehingga budaya tenggang rasa pun menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan bangsa Indonesia terjebak pada lingkaran ego masing-masing.					√	Bentuk gramatikal “budaya saling menghargai” dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa kalimat tersebut mengandung ideologi sosial budaya. Dalam konteks ini, budaya saling menghargai, mengurangnya kultur tenggang rasa dimaknai dengan suatu sikap saling menghormati satu sama lain yang seharusnya selalu ada di kalangan masyarakat dan institusi resmi. Sehingga, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi sosial budaya.
4.	Tanpa kesantunan politik, tatakrama hukum dan ketatanegaraan, serta kedisiplinan ekonomi, kita akan kehilangan optimisme, dan lamban mengatasi persoalan-persoalan lain termasuk tantangan ekonomi yang saat ini sedang dihadapi bangsa	√		Kesantunan politik, kedisiplinan ekonomi.	bangsa dan negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlindungan sosial, program bantuan sosial, kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, dan perhatian terhadap	Wujud dari hilangnya optimisme dan lambannya mengatasi persoalan adanya penilaian bahwa pemerintah lamban dalam mengatasi persoalan banjir. Hal ini membuat masyarakat kehilangan optimisme atau merasa pesimis atas			√		√	Dalam kalimat tersebut terdapat kosakata yang berhubungan dengan pemerintahan Indonesia, yaitu “kesantunan politik”. Hal itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut mengandung ideologi politik. Selain itu, terdapat pula kosakata yang berhubungan dengan ekonomi pun dapat ditemukan dalam kalimat tersebut, yaitu “kedisiplinan ekonomi”. Jadi, selain mengandung ideologi politik, kalimat tersebut juga mengandung ideologi

No.	Data	Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
	Indonesia.				tanah Papua. Ide-ide yang berkaitan dengan kondisi ekonomi antara lain adalah percepatan program aksi pembangunan, transformasi fundamental perekonomian nasional, paradigma pembangunan, kemakmuran rakyat, kebijakan fiskal, pengendalian anggaran, penataan kembali sistem subsidi, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, pembangunan nasional, pembangunan tol laut, penggunaan rupiah untuk transaksi dalam negeri, dan transformasi ekonomi. Sementara itu, ide-ide	teratasinya masalah banjir. Hal ini akan meresahkan masyarakat dan membuat masyarakat beranggapan bahwa banjir akan terus terjadi.						ekonomi. Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo berpendapat bahwa kesantunan politik, tatakrama hukum dan ketatanegaraan, serta kedisiplinan ekonomi merupakan hal-hal penting untuk mengatasi persoalan-persoalan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, salah satunya yaitu tantangan ekonomi.
5.	Kita optimis dapat melaluinya dengan selamat.	√		Optimis.		Wujud dari Indonesia dapat melalui gejolak ekonomi dengan selamat adalah fakta bahwa ekonomi Indonesia pada bulan April-Juni 2016 terus membaik menjadi 5,18% dari 4,8% pada tahun 2015.					√	Kosakata “optimis” dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu karakter yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karakter merupakan hal yang berkaitan dengan kebudayaan. Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo ingin memberikan sugesti kepada para pendengar pidatonya bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang optimis untuk melalui permasalahan yang dihadapinya dengan selamat. Permasalahan dalam hal ini berupa guncangan ekonomi. Jadi, dalam kalimat tersebut terdapat ideologi sosial budaya.
6.	Dengan kemampuan yang ada, kita berikan bantuan dan pertolongan kepada warga yang tertimpa musibah.		√	Kita berikan bantuan		Wujud dari pemerintah memberikan bantuan dan pertolongan kepada warga yang tertimpa musibah		√				Bentuk gramatikal “kita berikan bantuan” yang terdapat dalam kalimat tersebut mencerminkan unsur kekuasaan. Sebagai seorang presiden, tentu saja Jokowi memiliki kekuasaan atau kewenangan

No.	Data	Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
					yang berkaitan dengan kondisi politik adalah kepentingan nasional, perhatian terhadap laut Indonesia, Indonesia sebagai negara maritim, Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia, kekuatan pertahanan negara, sinergisitas, sinkronisasi, dan harmonisasi KPK-POLRI-Kejaksanaan Agung, rekonsiliasi nasional, dan Gerakan Nasional Revolusi Mental.	adalah pada saat itu pemerintah memberi santunan sebesar Rp 15.000.000; dan juga bantuan pendidikan dan pekerjaan untuk warga sipil korban jatuhnya pesawat Hercules milik TNI AU.						agar rakyatnya mengikuti apa yang dikatakannya. Dalam hal ini, Jokowi menghimbau rakyatnya untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada korban musibah. Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah memberikan bantuan dan pertolongan kepada warga yang tertimpa musibah, sesuai dengan kemampuan yang ada. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terdapat ideologi kekuasaan.
7.	Kita berikan penghormatan dan penghargaan kepada para prajurit yang gugur akibat jatuhnya pesawat Hercules.		√	berikan penghormatan dan penghargaan		Wujud dari penghormatan dan penghargaan kepada para prajurit yang gugur akibat jatuhnya pesawat Hercules adalah didirikannya prasasti di tujuh makam korban pesawat jatuh tersebut.					√	Bentuk gramatikal “berikan penghormatan dan penghargaan” mengandung arti perbuatan menghormati dan perbuatan menghargai. Kedua perbuatan tersebut merupakan perilaku yang menjadi budaya sosial di Indonesia. Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo mengajak untuk memberikan penghormatan dan penghargaan kepada para prajurit yang gugur akibat jatuhnya pesawat Hercules. Pada Selasa, 30 Juni 2015, sebuah pesawat <i>Lockheed C-130</i> Hercules milik TNI AU terjatuh, dua menit setelah lepas landas dari Pangkalan Udara Soewondo di Padang Bulan, kota Medan, Sumatera Utara. Pesawat tersebut

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
												awalnya direncanakan untuk terbang ke Lanud Tanjung Pinang, setelah menyelesaikan penerbangan dari Lanud Dumai, Lanud Pekanbaru, Bandar Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, dan Bandar Udara Abdul Rachman Saleh di Malang. Pesawat juga rencananya berangkat menuju Lanud Ranai, Lanud Pontianak, dan Lanud Yogyakarta. Sebelum jatuh, dilaporkan bahwa pilot pesawat sempat meminta izin untuk kembali ke pangkalan. Pesawat tersebut membawa 12 kru dan 101 penumpang yang merupakan prajurit TNI dan keluarganya, seluruhnya dinyatakan meninggal. Sehingga dalam kalimat tersebut terdapat ideologi sosial budaya.
8.	Sejarah telah mengajarkan kepada kita, kunci untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut adalah persatuan.		√	Sejarah telah mengajarkan kepada kita		Wujud dari persatuan sebagai kunci untuk mengatasi persoalan adalah tanpa adanya persatuan maka bangsa Indonesia akan mudah diambil alih atau dijajah kembali oleh negara lain.	√					Bentuk gramatikal “sejarah telah mengajarkan kepada kita” menunjukkan suatu pernyataan atas pengaruh kekuasaan di masa lalu Indonesia. Dalam konteks ini, pernyataan Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya atau pada masa lalu Indonesia, persatuan bangsa Indonesia merupakan sebuah kunci untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh

No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis		
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik		Ekonomi	Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
											bangsa Indonesia. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi hegemoni.	
9.	Oleh sebab itu, untuk mengatasi seluruh persoalan bangsa dewasa ini, kita harus tetap utuh, bekerja bahu membahu, tidak boleh terpecah belah oleh pertentangan politik dan kepentingan jangka pendek.	√		Persoalan bangsa	Wujud dari harus tetap utuh, bekerja bahu membahu, dan tidak boleh terpecah belah oleh pertentangan politik dan kepentingan jangka pendek dalam mengatasi seluruh persoalan bangsa adalah seringkali Presiden Joko Widodo mengingatkan dan menghimbau rakyatnya untuk melakukan ketiga hal tersebut ketika ada persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia.			√			Kosakata “persoalan bangsa” dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan. Dalam konteks ini, bentuk gramatikal “persoalan bangsa” dimaknai dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Permasalahan-permasalahan tersebut, menurut Presiden Joko Widodo, dapat diatasi dengan menjaga keutuhan bangsa, bekerja bahu membahu, dan tidak boleh terpecah belah oleh pertentangan politik dan kepentingan jangka pendek. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi politik.	
10.	Keputusan ini saya ambil guna memperkuat kinerja Pemerintah untuk percepatan implementasi program aksi pembangunan.		√	Program aksi pembangunan	Salah satu wujud bahwa keputusan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo guna memperkuat kinerja Pemerintah untuk				√		Bentuk gramatikal “program aksi pembangunan” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu program yang berkaitan dengan perekonomian negara. Dalam konteks ini, bentuk gramatikal “program aksi pembangunan” dimaknai	

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						percepatan implementasi program aksi pembangunan adalah adanya klaim bahwa inflasi rendah pada Ramadan 2016 sebagai bukti keberhasilan impor. Hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan Presiden Joko Widodo untuk merombak kabinet kerja, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dapat dikatakan terwujud atau berhasil.						dengan suatu program yang dicanangkan oleh pemerintah yang bergerak di bidang pembangunan negara. Sehingga, kalimat tersebut mengandung ideologi ekonomi.
11.	Para putra terbaik bangsa harus mau berkeringat, membanting tulang membangun bangsa dan negara.		√	Harus mau berkeringat membanting tulang membangun bangsa dan negara		Wujud dari para putra terbaik bangsa harus mau berkeringat, membanting tulang membangun bangsa dan negara salah satunya dengan berprestasi mengharumkan nama			√			Bentuk gramatikal “harus mau berkeringat, membanting tulang membangun bangsa dan negara” yang terdapat dalam kalimat tersebut mengandung pernyataan yang menyatakan siasat mengenai pemerintahan negara. Dalam konteks ini, bentuk gramatikal “harus mau berkeringat, membanting tulang membangun bangsa dan

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						bangsa. Salah satu putra terbaik bangsa yang berhasil mengharumkan nama Indonesia adalah pasangan campuran Indonesia yaitu Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir yang berhasil meraih medali emas di Olimpiade Rio 2016.						negara” dimaknai dengan suatu kerja keras yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Indonesia untuk membangun Indonesia menjadi bangsa dan negara yang lebih berkembang dan lebih maju lagi. Oleh karena itu dalam kalimat tersebut terkandung ideologi politik.
12.	Bagi saya, perombakan Kabinet Kerja adalah salah satu jembatan terbaik untuk memenuhi janji saya pada rakyat, yaitu meningkatkan kesejahteraan dalam perikehidupan mereka.		√	Meningkatkan kesejahteraan		Wujud dari meningkatnya kesejahteraan kehidupan rakyat adalah berkurangnya angka kemiskinan di Indonesia, dari 11,1 % masyarakat dari polulasi di Indonesia yang menderita kemiskinan pada tahun 2015, menjadi 10,9 % masyarakat dari populasi di Indonesia yang menderita kemiskinan pada tahun					√	Bentuk gramatikal “meningkatkan kesejahteraan” dalam kalimat tersebut memiliki makna menaikkan tingkat keamanan atau ketentraman. Dalam konteks ini, bentuk gramatikal “meningkatkan kesejahteraan” dimaknai dengan menaikkan tingkat keamanan atau ketentraman dalam kehidupan rakyat Indonesia. Dalam hal ini, meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia merupakan salah satu janji yang pernah diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan tersebut, Presiden Joko Widodo memiliki caranya tersendiri, salah satunya adalah



No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan kehidupan rakyat Indonesia telah meningkat.						perombakan Kabinet Kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa kalimat tersebut mengandung ideologi sosial budaya.
13.	Kini saatnya, demi menjaga kepentingan nasional, kita lakukan transformasi fundamental perekonomian nasional.		√	Transformasi fundamental perekonomian nasional		Wujud dari transformasi fundamental perekonomian nasional adalah dalam masalah hutang, kecepatan laju pertumbuhan, kemantapan stabilitas makro serta mengelola ekonomi, Indonesia telah mencapai kemajuan yang cukup matang dan solid.				√		Bentuk gramatikal “transformasi fundamental perekonomian nasional” merupakan bentuk gramatikal yang menyatakan siasat mengenai pemerintahan negara. Dalam konteks ini, “menjaga kepentingan nasional” dimaknai dengan nilai-nilai dasar yang terpelihara dan dipertahankan suatu Negara dalam mencapai tujuannya. Kepentingan nasional mencakup beberapa unsur, salah satunya yaitu unsur ekonomi. Dalam hal ini, kepentingan nasional negara Indonesia akan dijaga dengan melakukan transformasi fundamental perekonomian nasional. Sehingga kalimat itu mengandung ideologi ekonomi.
14.	Paradigma pembangunan yang bersifat konsumtif harus diubah menjadi produktif.	√		Paradigma pembangunan		Wujud dari berubahnya paradigma yang bersifat konsumtif menjadi				√		Kosakata “paradigma pembangunan” memiliki arti cara pandang terhadap suatu persoalan pembangunan yang dipergunakan dalam

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						produktif adalah subsidi yang semula bersifat konsumtif diubah menjadi produktif. Subsidi yang kemudian ditiadakan atas kebijakan Presiden Joko Widodo ini akan dialihkan untuk membangun daerah-daerah di Indonesia.						penyelenggaraan pembangunan baik pembangunan dalam arti sebagai proses maupun sebagai metode yang bertujuan untuk mencapai peningkatan kualitas kehidupan manusia dan kesejahteraan rakyat. Hal itu tentu saja berkaitan dengan perekonomian di Indonesia. Dalam konteks ini, kosakata “paradigma pembangunan” dimaknai dengan suatu cara pandang tentang persoalan pembangunan yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pembangunan baik pembangunan dalam arti sebagai proses maupun sebagai metode yang bertujuan untuk mencapai peningkatan kualitas kehidupan manusia dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam hal ini, paradigma pembangunan yang produktif penting untuk diterapkan agar perekonomian Indonesia dapat lebih bertumbuh dan berkembang dengan dasar yang kuat. Oleh karena itu, ideologi ekonomi dapat ditemukan dalam kalimat tersebut.
15.	Pembangunan harus dimulai dari pinggiran, dari daerah dan desa-desa, dengan	√		Pembangunan		Wujud dari pembangunan desa-desa adalah dengan dibangunnya sekolah-				√		Kosakata “pembangunan” dalam kalimat itu memiliki hubungan yang erat terhadap perekonomian di Indonesia. Dalam konteks ini

No.	Data	Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
	meningkatkan produktivitas sumberdaya manusia, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan digerakkan oleh sikap mental kreatif, inovatif, dan gigih.					sekolah, atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), begitu juga dengan mengembangkan industri kreatif pada daerah tersebut sehingga penduduk desa tersebut tidak perlu mencari pekerjaan ke ibu kota atau keluar daerah.						kosakata “pembangunan” dimaknai dengan usaha untuk membangun atau mengubah suatu keadaan. Dalam hal ini pembangunan tersebut berkenaan dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dalam kalimat tersebut dikemukakan pula cara untuk membangun daerah, yaitu dengan meningkatkan produktivitas sumberdaya manusia, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan digerakkan oleh sikap mental kreatif, inovatif, dan gigih. Hal itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut mengandung ideologi ekonomi.
16.	Dengan cara itu juga, kita akan memanfaatkan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.	√		Kemakmuran rakyat		Wujud dari pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat adalah dengan menggunakan sumberdaya alam sebagai sumber kemakmuran rakyat Indonesia. Namun hal ini belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh pemerintah. Karena sampai saat ini PT. Freeport masih menguasai				√		Kosakata “kemakmuran rakyat” dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah pencapaian dari sistem perekonomian Indonesia yang membuat rakyat tidak merasa kesulitan untuk mendapatkan apa pun. Dalam konteks ini kosakata “kemakmuran rakyat” didapatkan dengan cara-cara seperti yang telah disebutkan dalam kalimat sebelumnya. Setelah cara-cara yang terdapat dalam kalimat sebelumnya ditempuh, maka sumber daya alam dapat dimanfaatkan, sehingga kemakmuran rakyat dapat tercapai. Sehingga ideologi ekonomi dapat

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						tambang emas di daerah Papua demi kepentingan negara lain, bukan sebagai sumber kemakmuran rakyat Indonesia.						ditemukan dalam kalimat tersebut.
17.	Tanpa keberanian melakukan lompatan tersebut, kita tidak akan pernah bisa meletakkan fondasi pembangunan nasional yang kokoh, mandiri secara ekonomi, dan menegakkan kepentingan nasional.	√		Keberanian		Wujud dari keberanian melakukan lompatan yang telah disebutkan pada kalimat-kalimat sebelumnya adalah pemerintah telah mengambil kebijakan dan mewujudkannya demi pembangunan nasional yang kokoh, mandiri secara ekonomi, dan menegakkan kepentingan nasional.					√	Kosakata “keberanian” menunjukkan sebuah keadaan atau sikap yang seharusnya telah ditanamkan dalam kebudayaan rakyat Indonesia. Dalam konteks ini kosakata “keberanian” dimaknai dengan sikap yang harus diambil oleh rakyat kita demi sebuah lompatan, yaitu kemakmuran rakyat. Keberanian tersebut diperlukan untuk adanya fondasi pembangunan nasional yang kokoh, mandiri secara ekonomi dan tegaknya kepentingan nasional. Oleh karena itu dalam kalimat tersebut terdapat ideologi sosial budaya.
18.	Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung kemandirian fiskal melalui peningkatan penerimaan tanpa mengganggu iklim investasi.	√		Kebijakan fiskal		Wujud dari kemandirian fiskal melalui peningkatan penerimaan tanpa mengganggu iklim investasi adalah Indonesia telah mengarahkan kebijakan					√	Kosakata “kebijakan fiskal” pada kalimat tersebut berarti kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Dalam konteks ini “kebijakan fiskal” dimaknai dengan kebijakan pemerintah dalam

No.	Data		Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						fiskal untuk mendukung kemandirian fiskal melalui peningkatan penerimaan tanpa mengganggu iklim investasi.						mengatur perekonomian negara. Hal itu menunjukkan bahwa dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.
19.	Kita kurangi ketergantungan pada penerimaan dari sumberdaya alam.		√	Kita kurangi ketergantungan pada penerimaan dari sumberdaya alam		Wujud dari berkurangnya pada penerimaan dari sumberdaya alam adalah dengan mengubah konsep penerimaan negara dari semula berbasis sumberdaya alam menjadi berbasis pajak.				√		Bentuk gramatikal “kita kurangi ketergantungan pada penerimaan dari sumberdaya alam” yang terdapat dalam kalimat tersebut mengandung gagasan mengenai ketergantungan pada sumberdaya alam. Hal itu berkaitan dengan perekonomian Indonesia yang pendapatannya berasal dari sumberdaya alam. Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan gagasannya untuk mengurangi ketergantungan pada penerimaan dari sumberdaya alam. Sehingga ideologi ekonomi dapat ditemukan dalam kalimat tersebut.
20.	Kita kendalikan defisit anggaran dalam batas aman, dan kita jaga <i>debt ratio</i> , rasio hutang dalam batas yang terkendali.		√	Kita kendalikan defisit anggaran dalam batas aman, dan kita		Wujud dari pengendalian defisit anggaran dalam batas aman adalah dengan bergantung pada sumber pembiayaan hutang di antaranya dari penerbitan				√		Bentuk gramatikal ” Kita kendalikan defisit anggaran dalam batas aman, dan kita jaga <i>debt ratio</i> , rasio hutang dalam batas yang terkendali” yang terdapat kalimat tersebut menerangkan tentang gagasan-gagasan atau rencana-rencana yang akan dilakukan oleh bangsa Indonesia di

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
				jaga <i>debt ratio</i> , rasio hutang dalam batas yang terkendali.		SUN dengan tetap mengendalikan rasio hutang terhadap PDB dalam batas aman.						bidang perekonomian. Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo menyatakan gagasannya untuk menjaga kestabilan perekonomian di Indonesia. Hal itu dilakukan dengan mengendalikan defisit anggaran dalam batas aman, yang dimaknai dengan mengendalikan kurangnya anggaran negara agar tetap dalam batas aman, dan menjaga rasio hutang agar tetap dalam batas yang terkendali agar Indonesia bisa segera melunasinya. Hal itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut mengandung ideologi ekonomi.
21.	Selain itu, kita juga tata kembali sistem subsidi agar lebih tepat sasaran.		√	Tata kembali subsidi		Penataan kembali sistem subsidi agar lebih tepat sasaran salah satunya diwujudkan dengan dilakukannya penertiban bagi masyarakat mampu yang masih menggunakan tarif bersubsidi listrik, untuk tidak lagi mendapatkan subsidi listrik.				√		Bentuk gramatikal “tata kembali sistem subsidi” yang dapat ditemukan dalam kalimat tersebut merupakan sebuah siasat untuk menstabilkan perekonomian di Indonesia. Dalam konteks ini, penataan kembali sistem subsidi bertujuan agar sistem subsidi tersebut tepat sasaran. Seperti yang sudah terjadi sebelumnya, penyalahgunaan subsidi seringkali terjadi di Indonesia. Sehingga kalimat tersebut mengandung ideologi ekonomi.
22.	Kita juga dorong pembangunan	√		ketahanan		Wujud dari pembangunan					√	Kosakata “ketahanan pangan” memiliki makna

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
	infrastruktur, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial.			pangan, perlindungan sosial,		infrastruktur adalah dibangunnya pengamanan pantai, pengendali banjir, waduk, jalan tol, PDAM, dan lain-lain. Wujud bahwa pemerintah mendorong ketahanan pangan adalah membaiknya ketahanan pangan dengan menurunnya dan berhentinya jmpor komoditas pangan pokok. Wujud bahwa pemerintah mendorong perlindungan sosial adalah dengan meluncurkan program perlindungan sosial.				√		ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mendapatkannya. Pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan merupakan dua hal yang berkaitan dengan kepentingan sosial. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi sosial budaya. Kosakata “perlindungan sosial” bermakna seperangkat kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan. Perlindungan sosial berhubungan dengan perekonomian masyarakat Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut mengandung ideologi ekonomi. Dalam konteks ini, kosakata “pembangunan infrastruktur” dimaknai dengan pembangunan prasarana di Indonesia menjadi lebih baik dan lebih layak lagi. Kosakata “ketahanan pangan” dalam konteks ini dimaknai dengan selalu tersedianya bahan pangan di Indonesia dan masyarakat Indonesia memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Kosakata “perlindungan sosial” dalam konteks ini dimaknai dengan pemerintah mengeluarkan kebijakan-

No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks		Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal								
											kebijakan yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia dan membuat kehidupan sosial rakyat Indonesia lebih baik atau layak lagi.
23.	Namun, moral politik saya mengatakan, saya harus bertindak dan menghentikan praktik yang tidak benar.		√	Saya harus bertindak dan menghentikan praktik yang tidak benar	Wujud dari praktik yang tidak benar adalah penyalahgunaan subsidi BBM.		√				Bentuk gramatikal “saya harus bertindak dan menghentikan praktik yang tidak benar” menunjukkan sebuah tindakan yang akan dilakukan Jokowi berdasarkan kekuasaannya. Sebagai presiden, Jokowi berkuasa untuk melakukan apa yang ia inginkan. Dalam konteks ini, bentuk gramatikal “saya harus bertindak dan menghentikan praktik yang tidak benar” dimaknai dengan Presiden Joko Widodo harus bertindak untuk menghentikan praktik yang tidak benar. Dalam hal ini, praktik yang tidak benar tersebut terjadi pada subsidi BBM yang disalahgunakan oleh para penggunanya. Oleh karena itu dalam kalimat tersebut dapat ditemukan ideologi kekuasaan.
24.	Langkah awal yang saya tempuh adalah mengalihkan subsidi bahan bakar minyak ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial.	√		Langkah awal	Pengalihan subsidi BBM ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial diwujudkan dalam beberapa bidang, diantaranya dengan		√				Kosakata “langkah awal” yang terdapat dalam kalimat tersebut mencerminkan sebuah tindakan atas dasar kekuasaan yang dimiliki oleh seorang presiden. Dalam konteks ini, kosakata “langkah awal” dimaknai dengan tindakan awal yang dipilih



No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						menambah dana perlindungan sosial sebesar Rp 14,3 triliun, yaitu untuk Kartu Keluarga Sejahtera dan program Keluarga Harapan, menambah dana perlindungan kesehatan sebesar Rp 422 miliar, yaitu untuk tambahan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan peningkatan 1.8 juta penerima, Rp 2.2 triliun penambahan fasilitas, sarana, prasarana untuk RS rujukan nasional, dialihkan untuk Dana Desa Rp 11.7 triliun, dan lain-lain.						untuk presiden (dalam rangka bertindak dan menghentikan praktik yang tidak benar). Dengan kekuasaan yang dimilikinya, seorang presiden dapat mengambil atau memutuskan suatu langkah awal yang menurutnya merupakan hal yang terbaik. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi kekuasaan.
25.	Selain itu juga menata jalur pengadaan dan distribusi BBM.		√	Menata jalur pengadaan dan distribusi BBM		Penataan jalur pengadaan dan distribusi BBM diwujudkan dengan penambahan delapan kapal tanker oleh Pertamina.				√		Bentuk gramatikal “menata jalur pengadaan dan distribusi BBM” menunjukkan salah satu siasat yang berkaitan dengan perekonomian Indonesia. Dalam konteks ini, bentuk gramatikal “menata jalur pengadaan dan distribusi BBM” dimaknai dengan

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
												sebuah siasat mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam hal pengadaan dan distribusi BBM. Hal ini dilakukan agar kejadian-kejadian sebelumnya, yaitu langkanya BBM di beberapa daerah, juga penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sehingga kalimat tersebut mengandung ideologi ekonomi.
26.	Kita harus meninggalkan perilaku konsumtif menjadi produktif.	√		Perilaku konsumtif	Wujud bahwa bangsa Indonesia mulai bisa meninggalkan perilaku konsumtif menjadi produktif adalah bertambahnya masyarakat yang menabung dan berinvestasi. Pemerintah pun telah melakukan seruan-seruan agar masyarakat mau menabung dan berinvestasi dengan berbagai cara.				√		Kosakata “perilaku konsumtif” merupakan suatu istilah yang berkaitan dengan perilaku manusia sebagai pelaku ekonomi. Begitu pula kosakata “produktif”. Dalam konteks ini, kosakata “perilaku konsumtif” dimaknai dengan perilaku atau kebiasaan masyarakat Indonesia yang telah terbiasa menjadi konsumen. Perilaku konsumtif tidak selamanya menjadi perilaku yang baik, oleh karena itu Presiden Joko Widodo mengajak atau menghimbau rakyatnya untuk meninggalkan perilaku tersebut dan berubah menjadi rakyat-rakyat yang produktif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kalimat tersebut mengandung istilah ekonomi.	
27.	Itulah yang saya sebut sebagai		√	Praktik yang	Wujud dari praktik yang		√				Bentuk gramatikal “praktik yang tidak benar”	

No.	Data		Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks		Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya		
		Kosakata	Bentuk Gramatikal									Teks
	praktik yang tidak benar tersebut.			tidak benar		tidak benar adalah penyalahgunaan BBM bersubsidi.						dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa kalimat tersebut mengandung ideologi kekuasaan. Dalam konteks ini, “praktik yang tidak benar” mengacu pada penyalahgunaan subsidi BBM yang telah diterangkan dalam kalimat sebelumnya. Sebagai seorang presiden, Joko Widodo tentunya memiliki kekuasaan untuk menyebut penyalahgunaan tersebut sebagai praktik yang tidak benar.
28.	Padahal uang sebesar itu dapat digunakan untuk membangun sekolah, membangun rumah sakit, meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program ekonomi produktif dan perlindungan sosial, serta membangun lebih banyak lagi infrastruktur.		√	dapat digunakan untuk membangun sekolah, membangun rumah sakit, meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program ekonomi produktif dan		Wujud dari uang sebesar itu dapat digunakan untuk membangun sekolah, membangun rumah sakit, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta membangun lebih banyak lagi infrastruktur adalah telah ditambahkannya sosial sebesar Rp 14,3 triliun, yaitu untuk Kartu Keluarga Sejahtera dan program Keluarga Harapan,				√		Bentuk gramatikal “dapat digunakan untuk membangun sekolah, membangun rumah sakit, meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program ekonomi produktif dan perlindungan sosial, serta membangun lebih banyak lagi infrastruktur” yang terdapat dalam kalimat tersebut mengandung gagasan-gagasan atau tindakan-tindakan mengenai perekonomian. Dalam konteks ini, pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pembangunan lebih banyak lagi infrastruktur dapat diwujudkan apabila subsidi BBM telah tepat sasaran. Hal itu menunjukkan bahwa kalimat

No.	Data		Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks		Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya		
		Kosakata	Bentuk Gramatikal									Teks
				perlindungan sosial, serta membangun lebih banyak lagi infrastruktur		ditambahkannya dana perlindungan kesehatan sebesar Rp 422 miliar, yaitu untuk tambahan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan peningkatan 1.8 juta penerima, Rp 2.2 triliun penambahan fasilitas, sarana, prasarana untuk RS rujukan nasional, adanya dana untuk Dana Desa Rp 11.7 triliun, dan lain-lain.						tersebut mengandung ideologi ekonomi.
29.	Banyak program bantuan sosial untuk kelompok masyarakat miskin yang dapat diberikan pemerintah untuk membantu mereka keluar dari belenggu kemiskinan.		√	Keluar dari belenggu kemiskinan		Program bantuan sosial untuk masyarakat miskin yang diberikan pemerintah diwujudkan dalam bentuk Kartu Perlindungan Sosial (KPS). KPS adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka Program Percepatan dan Perluasan Sosial (P4S).				√		Bentuk gramatikal “keluar dari belenggu kemiskinan” dalam kalimat tersebut merupakan bentuk gramatikal yang menunjukkan adanya strata sosial yang rendah di Indonesia, yaitu kemiskinan. Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan perekonomian suatu bangsa. Dalam konteks ini, bentuk gramatikal “keluar dari belenggu kemiskinan” dimaknai dengan keluar dari jeratan kemiskinan. Seperti yang telah diketahui, kemiskinan di Indonesia masih menempati angka

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
												yang tinggi. Untuk itu, pemerintah membuat program-program bantuan sosial sebagai suatu solusi agar masyarakat miskin terbebas dari kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kalimat ini terdapat ideologi ekonomi.
30.	Banyak program perlindungan sosial yang dapat dijalankan secara berkelanjutan untuk seluruh masyarakat dan pekerja.		√	Program perlindungan sosial		Program perlindungan sosial yang dapat dijalankan secara berkelanjutan untuk seluruh masyarakat dan pekerja diwujudkan dengan adanya program BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.					√	Bentuk gramatikal “program perlindungan sosial” dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah gagasan atau pemikiran yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, bentuk gramatikal “program perlindungan sosial” akan dilaksanakan secara berkelanjutan atau terus menerus untuk seluruh masyarakat dan para pekerja yang bekerja di Indonesia. Sehingga dalam kalimat tersebut terdapat ideologi sosial budaya.
31.	Juga banyak usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bisa digerakkan.	√		Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah		Bergeraknya UMKM di Indonesia diwujudkan dengan banyaknya jumlah UMKM yang mencapai angka 56,5 juta pada tahun 2015.				√		Kosakata “usaha Mikro, Kecil, dan Menengah” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan usaha-usaha yang bergerak di bidang perekonomian yang terdapat di Indonesia. Dalam konteks ini, usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan sebuah istilah tentang perekonomian di Indonesia. Istilah ini kemudian disingkat menjadi UMKM.

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
												UMKM terdiri atas usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang masing-masing memiliki pengertian dan batasan yang berbeda. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks		Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal								
											tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, kalimat tersebut mengandung ideologi ekonomi.
32.	Semua itu bisa kita lakukan dengan pengalihan subsidi BBM dan subsidi-subsidi lainnya yang saat ini tidak tepat sasaran.	√		Pengalihan subsidi	Wujud dari pengalihan subsidi BBM dan subsidi lainnya yang tidak tepat sasaran adalah dihapuskannya subsidi BBM untuk dialihkan ke pembangunan infrastruktur.				√		Kosakata “pengalihan subsidi” yang terdapat dalam kalimat tersebut merupakan gagasan mengenai subsidi BBM agar tepat sasaran. Dalam konteks ini, “semua itu” mengacu pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, program bantuan sosial, program perlindungan sosial, dan UMKM. Untuk mewujudkan hal tersebut maka cara yang diambil oleh Presiden Joko Widodo adalah dengan pengalihan subsidi yang tidak tepat sasaran. Hal itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut mengandung ideologi ekonomi.
33.	Bagi masyarakat kita yang kurang beruntung, yang rentan terhadap perubahan, pemerintah menyiapkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Asistensi Sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat.		√	pemerintah menyiapkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera	Program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Asistensi Sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat telah diwujudkan oleh pemerintah dan telah				√		Bentuk gramatikal “pemerintah menyiapkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Asistensi Sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat” menerangkan tentang gagasan-gagasan yang mempermudah masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, serta sosial. Hal itu berkaitan dengan ekonomi kerakyatan yang terjadi

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
				Sejahtera, dan Asistensi Sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat		berlaku di beberapa daerah di Indonesia.						di negara Indonesia. Dalam konteks ini, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Asistensi Sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat merupakan hal-hal yang akan dipersiapkan pemerintah sebagai bantuan bagi masyarakat miskin di Indonesia. Sehingga ideologi ekonomi dapat ditemukan dalam kalimat ini.
34.	Pemerintah juga akan terus mendukung efektivitas dan keberlanjutan program Sistem Jaminan Sosial Nasional, baik Jaminan Kesehatan Nasional maupun Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	√		Mendukung		Wujud bahwa pemerintah terus mendukung efektivitas dan keberlanjutan program Sistem Jaminan Sosial Nasional, baik Jaminan Kesehatan Nasional maupun Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah pemerintah melakukan pembaruan atau desain ulang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat	√					Kosakata “mendukung” dalam kalimat tersebut bermakna memberi dukungan atau membela. Dalam konteks ini, “pemerintah juga akan terus mendukung” dimaknai dengan pemerintah yang akan terus berpihak dan mengutamakan efektivitas dan keberlanjutan program Sistem Jaminan Nasional. Baik Jaminan Kesehatan Nasional, maupun Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah atas pengaruh kekuasaannya. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi hegemoni.



No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks		Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal								
35.	Berbagai program itu merupakan jaring pengaman sosial agar saudara-saudara kita yang kurang beruntung, pada saat terjadi gejolak tidak mengalami penurunan tingkat kesejahteraan.		√	Penurunan tingkat kesejahteraan	Indonesia. Wujud bahwa masyarakat Indonesia yang kurang beruntung tidak mengalami penurunan tingkat kesejahteraan pada saat terjadi gejolak salah satunya adalah masyarakat yang kurang beruntung tersebut tetap mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan adanya kartu BPJS kesehatan, sehingga masyarakat tersebut tidak lagi membiarkan keluarganya untuk tidak pergi ke dokter dengan alasan tidak adanya biaya.				v	Bentuk gramatikal “penurunan tingkat kesejahteraan” menunjukkan sebuah keadaan ekonomi di Indonesia. Dalam konteks ini, maksud dari berbagai program adalah Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Asistensi Sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat, Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Program-program tersebut dibuat dengan tujuan sebagai jaring pengaman sosial agar rakyat Indonesia yang kurang beruntung, atau rakyat miskin di Indonesia, pada saat terjadi gejolak tidak mengalami penurunan tingkat kesejahteraan. Gejolak yang dimaksud pada kalimat tersebut adalah terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kalimat tersebut mengandung ideologi ekonomi.	
36.	Mereka harus tetap menjadi bagian dari pembangunan nasional yang produktif.		√	Harus tetap menjadi bagian	Wujud dari mereka (mengacu pada rakyat Indonesia yang kurang		√			Bentuk gramatikal “harus tetap menjadi bagian” dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu kekuasaan seorang presiden. Dalam konteks ini,	

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						beruntung) tetap menjadi bagian dari pembangunan nasional yang produktif adalah rakyat Indonesia yang kurang beruntung tetap memiliki kontribusi dalam pembangunan nasional yang produktif.						bentuk gramatikal “harus tetap menjadi bagian” dimaknai sebagai seruan atas kebijakan yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini presiden mengambil atau memutuskan kebijakan tersebut karena presiden memiliki kekuasaan. Kebijakannya adalah mereka (mengacu pada rakyat Indonesia yang kurang beruntung) harus tetap menjadi bagian dari pembangunan nasional yang produktif. Sehingga, kalimat tersebut mengandung ideologi kekuasaan.
37.	Sejalan dengan nafas Nawacita, Pemerintah saat ini terus mempercepat pembangunan infrastruktur.	√		Mempercepat		Wujud bahwa pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur adalah pembangunan MRT Jakarta, pembangunan kereta api trans Sumatera, dan lain-lain.	√					Kosakata “mempercepat” dalam kalimat tersebut bermakna menjalankan atau melakukan dengan lebih cepat. Hal tersebut dilakukan oleh presiden atas pengaruh kekuasaannya. Dalam konteks ini, istilah “nawacita” merupakan istilah yang diusung oleh Presiden Joko Widodo tentang visi dan misinya saat pemilihan presiden tahun 2014. Salah satu poin yang terdapat dalam Nawacita tersebut adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan

No.	Data		Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
												program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. Untuk mewujudkan salah satu poin Nawacita tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah saat ini terus mempercepat pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi hegemoni.
38.	Kita bangun jalan tol yang tidak lama lagi akan menyambungkan Pulau Jawa, bahkan dalam beberapa tahun ke depan, akan terbentang di Pulau Sumatera.		√	Kita bangun jalan tol yang tidak lama lagi akan menyambungkan Pulau Jawa		Jalan Tol Jawa Sumatera atau Jembatan Selat Sunda ini batal diwujudkan oleh Presiden Joko Widodo dan perencanaannya tidak akan dilanjutkan pada masa pemerintahannya karena disebutkan “tidak sesuai dengan visi misi pemerintahan Presiden Joko Widodo.				√		Bentuk gramatikal “Kita bangun jalan tol yang tidak lama lagi akan menyambungkan Pulau Jawa” menunjukkan rencana atau gagasan yang dikeluarkan oleh presiden berkaitan dengan pembangunan infrastruktur negara. Dalam konteks ini, jalan tol yang menyambungkan Pulau Jawa dan Sumatera dikenal dengan istilah Jembatan Selat Sunda. Gagasan mengenai Jembatan Selat Sunda ini telah ada sejak tahun 1960, digagasi oleh seorang guru besar ITB yaitu Prof. Sedyatmo. Hal itu menunjukkan bahwa dalam kalimat tersebut

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
												terdapat ideologi ekonomi.
39.	Kita bangun pula jalur kereta api di Sulawesi dan segera di Kalimantan dan Papua; kita bangun lebih banyak waduk; dan pelabuhan-pelabuhan untuk mendukung tol laut dengan tambahan banyak galangan kapal.	√		Bangun		Pembangunan waduk pun telah terwujud dengan telah dibangunnya 13 waduk pada tahun 2015. Pembangunan pelabuhan pun terwujud dengan adanya pembangunan Pelabuhan Sorong dan lain-lain. Pembangunan tol laut pun sudah mulai diwujudkan.				√		Kosakata “bangun” dalam kalimat tersebut berkaitan dengan pembangunan infrastruktur negara. Dalam konteks ini, pembangunan jalur kereta api di Sulawesi, di Kalimantan, dan di Papua serta pembangunan waduk dan pelabuhan-pelabuhan merupakan pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jalur kereta api di Sulawesi mulai diwujudkan dengan dibangunnya rel kereta api sepanjang 30 km yang akan selesai pada tahun 2018. Sementara itu pembangunan proyek kereta api di Kalimantan dan Papua sudah mulai dibangun sejak tahun 2016. Hal itu menunjukkan bahwa dalam kalimat tersebut dapat ditemukan ideologi ekonomi.
40.	Di bidang energi, dalam sepuluh bulan ini, pemerintah sudah memulai membangun lebih banyak pembangkit listrik di berbagai pelosok Tanah Air.	√		Membangun		Pembangunan pembangkit listrik di Tanah Air diwujudkan dengan dibangunnya Program Listrik 35.000 MW yang juga dibangun untuk				√		Kosakata “membangun” dalam kalimat tersebut memiliki makna mendirikan pembangkit listrik dengan jumlah yang lebih banyak di Indonesia. Dalam konteks ini, pembangkit listrik dibangun di daerah terpencil atau pelosok di Indonesia dimana kondisi listrik di daerah tersebut masih sangat

No.	Data		Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						menerangi daerah yang belum teraliri listrik.						minim. Hal itu berkaitan dengan pembangunan infrastruktur negara yang menunjukkan bahwa dalam kalimat tersebut dapat ditemukan ideologi ekonomi.
41.	Sehingga dalam kurun waktu lima tahun ke depan, kita bisa penuhi kebutuhan listrik yang menopang kemajuan industri dan pencapaian rasio elektrifikasi yang tinggi, guna menjamin pertumbuhan ekonomi bagi lompatan kemajuan bangsa kita.		√	menjamin pertumbuhan ekonomi bagi lompatan kemajuan bangsa		Pemerintah belum bisa memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia.				√		Bentuk gramatikal “menjamin pertumbuhan ekonomi bagi lompatan kemajuan bangsa” menunjukkan bahwa dalam kalimat tersebut terdapat rencana mengenai perekonomian di Indonesia. Dalam konteks ini, kalimat tersebut berisi tentang tujuan-tujuan dibangunnya pembangkit listrik di daerah-daerah pelosok Indonesia, yaitu memenuhi kebutuhan listrik yang menopang kemajuan industri dan mencapai rasio elektrifikasi yang tinggi, guna menjamin pertumbuhan ekonomi bagi lompatan kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.
42.	Kita juga perbanyak pasar rakyat, agar menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, dan		√	perbanyak pasar rakyat, agar menjadi penyangga pertumbuhan		Penambahan jumlah pasar rakyat diwujudkan dengan dilakukannya revitalisasi beberapa pasar rakyat yang berada di wilayah				√		Bentuk gramatikal “perbanyak pasar rakyat, agar menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat” dalam kalimat tersebut merupakan sebuah gagasan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang

No.	Data		Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
	memberikan insentif fiskal bagi kegiatan ekonomi produktif.			ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat		perbatasan dan menambah anggaran untuk pasar tradisional.						ekonomi. Dalam konteks ini, pasar rakyat dimaknai dengan pasar tradisional dimana di dalamnya terdapat perkumpulan para pedagang dan pembeli untuk melakukan sebuah transaksi jual dan beli. Di dalam pasar rakyat juga dapat ditemui budaya masyarakat Indonesia dalam bermasyarakat dengan lingkungan di sekitarnya. Tujuan pemerintah membangun lebih banyak pasar rakyat adalah sebagai penyangga pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, dan memberikan insentif fiskal bagi kegiatan ekonomi produktif. Bentuk gramatikal tersebut menunjukkan bahwa dalam kalimat ini terdapat ideologi ekonomi.
43.	Sejalan dengan itu, Pemerintah juga mempercepat pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri di luar Pulau Jawa, khususnya untuk industri pertanian dan pertambangan.	√		Mempercepat pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri di Pulau Jawa		Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri di luar Pulau Jawa diwujudkan salah satunya dengan membangun Kawasan Ekonomi Khusus di Bitung, Sulawesi Utara dan				√		Bentuk gramatikal “mempercepat pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri di luar Pulau Jawa” dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu tindakan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya dalam bidang industri pertanian dan pertambangan. Dalam konteks ini, “Kawasan Ekonomi Khusus” dimaknai sebagai kawasan yang

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						membangun 13 Kawasan Industri di luar Pulau Jawa, salah satunya wilayah di wilayah Papua.						mempunyai batasan tertentu yang termasuk dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Sementara itu “Kawasan Industri” dimaknai sebagai daerah atau wilayah yang intensitas industrinya sangat padat. Hal itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut mengandung ideologi ekonomi.
44.	Pemerintah juga mengupayakan agar beragam program aksi pembangunan itu dapat dikelola dengan mengedepankan kapasitas dan daya inovasi anak bangsa sendiri.	√		mengupayakan		Wujud bahwa pemerintah mengupayakan agar beragam program aksi pembangunan itu dapat dikelola dengan mengedepankan kapasitas dan daya inovasi anak bangsa sendiri adalah banyaknya anak bangsa yang berkontribusi dalam pembangunan tersebut.	√					Kosakata “mengupayakan” dalam kalimat tersebut bermakna mengusahakan sesuatu. Hal tersebut dilakukan oleh presiden atas pengaruh kekuasaannya. Dalam konteks ini, kosakata “mengupayakan” dimaknai dengan mengusahakan agar beragam program aksi pembangunan (berupa pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri di luar Pulau Jawa) dapat dikelola dengan mengedepankan kapasitas dan daya inovasi anak bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi hegemoni.
45.	Program aksi pembangunan itu, khususnya untuk ekonomi kreatif, harus bisa menjadi	√		Ekonomi kreatif		Wujud dari program aksi pembangunan, khususnya untuk ekonomi kreatif,				√		Kosakata “ekonomi kreatif” yang terdapat kalimat tersebut merupakan sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan

No.	Data	Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
	akses untuk perolehan lapangan kerja yang makin berkualitas, perbaikan kesejahteraan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi anak bangsa.					harus bisa menjadi akses untuk perolehan lapangan kerja yang makin berkualitas, perbaikan kesejahteraan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi anak bangsa adalah peran ekonomi kreatif yang mendorong penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.						keaktivitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Dalam konteks ini, program aksi pembangunan mengacu pada Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri di luar Pulau Jawa. Dalam kalimat ini terdapat tujuan dari diadakannya program aksi pembangunan khususnya untuk ekonomi kreatif. Tujuan tersebut yaitu sebagai akses untuk perolehan lapangan kerja yang semakin berkualitas, perbaikan kesejahteraan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi anak bangsa. Pembangunan ekonomi kreatif dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa kalimat tersebut mengandung ideologi ekonomi.
46.	Saya ingin membuktikan bahwa kita tidak boleh lagi memungguni samudera dan laut.	√		membuktikan		Wujud bahwa kita tidak lagi memungguni samudera dan laut adalah Presiden Joko Widodo tidak lagi mengesampingkan kebijakan tentang laut di Indonesia dan menganggap bahwa laut adalah masa	√					Kosakata “membuktikan” dalam kalimat tersebut bermakna memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti. Hal tersebut dilakukan oleh presiden atas pengaruh kekuasaannya. Dalam konteks ini, Presiden Jokowi Dodo ingin membuktikan atau menekankan bahwa samudera dan laut di Indonesia tidak boleh dipungguni, atau dibiarkan di belakang. Presiden ingin memajukan samudera dan



No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks		Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal								
					depan Indonesia.					laut Indonesia. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi hegemoni.	
47.	Lingkungan laut yang kini terancam oleh perubahan iklim perlu kita selamatkan.		√	Perlu kita selamatkan	Wujud dari perlunya menyelamatkan lingkungan laut yang kini terancam oleh perubahan iklim adalah Pemerintah menyiapkan strategi penyelamatan kerusakan pesisir di Indonesia. Salah satunya adalah dengan adanya larangan untuk menambang di pesisir, juga dilakukan penghijauan, seperti penanaman pohon mangrove.		√			Bentuk gramatikal “perlu kita selamatkan” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan perintah dari seseorang yang berkuasa, yaitu presiden. Perintah tersebut disampaikan oleh presiden atas kekuasaan yang dimilikinya. Dalam konteks ini, bentuk gramatikal “perlu kita selamatkan” dimaknai dengan membebaskan lingkungan laut dari ancaman perubahan iklim. Perubahan iklim tersebut menyebabkan terjadinya pemuaiian massa air laut dan kenaikan permukaan air laut. Hal ini akan menurunkan produksi tambak ikan dan udang serta mengancam kehidupan masyarakat pesisir pantai. Oleh karena itu, di dalam kalimat tersebut terkandung ideologi kekuasaan.	
48.	Kita juga harus melindungi laut kita dari ancaman keamanan seperti pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut.		√	Kita juga harus melindungi laut kita	Wujud bahwa pemerintah berupaya melindungi laut dari ancaman keamanan seperti pencurian ikan dan penjarahan sumber daya		√			Bentuk gramatikal “kita juga harus melindungi laut kita” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan perintah dari seseorang yang berkuasa, yaitu presiden. Perintah tersebut disampaikan oleh presiden atas kekuasaan yang	

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						laut adalah adanya kebijakan dan langkah tegas yang telah ditempuh. Kebijakan yang diambil yakni melarang <i>transshipment</i> di tengah laut, moratorium kapal asing, dan menindak tegas kapal pencuri ikan dengan cara ditenggelamkan.						dimilikinya. Dalam konteks ini, bentuk gramatikal “melindungi laut” dimaknai dengan menjaga laut dari ancaman keamanan seperti pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut. Oleh karena itu, di dalam kalimat tersebut terkandung ideologi kekuasaan.
49.	Kapal-kapal yang tertangkap harus menghadapi ketegasan kita, termasuk ditenggelamkan.		√	Kapal-kapal yang tertangkap harus menghadapi ketegasan kita		Wujud dari kapal yang tertangkap harus menghadapi ketegasan, termasuk di tenggelamkan adalah sampai bulan April 2017 lalu, terhitung sudah ada 81 kapal pencuri ikan yang ditenggelamkan atas pimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.		√				Bentuk gramatikal “kapal-kapal yang tertangkap harus menghadapi ketegasan kita” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan perintah dari seseorang yang berkuasa, yaitu presiden. Perintah tersebut disampaikan oleh presiden atas kekuasaan yang dimilikinya. Dalam konteks ini, kapal-kapal asing yang tertangkap harus menghadapi ketegasan atau ketentuan hukum kelautan Indonesia, salah satunya adalah kapal tersebut ditenggelamkan. Oleh karena itu, di dalam kalimat tersebut terkandung ideologi kekuasaan.
50.	Salah satu agenda saya yang	√		agenda		Perwujudan dari salah satu			√			Kosakata “agenda” dalam kalimat tersebut

No.	Data	Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
	terpenting adalah mewujudkan tol laut.					agenda Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan tol laut adalah adanya beberapa pelabuhan yang diresmikan untuk tol laut. Pelabuhan-pelabuhan itu di antaranya adalah Pelabuhan Tobelo, Pelabuhan Galela, Pelabuhan Tutu Kembong, Pelabuhan Teor, dan Pelabuhan Wonreli.						bermakna acara. Agenda ini berkaitan dengan acara presiden. Dalam konteks ini, kosakata “agenda” dimaknai dengan suatu acara atau gagasan yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada masa jabatannya. Agenda tersebut yaitu mewujudkan adanya tol laut. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi politik.
51.	Tol laut yang menjadi bagian dari infrastruktur maritim akan dilengkapi dengan galangan-galangan kapal yang produktif.	√		dilengkapi		Wujud dari tol laut yang menjadi bagian dari infrastruktur maritim akan dilengkapi dengan galangan-galangan kapal yang produktif adalah pada pelabuhan-pelabuhan yang kemudian akan menjadi tol laut tersebut dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas, seperti dermaga general	√					Kosakata “dilengkapi” dalam kalimat tersebut bermakna ditambahi atau dicukupkan. Dilengkapi merupakan sebuah tindakan atas pengaruh kekuasaan presiden. Dalam konteks ini, kosakata “dilengkapi” dimaknai dengan penambahan galangan-galangan kapal pada tol laut yang merupakan bagian dari infrastruktur maritim. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi hegemoni.

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						cargo, dermaga penumpang, dermaga peti kemas, lapangan penumpukan, terminal penumpang, gudang, dan lain-lain.						
52.	Insha Allah, kebijakan ini akan mendorong peningkatan ekonomi maritim yang berkesinambungan, kelestarian laut, dan tata ruang laut yang baik.		√	Mendorong ekonomi maritim yang berkesinambungan		Wujud dari kebijakan tol laut mendorong peningkatan ekonomi maritim yang berkesinambungan, kelestarian laut, dan tata ruang laut yang baik adalah aktivitas tol laut mengurangi kesenjangan harga komoditas antardaerah dan mendorong perkembangan berbagai sektor penunjang kemandirian masyarakat karena adanya akselerasi konektivitas antarpulau.				√		Bentuk gramatikal “mendorong ekonomi maritim yang berkesinambungan” dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu gagasan mengenai ekonomi di bidang kemaritiman. Dalam konteks ini, terdapat kebijakan pemerintah tentang laut dan samudera Indonesia yang akan mendorong peningkatan ekonomi yang berkesinambungan, kelestarian laut, dan tata ruang laut yang baik. Hal itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut mengandung ideologi ekonomi.
53.	Seiring dengan itu, kita juga		√	Kita juga		Wujud bahwa pemerintah		√				Bentuk gramatikal “kita juga harus menggali lagi

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
	harus menggali lagi budaya maritim dan identitas maritim bangsa Indonesia.			harus menggali lagi budaya maritim dan identitas maritim bangsa Indonesia		berusaha untuk menggali lagi budaya maritim dan identitas maritim bangsa Indonesia adalah diadakannya Konferensi Nasional Sejarah (KNS) X dengan fokus menggali budaya bahari Indonesia. Konferensi ini dikatarbelakangi atas adanya semangat untuk membangkitkan budaya kemaritiman yang menurut catatan sejarah, budaya tersebut telah hilang sejak empat abad silam.						budaya maritim dan identitas maritim bangsa Indonesia” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan perintah dari seseorang yang berkuasa, yaitu presiden. Perintah tersebut disampaikan oleh presiden atas kekuasaan yang dimilikinya. Dalam konteks ini, bentuk gramatikal “menggali lagi budaya maritim dan identitas maritim bangsa Indonesia” dimaknai dengan mencari tahu lebih lanjut dan memperdalam budaya maritim dan identitas maritim bangsa Indonesia. Oleh karena itu, di dalam kalimat tersebut terkandung ideologi kekuasaan.
54.	Kita harus mampu menunjukkan kepada dunia, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa maritim.		√	Kita harus mampu menunjukkan kepada dunia, bahwa bangsa Indonesia		Indonesia mampu menunjukkan kepada dunia, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa maritim dapat diwujudkan dengan bukti bahwa Indonesia		√				Bentuk gramatikal “kita harus mampu menunjukkan kepada dunia, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa maritim.” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan perintah dari seseorang yang berkuasa, yaitu presiden. Perintah tersebut disampaikan oleh presiden atas kekuasaan

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
				adalah bangsa maritim.		memiliki kekayaan laut terbesar di dunia, bahkan titik pusat keragaman maritim berada di wilayah Indonesia.						yang dimilikinya. Dalam konteks ini, seruan “menunjukkan kepada dunia, bahwa bangsa Indonseia adalah bangsa maritim” dimaknai dengan memperlihatkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa maritim. Oleh karena itu, di dalam kalimat tersebut terkandung ideologi kekuasaan.
55.	Itulah bagian awal dari upaya kita untuk menjadi Poros Maritim Dunia.	√		Poros Maritim Dunia		Wujud dari bagian awal upaya Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia adalah dengan menggali kembali budaya maritim Indonesia dan menjaga serta mendayagunakan lautnya dengan penuh kesungguhan.			√			Kosakata “Poros Maritim Dunia” dalam kalimat tersebut bermakna sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektifitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim. Poros Dunia Maritim merupakan sebuah gagasan yang berkaitan dengan pemerintahan. Dalam konteks ini, kosakata “Poros Maritim Dunia” dimaknai sebagai suatu tujuan yang akan dicapai oleh Indonesia dan telah diupayakan oleh bangsa Indonesia. Jadi, kalimat tersebut mengandung ideologi politik.
56.	Poros Maritim yang tidak saja digagas untuk menciptakan ketahanan nasional tetapi juga	√		Poros Maritim		Pernyataan “Poros Maritim yang tidak saja digagas untuk menciptakan			√			Kosakata “Poros Maritim” dalam kalimat tersebut bermakna sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektifitas antar

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
	ketahanan regional dan global.					ketahanan nasional tetapi juga ketahanan regional dan global” belum terwujud karena Indonesia masih belum menjadi poros Maritim Dunia, tetapi masih meniti langkah-langkah untuk menjadi Poros Maritim Dunia.						pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim. Poros Dunia Maritim merupakan sebuah gagasan yang berkaitan dengan pemerintahan. Dalam konteks ini, kosakata “Poros Maritim” dilengkapi dengan tujuan digagasnya yang tak hanya untuk menciptakan ketahanan nasional, tetapi juga ketahanan regional dan global. Jadi, kalimat tersebut mengandung ideologi politik.
57.	Strategi inilah yang tengah digodok dan akan dituangkan menjadi Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia.	√		strategi		Wujud dari strategi yang tengah digodok dan akan dituangkan menjadi Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia adalah strategi dalam menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Presiden Joko Widodo telah menentukan			√			Kosakata “strategi” yang terdapat dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah tindakan atau siasat mengenai pemerintahan negara. Dalam konteks ini, kosakata “strategi ini” mengacu pada upaya bangsa Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Strategi tersebut tengah digodok dan akan dituangkan menjadi Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi politik.

No.	Data		Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks		Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal								
					lima pilar utama, yaitu, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan,						



No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks		Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal								
					dan berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim.						
58.	Guna mendorong penguatan ekonomi nasional melalui transformasi fundamental, Pemerintah mewajibkan penggunaan rupiah untuk transaksi di dalam negeri.		√	Mendorong penguatan ekonomi nasional	Wujud bahwa pemerintah mewajibkan penggunaan rupiah untuk transaksi di dalam negeri adalah adanya peraturan penggunaan rupiah di wilayah NKRI yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Hal itu tertulis dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015.				√		Bentuk gramatikal “mendorong penguatan ekonomi nasional” dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu tindakan atau siasat mengenai perekonomian di Indonesia. Dalam konteks ini, bentuk gramatikal “mendorong penguatan ekonomi nasional” dimaknai dengan mendukung kenaikan tingkat perekonomian negara Indonesia. Untuk mendorong penguatan ekonomi nasional tersebut, pemerintah mewajibkan penggunaan rupiah untuk transaksi di dalam negeri. Hal itu menunjukkan bahwa dalam kalimat tersebut terkandung ideologi ekonomi.
59.	Langkah ini untuk menunjukkan bahwa kita adalah Negara berdaulat.	√		berdaulat	Wujud dari Indonesia adalah negara yang berdaulat adalah dengan menetapkan peraturan penggunaan rupiah di wilayah NKRI. Peraturan tersebut berlaku untuk		√				Kosakata “berdaulat” dalam kalimat tersebut bermakna memiliki kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara atau daerah. Berdaulat berkaitan dengan kekuasaan. Dalam konteks ini, kosakata “berdaulat” dimaknai dengan mempunyai kekuasaan penuh untuk mengatur suatu pemerintahan. Untuk mewujudkan kedaulatan

No.	Data		Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						warga negara Indonesia maupun warga negara asing.						tersebut salah satu langkah yang diambil Indonesia adalah dengan mewajibkan penggunaan rupiah untuk transaksi di dalam negeri. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi kekuasaan.
60.	Transformasi ekonomi juga memerlukan topangan yang kuat dari bidang-bidang lain seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, dan penghargaan pada hak azasi manusia.	√		Transformasi ekonomi		Wujud bahwa transformasi ekonomi memerlukan topangan yang kuat dari bidang-bidang lain seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, dan penghargaan pada hak azasi manusia adalah dengan adanya kerja sama antara bidang-bidang tersebut maka transformasi ekonomi di Indonesia dapat terwujud.				√		Kosakata “transformasi ekonomi” yang dapat ditemukan dalam kalimat tersebut memiliki arti perubahan ekonomi. Dalam konteks ini, kosakata “transformasi ekonomi” dimaknai dengan proses perubahan struktur ekonomi. Menurut Presiden Joko Widodo, transformasi tersebut memerlukan topangan yang kuat dari bidang politik luar negeri, bidang pertahanan dan keamanan, bidang penegakan hukum, dan penghargaan pada HAM. Hal ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut mengandung ideologi ekonomi.
61.	Untuk itu Indonesia akan terus mengirimkan pasukan perdamaian ke berbagai belahan dunia, menjadi penengah	√		Pasukan perdamaian		Wujud dari Indonesia akan terus mengirimkan pasukan perdamaian ke berbagai belahan dunia, menjadi					√	Kosakata “pasukan perdamaian” dalam kalimat tersebut memiliki makna kumpulan atau regu yang membela perdamaian. Kosakata “norma-norma” dalam kalimat tersebut bermakna aturan atau

No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks		Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal								
	konflik, memberikan kepemimpinan dalam pembuatan norma-norma regional dan global.				penengah konflik, memberikan kepemimpinan dalam pembuatan norma-norma regional dan global adalah pada awal 2017, Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian ke 10 negara.						ketentuan. Pasukan perdamaian dan norma-norma merupakan dua hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia akan tetap berperan dalam hal politik luar negeri. Peran-peran tersebut dilakukan dengan terus mengirimkan pasukan perdamaian ke berbagai belahan dunia, menjadi penengah konflik, memberikan kepemimpinan dalam pembuatan norma-norma regional dan global. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi sosial budaya.
62.	Indonesia akan terus berkontribusi dan berperan dalam menciptakan keamanan di Asia Tenggara, serta memberikan kepemimpinan di Samudra Hindia, di mana Indonesia akan menjadi pemimpin <i>Indian Ocean Rim Association</i> pada 2015-2017.		√	Berkontribusi dan berperan menciptakan keamanan	Wujud dari Indonesia akan terus berkontribusi dan berperan dalam menciptakan keamanan di Asia Tenggara, serta memberikan kepemimpinan di Samudra Hindia, di mana Indonesia akan menjadi pemimpin <i>Indian Ocean Rim Association</i> pada 2015-2017 adalah Indonesia			√			Bentuk gramatikal “berkontribusi dan berperan menciptakan keamanan” yang terdapat dalam kalimat tersebut bermakna bahwa Indonesia akan turut serta dan mengambil peran dalam menciptakan keamanan di Asia Tenggara. Sementara itu, bentuk gramatikal “memberikan kepemimpinan” bermakna bahwa Indonesia akan menjadi pemimpin dalam ajang <i>Indian Ocean Rim Association</i> . Kedua hal tersebut berkaitan dengan strategi pemerintahan bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo menerangkan

No.	Data		Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						sukses menjadi tuan rumah pertemuan puncak peringatan 20 tahun Indian Ocean Rim Association pada Maret 2017.						bahwa Indonesia akan terus berkontribusi dan berperan dalam menciptakan keamanan di Asia Tenggara, serta memberikan kepemimpinan di Samudra Hindia, di mana Indonesia akan menjadi pemimpin Indian Ocean Rim Association pada 2015-2017. Indiran Ocean Rim Association (IORA) merupakan sebuah organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara pesisir yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terdapat ideologi politik.
63.	Indonesia juga terus mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan dan kedzaliman serta menyerukan agar saudara-saudara Muslim di Timur Tengah meletakkan senjata dan berdamai demi kepentingan ukhuwah Islamiyah.		√	Mendukung kemerdekaan Palestina		Wujud dari Indonesia juga terus mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan dan kedzaliman serta menyerukan agar saudara-saudara Muslim di Timur Tengah meletakkan senjata dan berdamai demi kepentingan ukhuwah Islamiyah telah disampaikan oleh Presiden					√	Bentuk gramatikal “mendukung kemerdekaan Palestina” berkaitan dengan kehidupan sosial bernegara. Dalam konteks ini, bentuk gramatikal “mendukung kemerdekaan Palestina” dalam kalimat tersebut bermakna bahwa bangsa Indonesia berada di pihak Palestina untuk merdeka dari penjajahan dan kedzaliman serta menyerukan agar saudara-saudara Muslim di Timur Tengah meletakkan senjata dan berdamai demi kepentingan ukhuwah Islamiyah. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi sosial budaya.

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						Joko Widodo dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (KTT OKI) kelima di JCC pada Maret 2016. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang Palestina, selama itu pula bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Selain itu Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa Indonesia berdiri bersama negara-negara Organisasi Kerjasama Islam untuk meneruskan perjuangan yang belum selesai itu.						
64.	Kita juga akan membangun		√	Akan		Wujud dari pemerintah		√				Bentuk gramatikal “akan membangun kekuatan

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
	kekuatan pertahanan Negara yang tangguh dengan memberdayakan alutsista produksi dalam negeri.			membangun kekuatan pertahanan Negara		akan membangun kekuatan pertahanan negara yang tangguh dengan memberdayakan alutsista produksi dalam negeri adalah dengan mengarahkan sistem pertahanan negara Indonesia agar mengedepankan pengembangan pembangunan non fisik atau jiwa bangsa Indonesia melalui kesadaran bela negara yang didukung oleh kekuatan TNI beserta alutsistanya.						pertahanan Negara” dalam kalimat tersebut bermakna bahwa Indonesia akan membuat atau membangkitkan kekuatan pertahanan Negara Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh seorang presiden. Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia akan membangun kekuatan pertahanan Negara yang tangguh dengan memberdayakan alutsista produksi dalam negeri. Alutsista adalah akronim dari alat utama sistem pertahanan. Sehingga dalam kalimat tersebut terdapat ideologi kekuasaan.
65.	Kita harus memiliki kekuatan pertahanan Negara yang tidak hanya sebatas kekuatan esensial minimum, namun kekuatan yang mampu mengamankan dan menjaga kedaulatan wilayah		√	Harus memiliki kekuatan pertahanan Negara yang tidak hanya		Wujud dari Indonesia harus memiliki kekuatan pertahanan Negara yang tidak hanya sebatas kekuatan esensial minimum, namun kekuatan		√				Bentuk gramatikal “harus memiliki kekuatan pertahanan Negara yang tidak hanya sebatas kekuatan esensial minimum” menunjukkan bahwa dalam kalimat tersebut terdapat unsur kekuasaan dalam menghimbau para pendengar pidato. Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan

No.	Data	Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
	Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi sekitar 250 juta warganya.			sebatas kekuatan esensial minimum		yang mampu mengamankan dan menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi sekitar 250 juta warganya adalah dengan adanya bela negara, pertahanan negara, dan kekuatan negara.						bahwa Indonesia harus memiliki kekuatan pertahanan negara yang tidak hanya sebatas kekuatan esensial minimum, namun kekuatan yang mampu mengamankan dan menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi sekitar 250 juta warganya. Kekuatan esensial minimum, merupakan proses untuk modernisasi alat utama sistem pertahanan Indonesia. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut dapat ditemukan ideologi kekuasaan.
66.	Kekuatan pertahanan yang kita bangun itu harus tetap menjunjung tinggi karakter negara dan bangsa Indonesia sebagai negara dan bangsa yang cinta damai.		√	Harus tetap menjunjung tinggi karakter negara dan bangsa Indonesia		Wujud dari kekuatan yang dibangun oleh bangsa Indonesia harus tetap menjunjung tinggi karakter negara dan bangsa Indonesia sebagai negara dan bangsa yang cinta damai adalah dengan menanamkan sikap bela negara terhadap seluruh rakyat Indonesia. Hal ini akan semakin menguatkan		√				Bentuk gramatikal “harus tetap menjunjung tinggi karakter negara dan bangsa Indonesia” dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa dalam kalimat tersebut terdapat unsur kekuasaan dalam menghimbau para pendengar pidato. Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo mengemukakan kriteria kekuatan pertahanan yang seharusnya dibangun oleh bangsa Indonesia, yaitu harus tetap menjunjung tinggi karakter negara dan bangsa Indonesia sebagai negara dan bangsa yang cinta damai. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi kekuasaan.

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						rakyat Indonesia agar semakin mencintai bangsa Indonesia, dan memiliki sikap gotong-royong dan semangat untuk terus berjuang dan melakukan penguatan sistem diri.						
67.	Sejalan dengan itu, dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, Pemerintah mendorong sinergi KPK-POLRI-Kejaksaan Agung agar bahu membahu dalam bekerja dan menjadi pendorong pembangunan.	√		Penegakan hukum		Wujud dari KPK, POLRI, Kejaksaan Agung yang bersinergi, bahu membahu dalam bekerja dan menjadi pendorong pembangunan salah satunya adalah dengan menggagas surat elektronik penyelidikan yang akan diterima oleh ketiga penegak hukum tersebut setiap kali penyelidikan sebuah tindak pidana korupsi dimulai.			√			Kosakata “penegakan hukum” dalam kalimat tersebut mengandung makna mendirikan hukum atau mengusahakan supaya hukum tetap berdiri. Sementara itu, kosakata “pemberantasan korupsi” yang juga terdapat dalam kalimat tersebut bermakna proses, cara atau pencegahan terhadap korupsi. Kedua kosakata yang ditemukan dalam kalimat tersebut menunjukkan strategi pemerintahan Indonesia. Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Pemerintah mendorong sinergi KPK-POLRI-Kejaksaan Agung agar bahu membahu dalam bekerja dan menjadi pendorong pembangunan dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Jadi, kalimat tersebut



No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
												mengandung ideologi politik.
68.	Sinkronisasi dan harmonisasi antar lembaga penegak hukum terus ditingkatkan sehingga terbangun sistem hukum yang modern, yang menekankan aspek preventif dan fasilitatif.		√	Sinkronisasi dan harmonisasi antar lembaga penegak hukum		Salah satu wujud dari sinkronisasi dan harmonisasi antar lembaga penegak hukum terus ditingkatkan sehingga terbangun sistem hukum yang modern, yang menekankan aspek preventif dan fasilitatif dapat dilihat dari pernyataan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, yang mengungkapkan bahwa sinergi antara KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas penanganan kasus belaka. Tito juga meminta KPK untuk melakukan pengarahan kepada anggota			√			Bentuk gramatikal “sinkronisasi dan harmonisasi antar lembaga penegak hukum” dalam kalimat tersebut bermakna penyerentakan dan pengharmonisan antar lembaga hukum yang ada di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan Indonesia. Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan tujuan ditingkatkannya sinkronisasi dan harmonisasi antar lembaga penegak hukum, yaitu agar terbangun sistem hukum yang modern, yang menekankan aspek preventif dan fasilitatif. Sehingga, dalam kalimat tersebut dapat ditemukan ideologi politik.

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						kepolisian di daerah. Termasuk di dalamnya para istri polisi.						
69.	Pemerintah juga telah membentuk Panitia Seleksi Pimpinan KPK yang terdiri dari para tokoh masyarakat yang kredibel, independen, dan berintegritas.		√	Membentuk Panitia Seleksi Pimpinan KPK		Wujud bahwa pemerintah juga telah membentuk Panitia Seleksi Pimpinan KPK yang terdiri dari para tokoh masyarakat yang kredibel, independen, dan berintegritas adalah dengan terpilihnya sembilan orang wanita dari latar belakang yang berbeda-beda.			√			Bentuk gramatikal “membentuk Panitia Seleksi Pimpinan KPK” dalam kalimat tersebut bermakna bahwa pemerintah telah membuat atau menyusun Panitia Seleksi Pimpinan KPK. Hal tersebut menunjukkan sebuah strategi yang berkenaan dengan pemerintahan. Dalam konteks ini bentuk gramatikal “membentuk Panitia Seleksi Pimpinan KPK” dimaknai dengan adanya panitia yang akan menyeleksi calon-calon pimpinan KPK. Panitia tersebut terdiri dari tokoh masyarakat yang memiliki sikap kredibel, independen, serta berintegritas. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi politik.
70.	Secara khusus saya ingin memberikan perhatian kepada tanah Papua.		√	Memberikan perhatian		Salah satu wujud bahwa Presiden Joko Widodo Secara khusus saya ingin memberikan perhatian kepada tanah Papua dapat dilihat dari pernyataan					√	Bentuk gramatikal “memberikan perhatian” dalam kalimat tersebut bermakna membagi atau menyerahkan perhatian. Memberikan perhatian merupakan salah satu nilai sosial dalam kehidupan manusia. Dalam konteks ini tindakan “memberikan perhatian” yang diungkapkan oleh Presiden Joko

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						<p>Kepala Staf TNI AD Letjen TNI Hinsa Siburian yang mengatakan bahwa pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, perhatian yang diberikan oleh presiden cukup luar biasa untuk Papua. Hal itu pun dirasakan oleh masyarakat Papua. Hinsa Siburian menilai apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat sudah dilakukan secara maksimal dengan dibangunnya berbagai infrastruktur seperti jalan raya, bandar udara, pelabuhan, dan lainnya.</p>						<p>Widodo dimaknai dengan Presiden akan lebih memberikan perhatian atau lebih peduli kepada tanah Papua. Sehingga, kalimat tersebut mengandung ideologi sosial budaya.</p>

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
71.	Pemerintah berkomitmen untuk membangun Papua dan menjadikan Papua sebagai Tanah Damai.	√		berkomitmen		Berdasarkan Seminar Nasional yang diadakan oleh Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI dan Jaringan Damai Papua (JDP) dengan tema “Tindak Lanjut Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk Papua Tanah Damai” pada Rabu, 27 Januari 2016 ditemukan pemaparan yang menyatakan belum tersinerginya cara pandang dalam menyelesaikan Papua. Jadi dapat disimpulkan bahwa komitmen pemerintah untuk membangun Papua dan menjadikan Papua sebagai Tanah Damai belum terwujud.					√	Kosakata “berkomitmen” dalam kalimat tersebut memiliki makna berjanji. Berkomitmen atau berjanji merupakan suatu nilai sosial dalam kehidupan manusia. Dalam konteks ini tindakan “berkomitmen” dimaknai dengan pemerintah berjanji akan membangun Papua, yang dianggap sebagai daerah yang tertinggal di Indonesia, menjadi lebih maju. Pemerintah juga berjanji untuk menjadikan Papua sebagai Tanah Damai, mengingat terjadinya kasus Tolikara di Papua. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi sosial budaya.
72.	Kerusuhan seperti kasus	√		kerusuhan		Wujud dari kerusuhan kasus					√	Kosakata “kerusuhan” dalam kalimat tersebut

No.	Data	Analisis Wacana Kritis			Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks		Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal								
	Tolikara, seharusnya tidak terjadi lagi di masa depan.				Tolikara, seharusnya tidak terjadi lagi di masa depan ternyata belum dapat diwujudkan karena sampai tahun 2016 masih ada laporan mengenai perang suku di Papua di wilayah Freeport.						bermakna kekacauan atau keributan. Kerusuhan merupakan salah satu kejadian sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini kejadian “kerusuhan” dimaknai dengan terjadinya sebuah kekacauan di Papua. Kerusuhan tersebut merupakan kasus Tolikara. Kasus Tolikara di Papua terjadi karena perang adat terkait sengketa pembagian dana desa antara warga distrik Gika dan distrik Panaga. Pemerintah menginginkan agar kerusuhan seperti ini kelak tidak terjadi lagi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kalimat tersebut terkandung ideologi sosial budaya.
73.	Pemerintah memberikan akses bagi wartawan asing untuk masuk dan meliput di Papua.		√	Memberikan akses	Wujud dari pemerintah memberikan akses bagi wartawan asing untuk masuk dan meliput di Papua adalah pemerintah tidak melarang setiap wartawan asing yang ingin meliput, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi oleh jurnalis asing tersebut, yaitu mengantongi		√				Bentuk gramatikal “memberikan akses” dalam kalimat tersebut bermakna mengizinkan masuk atau memberikan jalan masuk. Akses yang diberikan tersebut merupakan sebuah kekuasaan. Dalam konteks ini bentuk gramatikal “memberikan akses” dimaknai dengan memberikan jalan masuk bagi wartawan asing untuk masuk dan meliput kejadian-kejadian di Papua. Kejadian-kejadian yang terjadi di Papua pada tahun 2015 antara lain, kekerasan, pembakaran masjid, penembakan, dan lain-lain.

No.	Data	Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						syarat keimigrasian, seperti visa kerja.						Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi kekuasaan.
74.	Pemerintah juga berkomitmen untuk melindungi masyarakat adat yang menghadapi konflik agraria, menurunkan emisi karbon dengan menghentikan kebakaran hutan, mengelola hutan secara lestari, melindungi nelayan dari para pencuri ikan dari negara-negara lain, melindungi generasi mendatang dari ancaman bahaya narkoba, serta membentuk komite rekonsiliasi untuk pelanggaran HAM berat.	√		berkomitmen		Wujud bahwa pemerintah berkomitmen untuk melindungi masyarakat adat yang menghadapi konflik agraria, menurunkan emisi karbon dengan menghentikan kebakaran hutan, mengelola hutan secara lestari, melindungi nelayan dari para pencuri ikan dari negara-negara lain, melindungi generasi mendatang dari ancaman bahaya narkoba, serta membentuk komite rekonsiliasi untuk pelanggaran HAM berat adalah adanya kepastian yang diungkapkan oleh					√	Kosakata “berkomitmen” dalam kalimat tersebut memiliki makna berjanji. Kosakata “melindungi” dalam kalimat tersebut memiliki makna menjaga atau memelihara. Berkomitmen atau berjanji dan melindungi merupakan nilai sosial dalam kehidupan manusia. Dalam konteks ini tindakan “berkomitmen” dimaknai dengan pemerintah berjanji akan memperbaiki keadaan-keadaan bermasalah di Indonesia. Diantaranya, konflik agraria, kebakaran hutan, pengelolaan hutan, pencurian ikan oleh negara lain, narkoba, dan pelanggaran HAM. Jadi, kalimat tersebut mengandung ideologi sosial budaya.

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						Menteri Agraria dan Tata Ruang Sosial, Sofyan Djalil, yang menyatakan bahwa Kementrian Agraria akan melindungi wilayah adat. Hal itu tercantum dalam undang-undang pertahanan.						
75.	Pemerintah menginginkan ada rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu.	√		rekonsiliasi		Wujud bahwa pemerintah menginginkan ada rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu adalah pemerintah memutuskan akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dalam Tragedi Trisakti dan Semanggi 1-2 melalui rekonsiliasi.			√			Kosakata “rekonsiliasi” dalam kalimat tersebut bermakna memulihkan hubungan agar kembali pada keadaan semula. Rekonsiliasi termasuk dalam suatu strategi yang berkaitan dengan pemerintahan. Dalam konteks ini kosakata “rekonsiliasi” dimaknai sebagai strategi usaha untuk memulihkan hubungan yang kurang baik. Hal ini memiliki tujuan agar para pemerintah selanjutnya tidak mengalami “beban” atau hal-hal yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh generasi atau pemerintah sebelumnya. Sehingga, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi politik.
76.	Anak-anak bangsa harus bebas		√	Menatap masa		Wujud dari anak-anak					√	Bentuk gramatikal “menatap masa depan” yang

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
	menatap masa depan yang terbentang luas.			depan		bangsa bebas menatap masa depan yang terbentang luas adalah belum semua anak-anak bangsa dapat menatap masa depan Indonesia dengan luas. Masih banyak anak-anak bangsa yang menanggap bahwa mereka tidak memiliki masa depan yang luas karena faktor kemiskinan.						terdapat dalam kalimat tersebut bermakna memiliki gambaran tentang masa depan. Menatap masa depan merupakan salah satu hal yang terjadi di kehidupan sosial. Dalam konteks ini bentuk gramatikal “menatap masa depan” dimaknai dengan hak-hak anak-anak bangsa Indonesia yang harus memiliki masa depan yang cerah dan luas. Oleh karena itu, kalimat tersebut mengandung ideologi sosial budaya.
77.	Semua itu merupakan langkah awal pemerintah untuk menegakkan kemanusiaan di bumi Nusantara.	√		kemanusiaan		Wujud bahwa semua itu merupakan langkah awal pemerintah untuk menegakkan kemanusiaan di bumi Nusantara salah satunya adalah telah dilakukannya rekonsiliasi yang dianggap pemerintah sebagai solusi terbaik terhadap kasus pelanggaran HAM di Indonesia.					√	Kosakata “kemanusiaan” dalam kalimat tersebut memiliki makna sifat-sifat manusia. Kemanusiaan sangat erat kaitannya dengan kehidupan sosial dan kebudayaan. Dalam konteks ini kosakata “kemanusiaan” dimaknai sebagai hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai manusia. Kemanusiaan berarti bahwa setiap manusia layak untuk dihargai dan tidak boleh diperlakukan secara semena-mena. Oleh karena itu, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi sosial budaya.



No.	Data	Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
78.	Kita membutuhkan lebih banyak lagi pejuang-pejuang pembangunan seperti Saudara-saudara, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas, Etos Kerja, dan semangat Gotong Royong.	√		Semangat gotong royong		Wujud bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi pejuang-pejuang pembangunan seperti Saudara-saudara, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas, Etos Kerja, dan semangat Gotong Royong adalah untuk memajukan bangsa Indonesia agar lebih baik lagi.					√	Kosakata “semangat gotong royong” memiliki makna gairah untuk bekerja bersama-sama atau saling membantu, merupakan suatu kebudayaan yang ada di Indonesia. Dalam konteks ini kosakata “semangat gotong royong” dimaknai sebagai dua hal yang harus dimiliki oleh para pendengar pidato selaku pejuang pembangunan bangsa Indonesia. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi sosial budaya.
79.	Untuk itu, pada hari ini saya menegaskan kembali perlunya gerakan nasional revolusi mental.	√		menegaskan		Salah satu wujud dari gerakan nasional revolusi mental adalah adanya pemberantasan pungli yang dilakukan oleh banyak sekolah di Indonesia.		√				Kosakata “menegaskan” dalam kalimat tersebut bermakna menerangkan atau menyatakan dengan tegas. “Menegaskan” dalam kalimat tersebut berhubungan dengan kekuasaan. Dalam konteks ini kosakata “menegaskan” dimaknai sebagai suatu hal yang harus disadari oleh para pendengar pidato. Presiden Joko Widodo berwenang untuk “menegaskan” atas kekuasaannya sebagai kepala negara. Oleh karena itu, kalimat tersebut mengandung ideologi kekuasaan.

No.	Data	Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis	
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi		Sosial Budaya
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
80.	Gerakan tersebut akan menyuburkan kembali nilai-nilai semangat juang, optimisme, kerja keras, kesantunan, tatakrama, dan memperkokoh karakter bangsa, serta memperkuat tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.	√		kesantunan		Wujud bahwa gerakan nasional revolusi mental akan menyuburkan kembali nilai-nilai semangat juang, optimisme, kerja keras, kesantunan, tatakrama, dan memperkokoh karakter bangsa, serta memperkuat tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 belum dapat diwujudkan secara keseluruhan, salah satunya karena masih maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia. Namun di sisi lain, revolusi mental berhasil menaikkan angka perekonomian di Indonesia.					√	Kosakata “kesantunan” merupakan kosakata yang berkaitan dengan budaya Indonesia. Dalam konteks ini kosakata “kesantunan” dimaknai sebagai hal yang menyangkut dengan kebudayaan yang telah tertanam pada bangsa Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa dalam kalimat tersebut terkandung ideologi sosial budaya.
81.	Untuk hidup sejahtera perlu kerja keras, butuh pengorbanan.	√		Kerja keras		Wujud bahwa untuk hidup sejahtera perlu kerja keras,					√	Kosakata “kerja keras” dalam kalimat tersebut mengandung makna suatu kegiatan yang dikerjakan

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						butuh pengorbanan adalah berkat kerja keras dan pengorbanan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh maka apa yang diinginkan pun dapat tercapai, salah satunya adalah kesejahteraan dalam hidup.						secara sungguh-sungguh tanpa kenal lelah sebelum target tercapai. Kerja keras merupakan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Dalam konteks ini, kosakata “kerja keras” dimaknai sebagai suatu usaha atau cara untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Oleh karena itu, kalimat tersebut mengandung ideologi sosial budaya.
82.	AYO KERJA untuk bangsa!		√	AYO KERJA untuk bangsa!		Wujud dari kerja untuk bangsa adalah semua kebijakan-kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil demi kemajuan bangsa Indonesia.			√			Bentuk gramatikal “AYO KERJA untuk bangsa!” bermakna bahwa berkerja dilakukan untuk bangsa Indonesia. Hal itu menunjukkan suatu tindakan yang berkaitan dengan pemerintahan. Dalam konteks ini, bentuk gramatikal “AYO KERJA untuk rakyat!” dimaknai sebagai seruan Presiden Joko Widodo kepada para pendengar pidatonya untuk terus bekerja demi bangsa Indonesia. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi politik.
83.	AYO KERJA untuk negara!		√	AYO KERJA untuk negara!		Wujud dari kerja untuk bangsa adalah semua kebijakan-kebijakan yang			√			Bentuk gramatikal “AYO KERJA untuk negara!” bermakna bahwa berkerja dilakukan untuk negara Indonesia. Hal itu menunjukkan suatu tindakan

No.	Data		Analisis Wacana Kritis				Indikator Ideologi					Analisis
	Kalimat	Dimensi Teks			Dimensi Praktik Wacana	Dimensi Praktik Sosiokultural	Hegemoni	Kekuasaan	Politik	Ekonomi	Sosial Budaya	
		Kosakata	Bentuk Gramatikal	Teks								
						diambil pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil demi kemajuan negara Indonesia.						yang berkaitan dengan pemerintahan. Dalam konteks ini, bentuk gramatikal “AYO KERJA untuk rakyat!” dimaknai sebagai seruan Presiden Joko Widodo kepada para pendengar pidatonya untuk terus bekerja demi negara Indonesia. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi politik.
84.	AYO KERJA untuk rakyat!		√	AYO KERJA untuk rakyat!		Wujud dari kerja untuk bangsa adalah semua kebijakan-kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil demi kesejahteraan rakyat Indonesia.			√			Bentuk gramatikal “AYO KERJA untuk rakyat!” bermakna bahwa berkerja dilakukan untuk rakyat Indonesia. Hal itu menunjukkan suatu tindakan yang berkaitan dengan pemerintahan. Dalam konteks ini, bentuk gramatikal “AYO KERJA untuk rakyat!” dimaknai sebagai seruan Presiden Joko Widodo kepada para pendengar pidatonya untuk terus bekerja demi rakyat Indonesia. Jadi, dalam kalimat tersebut terkandung ideologi politik.

## BIODATA

Nama : Sayyidah Khairunnida

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Lahir : Bogor

Tanggal Lahir : 05 Juni 1995

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Perum. Ciampea Asri Blok D9/19 RT  
04/06 Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor

Kode Pos : 16620

No. HP : 082299034683

E-mail : [sayyidahkhairunnida@yahoo.co.id](mailto:sayyidahkhairunnida@yahoo.co.id)



## Daftar Riwayat Hidup

### Data Pribadi

Nama : Sayyidah Khairunnida

Tempat, Tanggal Lahir: Bogor, 05 Juni 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Tinggi badan : 160 cm

Agama : Islam

Alamat : Perum. Ciampea Asri Blok D9/19 RT 04  
RW 06 Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor 16620

No. HP : 082299034683

E-mail : [sayyidahkhairunnida@yahoo.co.id](mailto:sayyidahkhairunnida@yahoo.co.id)



### Pendidikan

Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta	2013-2017
SMA <i>plus</i> Bina Bangsa Sejahtera	2010-2017
Al-Nahdlah Islamic Boarding School	2007-2010
SDN Bojong Rangkas 01	2001-2007
TK-IT Al-Huda Bogor	2000-2001

### KETERAMPILAN

Teknologi dan Informasi : Ms. Word, Ms. Excel, Ms. Power Point, Media Sosial

Bahasa : Indonesia, Inggris, Arab

### Pengalaman Kerja

Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Al-Nahdlah Islamic Boarding School 2016

## **Kegiatan Selama Menjadi Mahasiswa**

Peserta Kuliah Kerja Nyata LPM UNJ 2016	2016
Peserta Kuliah Umum Bersama antara Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Mataram dengan Tema " <i>Indonesia dalam Perspektif Politik Kebahasaan</i> "	2016
Penelitian Lapangan ke Desa Penglipuran Bali	2016
Penelitian Lapangan ke Desa Sade Sasak Lombok	2016
Peserta Seminar Bersama antara Program Studi Sastra Indonesia FBS UNJ dan Program Studi Sastra Indonesia Universitas Udayana Bali dengan Tema " <i>Bahasa, Sastra, serta Budaya Bali dan Betawi: Suatu Perbandingan</i> "	2016
Peserta Diskusi Akademik "Penelitian Bahasa dan Sastra di Lombok" antara Program Studi Sastra Indonesia FBS UNJ dan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	2016
Peserta Kegiatan Seminar Internasional dalam Rangka Bulan Bahasa 2015 " <i>Bahasa, Sastra, dan Pembelajaran sebagai Basis Industri Kreatif</i> "	2015
Peserta Seminar Film Biografi Indonesia	2015
Panitia Seminar <i>StandUp Comedy</i> Kelas Linguistik	2015
Staff Divisi Humas BEMJBSI 2014	2014
Panitia Pelaksana Masa Pengenalan Akademik Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia UNJ tahun 2014	2014
Panitia pelaksana Seminar Mahasiswa Wirausaha (SAMAWA) Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia UNJ	2014
Peserta Sosialisasi Program Kreativitas Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia UNJ	2013
Peserta Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia UNJ	2013
Panitia Pelaksana Kegiatan G-Sastrasia 2013	2013